



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024





PERNYATAAN TELAH DIREVIU



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2025



Inspektur IV

Drh. Pujo Hamadi, MP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dapat menyelesaikan tugas dan fungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya pangan asal ternak di Indonesia.



Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan, maka Ditjen PKH selaku instansi pemerintah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis instansi yang dilaksanakan sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sehingga berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan, serta pencapaian tujuan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

LKj Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan.

Kami berharap, LKj Ditjen PKH Tahun 2024 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Ditjen PKH untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.



Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si.
NIP. 197611252003121001



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
ii	
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.4. Sumber Daya Manusia	7
1.5. Dukungan Anggaran	9
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis Ditjen PKH 2020-2024	12
2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen PKH	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program	31
3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2024	32
3.3. Kinerja Lainnya	115
3.4. Akuntabilitas Keuangan	119
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	123
IV. PENUTUP	126



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PKH	17
Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Ditjen PKH Tahun 2021-2024	22
Tabel 3 Target Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024	26
Tabel 4 Rincian Output (RO) Ditjen PKH T.A. 2024	27
Tabel 5 Capaian Indikator Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2024	33
Tabel 6 Produksi Daging Tahun 2020-2024	35
Tabel 7 Capaian "Terpenuhinya Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi"	36
Tabel 8 Jumlah Pemotongan Ternak 2023-2024	37
Tabel 9 Data Pemotongan Hewan Kurban Tahun 2023-2024	37
Tabel 10 Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Daging Tahun 2020-2024	38
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Daging dengan Target Jangka Menengah	38
Tabel 12 Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Tahun 2020-2024	40
Tabel 13 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Peternakan Tahun 2020-2024	42
Tabel 14 Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2024	42
Tabel 15 Perkembangan Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024	43
Tabel 16 Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2024	44
Tabel 17 Kelembagaan Korporasi Peternak Tahun 2024	45
Tabel 18 Capaian Hijauan Pakan Ternak Tahun 2024	48
Tabel 19 Capaian Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di UPT Tahun 2024	48
Tabel 20 Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2020-2024	51
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Susu dengan Target Jangka Menengah	51
Tabel 22 Capaian Kinerja "Meningkatnya Produksi Susu untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional" Tahun 2024	52
Tabel 23 Produksi Bibit dan Benih Sapi Perah Tahun 2020-2024	54
Tabel 24 Produksi Telur Tahun 2020-2024	55
Tabel 25 Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Telur Tahun 2020-2024	56



Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Telur dengan Target Jangka Menengah.....	56
Tabel 27 Produk Pangan Segar Asal Hewan Tahun 2020-2024.....	60
Tabel 28 Capaian Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024	60
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan dengan Target Jangka Menengah	61
Tabel 30 Capaian Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i> Tahun 2020-2024	65
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i> dengan Target Jangka Menengah	66
Tabel 32 Capaian Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2020-2024	69
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS dengan Target Jangka Menengah	70
Tabel 34 Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan Tahun 2024.....	76
Tabel 35 Pemanfaatan Fasilitas Sarana Laboratorium Kesmavet BPMSPH Bogor	77
Tabel 36 Jumlah Sampel Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR) BPMSPH Bogor Tahun 2024.....	80
Tabel 37 Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.....	81
Tabel 38 Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024.....	82
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Target Jangka Menengah	82
Tabel 40 Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet	83
Tabel 41 Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024.....	87
Tabel 42 Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024.....	88
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024.....	88
Tabel 44 Realisasi Capaian Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Per Kelompok Komoditas Tahun 2023-2024	91



Tabel 45 Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024	92
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Target Jangka Menengah	92
Tabel 47 Target “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” Tahun 2024	101
Tabel 48 Realisasi “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” Tahun 2024	102
Tabel 49 Nilai IKPA Ditjen PKH Tahun 2024.....	113
Tabel 50 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Kegiatan	122
Tabel 51 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Kewenangan ...	122
Tabel 52 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Jenis Belanja...	123



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2024.....	8
Grafik 2 Alokasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024.....	9
Grafik 3 Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2020-2024.....	46
Grafik 4 Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024	53
Grafik 5 Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024	62
Grafik 6 Perkembangan Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023-2024	94
Grafik 7 Dinamika Perubahan Pagu Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024	120
Grafik 8 Tren Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020-2024	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 UPT Penerima SNI Awards 2024 (dari kiri Kepala BPTUHPT Padang Mangatas, BBIB Singosari, dan BBVF Psuветma)	116
Gambar 2 Dirjen PKH Menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	117
Gambar 3 Bhumandala Award 2024, 4 November 2024.....	118



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	130
Lampiran 2 Distribusi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	131
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	133
Lampiran 4 Penyesuaian Indikator Sasaran Program “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi” dan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024	139
Lampiran 5 Tanggapan atas Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi III	140
Lampiran 6 Tabel Produksi Daging, Susu dan Telur Tahun 2020-2024	141
Lampiran 7 Tabel Populasi Ternak Tahun 2023-2024	142
Lampiran 8 Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2024	143
Lampiran 9 Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit Rabies dan Anthrax Tahun 2023-2024	145
Lampiran 10 Status Kesehatan Hewan Per Penyakit Tahun 2024	147
Lampiran 11 Data Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023	148
Lampiran 12 Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024	159
Lampiran 13 Data Volume dan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023-2024* (Angka Sementara s.d. Desember 2024) .	164
Lampiran 14 Data Dukung Indikator “Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) Ditjen PKH Tahun 2024”	166
Lampiran 15 Perhitungan Analisis Efisiensi Sumber Daya Ditjen PKH T.A. 2024..	170
Lampiran 16 Rincian Norma Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKH Tahun 2024	181
Lampiran 17 Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024	183
Lampiran 18 Surat Keputusan Dirjen PKH tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	184



Lampiran 19 Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Monev TA. 2024.....	185
--	-----



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diwujudkan dalam tiga Sasaran Program yaitu (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta (3) Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya dari ketiga Sasaran Program tersebut dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Sasaran Program (ISP).

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program Ditjen PKH menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang berisi terkait capaian Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun kelima (terakhir) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PKH Tahun 2024 didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.009.589.095.000,- dengan realisasi Rp. 962.944.664.118,- atau mencapai 95,38% (termasuk anggaran diblokir). Blokir anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 31.092.815.000, sehingga pagu anggaran tanpa blokir sebesar Rp. 978.496.280.000 dengan realisasi serapan anggaran tanpa blokir sebesar 98,41%.

Rata-rata capaian kinerja Ditjen PKH Tahun 2024 sebesar **107,45 (Sangat Berhasil)** dengan uraian 6 (enam) capaian indikator kinerja termasuk kategori **Sangat Berhasil** yaitu (1) Peningkatan Produksi Susu; (2) Peningkatan Produksi Telur; (3) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (6) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, 5 (lima) capaian indikator kinerja termasuk kategori **Berhasil** yaitu (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan (5) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan.



Pada tahun 2024 ini, Ditjen PKH menghadapi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya: 1) Sebagian besar kepemilikan ternak untuk ruminasia potong, baik besar maupun kecil adalah peternakan rakyat yang bersifat subsiten dengan kepemilikan 2-3 ekor; 2) Munculnya penyakit ASF, PMK, SE, Surra, AI, Jembrana, AI dan Anthrax di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 3) Masih tingginya struktur ongkos pakan (keterbatasan lahan untuk penanaman HPT dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat) yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 4) Produktifitas ternak masih rendah karena manajemen reproduksi dan pemuliaan belum optimal; 5) Tingginya harga komoditas pangan asal ternak karena jaringan distribusi, Infrastruktur dan akses yang belum memadai; 6) Belum optimalnya penerapan Inovasi dan teknologi dalam pengembangan usaha peternakan, terutama sistem pendataan, sistem Kesehatan hewan, inovasi pakan, serta sistem produksi; 7) Daya saing produk peternakan masih rendah; 8) Perdagangan bebas; 9) Dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin terbatas;

Upaya yang telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah dari dana APBN dan Non APBN. Dalam upaya untuk mendukung percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak untuk mewujudkan swasembada pangan asal ternak, maka Ditjen PKH pada tahun 2025 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber, selain rupiah murni dan NonAPBN antara lain: BLU, PNBK, kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta hibah luar negeri.
2. Mendorong pelaku usaha, baik PMA maupun PMDN untuk berinvestasi dalam mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional.
3. Memperkuat regulasi yang mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait.
5. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota
6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pembangunan pangan dan pertanian telah difokuskan untuk menguatkan produksi pangan domestik secara berkelanjutan, dengan ketersediaan yang mencukupi permintaan pangan, berkualitas dan aman, serta mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi di bidang pangan dan pertanian.

Salah satu sumber pangan adalah produk peternakan. Ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Konsumsi daging apabila disetarakan dengan protein selama periode 2020-2024 menunjukkan angka yang berfluktuasi, tetapi terjadi peningkatan selama periode tersebut. Angka konsumsi pada tahun 2020 sebesar 4,05 gram/kapita/hari dan pada tahun 2024 menjadi 4,88 gram/kapita/hari. Namun, konsumsi telur dan susu apabila disetarakan dengan protein mengalami penurunan dari 3,47 gram/kapita/hari pada tahun 2020 menjadi 3,17 gram/kapita/hari pada tahun 2024

Dalam mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai amanat RPJPN maupun RPJMN, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki tugas “Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan” sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja Ditjen PKH diukur dari aspek teknis berupa produksi komoditas peternakan dan kinerja pendukungnya maupun aspek makro ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), serta Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Peternak (NTUPT).

Capaian utama subsektor peternakan yaitu pertumbuhan produksi komoditas strategis utama, yaitu daging, susu, dan telur. Pada periode 2020-2024 pertumbuhan produksi komoditas peternakan cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 1,32% untuk daging, 5,18% untuk telur dan -2,90% untuk susu.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, pertumbuhan PDB sektor pertanian secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 0,79% (c to c).



Pertumbuhan positif tersebut juga merupakan hasil kontribusi subsektor peternakan. PDB subsektor peternakan secara kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2024 (Angka Sangat Sementara) sebesar Rp.145.455,70 Miliar atau meningkat 4,66% (*c to c*). Namun demikian, capaian positif ini belum melampaui pertumbuhan sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 yang mencapai 7,78% (*c to c*) di subsektor peternakan dan 3,30% (*c to c*) di sektor pertanian.

Peningkatan produksi peternakan tidak hanya diarahkan hanya pada peningkatan PDB subsektor peternakan, tetapi adanya kesinambungan dengan peningkatan pendapatan peternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Salah satu indikator kesejahteraan peternak adalah NTPT dan NTUPT. Pada tahun 2024, NTPT senilai 102,48 atau meningkat 0,66% dibandingkan dengan tahun 2023, kemudian untuk NTUPT tahun 2024 senilai 104,78 atau meningkat 1,68% dibandingkan dengan tahun 2023.

Selanjutnya, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tidak hanya menitikberatkan pada sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir, salah satunya melalui pemberdayaan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi PMDN secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 sebesar Rp4,35 triliun atau tumbuh sebesar 60,52% jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2023 (*c to c*). Investasi PMA secara kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2024 sebesar US\$23,82 juta atau tumbuh sebesar 15,13% jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan III tahun 2023 (*c to c*). Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Hal tersebut tergambar dari hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) bahwa jumlah usaha peternakan di Indonesia mencapai 12,19 juta unit.

Pelaksanaan pembangunan subsektor peternakan yang berkelanjutan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Adapun kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis yang harus dihadapi oleh Ditjen PKH diantaranya yaitu: 1) Sebagian besar kepemilikan ternak untuk ruminasia potong, baik besar maupun kecil adalah peternakan rakyat yang bersifat subsiten dengan kepemilikan 2-3 ekor; 2) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti *African Swine Fever*, Penyakit Mulut dan Kuku, *Septicaemia Epizootica*, *Surra*, *Avian Influenza*, Jembrana, dan *Anthrax* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 3) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya keterbatasan lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 4) Produktivitas ternak masih rendah karena manajemen reproduksi dan pemuliaan belum optimal; 5) Tingginya harga komoditas pangan asal ternak karena jaringan distribusi, infrastruktur dan akses yang belum memadai; 6) Belum optimalnya penerapan inovasi



dan teknologi dalam pengembangan usaha peternakan, terutama sistem pendataan, sistem kesehatan hewan, inovasi pakan, serta sistem produksi; 7) Daya saing produk peternakan masih rendah; 8) Perdagangan bebas; 9) Dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin terbatas

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan subsektor peternakan, Ditjen PKH melaksanakan 3 (tiga) program yaitu: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan (3) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu juga didukung oleh modal dasar pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain sumber daya kawasan dan lahan, sumber daya ternak, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung peternakan, serta regulasi dan sinergitas kebijakan yang mendukung pembangunan peternakan.

Pelaksanaan program/kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Ditjen PKH sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan serta pendaftaran pakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, serta mutu ternak; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.



2. Direktorat Pakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan, serta pendaftaran pakan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.
3. Direktorat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Kesehatan Hewan.



4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang *hygiene sanitasi* dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang *hygiene* sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dengan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, mutu hasil peternakan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 1**.

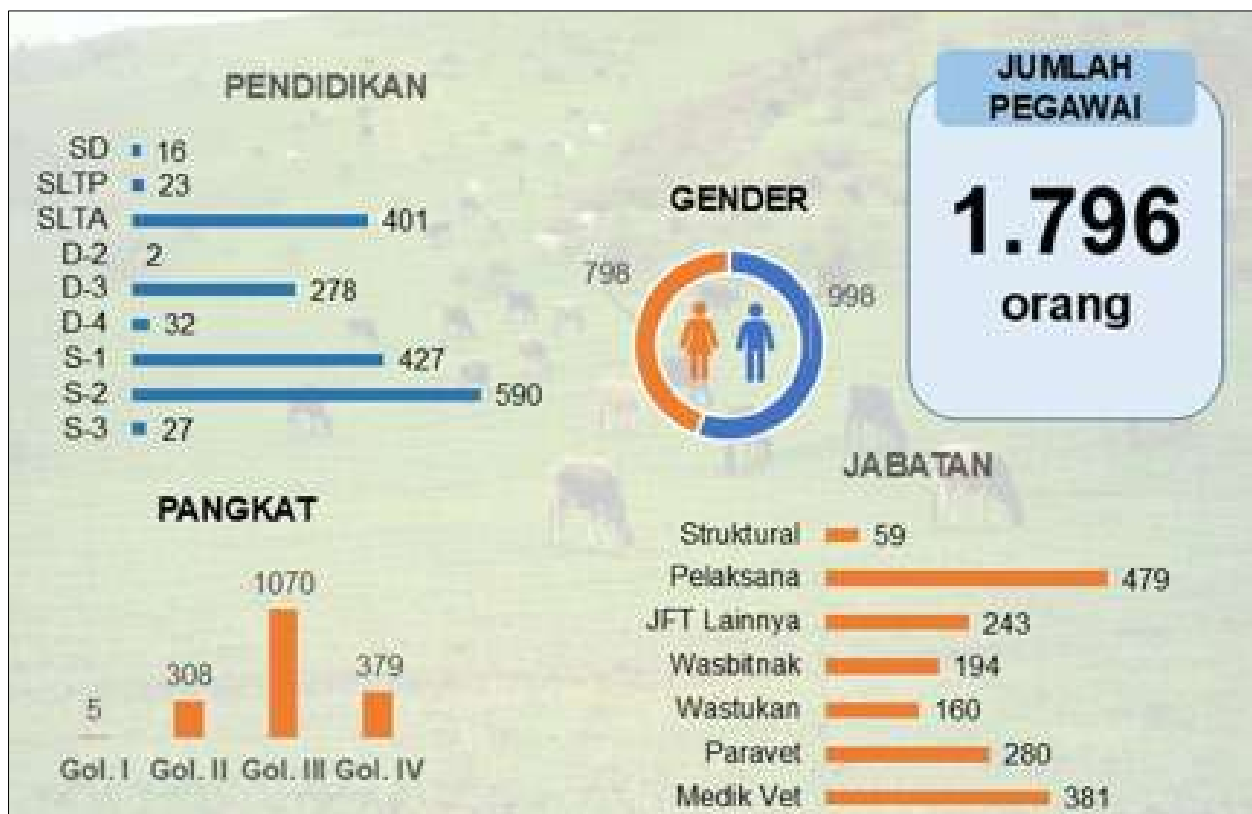
1.4. Sumber Daya Manusia

Ditjen PKH dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 1.796 orang pegawai yang tersebar di 1 Kantor Pusat dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan



status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.762 orang pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 34 orang pegawai. Klasifikasi pegawai Ditjen PKH sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai di Kantor Pusat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT):
 - a. Jumlah pegawai Kantor Pusat sebanyak 379 orang yang terdiri dari Direktorat Jenderal sebanyak 1 orang; Sekretariat Ditjen sebanyak 118 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 56 orang; Direktorat Pakan sebanyak 43 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 69 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 45 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 47 orang.
 - b. Jumlah pegawai UPT sebanyak 1.417 orang yang tersebar pada 23 UPT.



Grafik 1 Sumber Daya Manusia Ditjen PKH Tahun 2024

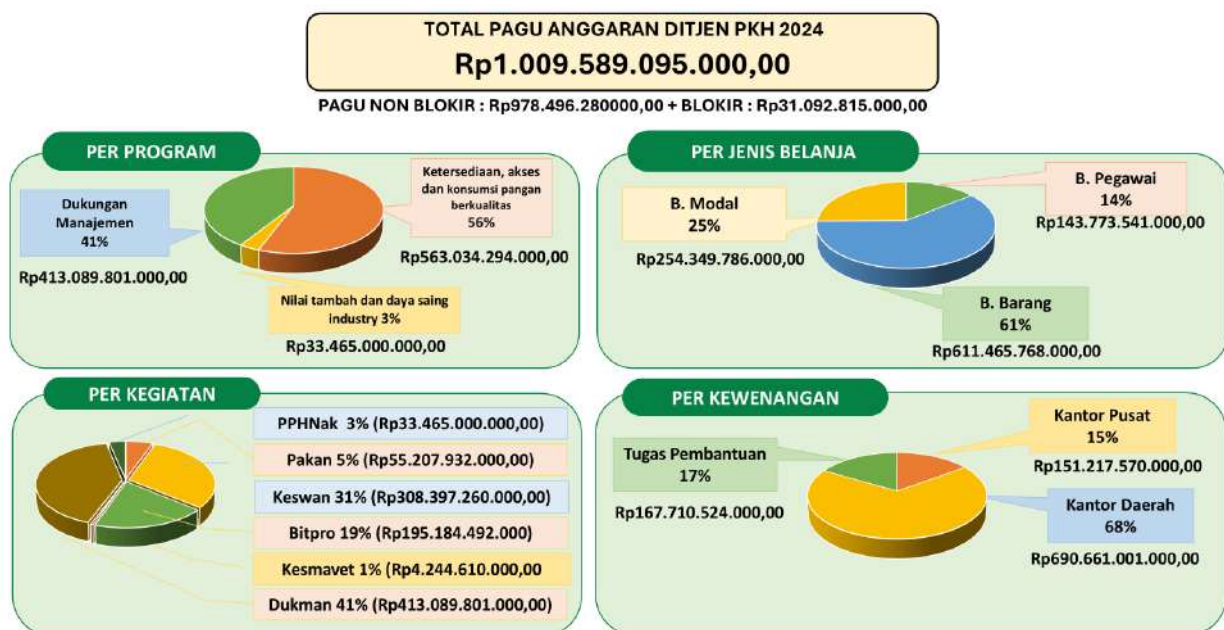
2. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 998 orang dan perempuan sebanyak 798 orang.
3. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 379 orang; Golongan III sebanyak 1.070 orang; Golongan II sebanyak 308 orang; dan Golongan I sebanyak 5 orang.



4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 27 orang; S-2 sebanyak 590 orang; S-1 sebanyak 427 orang; D-4 sebanyak 32 orang; D-3 sebanyak 278 orang; D-2 sebanyak 2 orang; SLTA sebanyak 401 orang; SLTP sebanyak 23 orang; dan SD sebanyak 16 orang.
5. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Medik Veteriner sebanyak 381 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 280 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 160 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 194 orang; JFT lainnya sebanyak 243 orang; JFU sebanyak 479 orang; dan Struktural sebanyak 59 orang.

Jumlah pegawai Ditjen PKH tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 (1.829 orang) mengalami pengurangan sebanyak 33 orang atau 1,80%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai sebanyak 2 orang dan pensiun sebanyak 31 orang. Jumlah pegawai Ditjen PKH Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

1.5. Dukungan Anggaran



Grafik 2 Alokasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2024, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp1.009.589.095.000,00 (*satu triliun sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp31.092.815.000,00 (*tiga puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*). Proporsi anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Kantor Daerah sebesar Rp690.661.001.000,00 (68,41%). Selanjutnya, proporsi



anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terdapat pada Belanja Barang sebesar Rp611.465.768.000,00 (60,57%), dan berdasarkan kegiatan terdapat pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp413.089.801.000,00 (40,92%). Proporsi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan proporsi terbesar karena untuk pemenuhan pelayanan teknis minimal pada UPT lingkup Ditjen PKH.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Rencana Strategis



Indikator Kinerja Utama



Perjanjian Kinerja





II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Ditjen PKH 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PKH periode 2020-2024. Renstra Ditjen PKH ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 13973/KPTS/HK.200/F1/12/2020, kemudian mengalami revisi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 15600/Kpts/RC.020/F/10/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), kebijakan dan strategi organisasi yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, sehingga berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan kebutuhan anggaran.

Revisi Renstra Ditjen PKH 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: i) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya; ii) penyesuaian target dan indikator kinerja Kementerian Pertanian dengan Ditjen PKH dalam rangka mengakomodir kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Renstra Ditjen PKH 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi panduan pelaksanaan selama lima tahun (2020-2024). Dalam melaksanakan visi dan misi tahun 2024, Ditjen PKH mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang telah mengalami revisi kedua pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Selaras dengan visi Kementerian Pertanian “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Ditjen PKH merumuskan visi:

“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”



Misi

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Ditjen PKH, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Ditjen PKH sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Benih/Bibit dan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan Ketersediaan Pakan yang Berkualitas secara Berkelanjutan

Pakan merupakan komponen terbesar dalam peternakan, baik usaha pembibitan, pengembangbiakan, maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan, dapat menggunakan bahan pakan lokal maupun *biomassa* ikutan dari hasil tanaman yang ada di sekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian, dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan Kesehatan Hewan dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Mendukung Kesehatan Masyarakat

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, disamping itu juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penguatan kesehatan hewan adalah pengembangan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian melalui pencegahan penyakit *zoonosis* serta bagian dari kesehatan lingkungan melalui kelestarian hewan dan lingkungannya.

Untuk mencapai produktivitas ternak secara optimal hanya dapat terpenuhi jika status dan kondisi kesehatan hewan dalam keadaan yang baik. Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktivitas ternak serta kinerjanya.

Di sisi lain, resistensi antimikroba saat ini berkembang menjadi isu global yang dibahas dalam berbagai forum internasional, dan dipandang sebagai salah satu ancaman yang serius untuk ditangani bersama. Untuk mengoptimalkan dan mengurangi resistensi antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan,



maka penatagunaan antimikroba harus diterapkan untuk meningkatkan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan program terkoordinasi yang mempromosikan penggunaan antimikroba yang tepat dan sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, mengurangi resistansi mikroba dan mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba (termasuk antibiotik dan antiprotozoa).

4. Meningkatkan Keamanan dan Mutu Produk Hewan serta Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan, serta pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan Usaha Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Berdaya Saing

Potensi komoditas dan produk unggulan Subsektor Peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan merupakan kemampuan menghasilkan komoditas yang memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit pembiayaan usaha, asuransi ternak, pengembangan investasi, diseminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, pengembangan standar mutu dan penerapan tata cara pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi, serta pengembangan pasar domestik dan internasional).

6. Menerapkan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Ditjen PKH Profesional dan Modern

Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan Reformasi Birokrasi yang efektif dan



profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik dalam mewujudkan *good governance*.

Misi Ditjen PKH tersebut diatas sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan

Tujuan penting Program/Kegiatan Pembangunan Ditjen PKH periode 2020-2024 mencakup:

1. Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Peningkatan Produksi Ternak yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi, sehingga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus diwujudkan dengan baik. Upaya penyediaan benih/bibit ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan secara teknis maupun manajerial. Penerapan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) pada peternak/ kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, serta mendukung peningkatan daya saing ekspor.

2. Tersedianya Pakan Berkualitas dan Berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci sistem produksi yang efisien dan berdaya saing. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan lokal termasuk biomassa ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah, maupun antar negara harus selalu ditingkatkan. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan di suatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan,



bimbingan teknis, dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*, serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya Produk Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk di dalamnya praktek peternakan organik. Produk peternakan berdaya saing diperoleh dengan efisiensi produksi baik budidaya maupun pascapanen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi, serta kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk peternakan. Untuk itu, perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, aspek distribusi dan pemasaran memegang peran yang penting dalam peningkatan daya saing produk.

Selain untuk memenuhi pasar domestik dengan penyediaan produk peternakan yang berkualitas dan terjangkau dari aspek harga maupun ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ekspor juga merupakan prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan produk berdaya saing sesuai kebutuhan pasar internasional, dan didukung dengan pengembangan pemasaran dan kerja sama internasional.

Beberapa upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar, pelayanan informasi pasar, serta peningkatan efisiensi produksi dengan fasilitasi pembiayaan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Upaya mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, terdapat perbaikan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut aspek manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan.



Tujuan dan indikatornya merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. Penjabaran tujuan dan indikator tujuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PKH

Visi	Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	
Terwujudnya Produk Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1.	Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan	1.	Tersedianya benih/bibit ternak berkualitas dan berkesinambungan	1.	a. Jumlah benih/bibit ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat) Jumlah produksi ternak (ekor)
	2.	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan pakan secara berkelanjutan	2.	Tersedianya pakan berkualitas, aman, dan berkelanjutan	2.	Indeks ketersediaan pakan berkualitas dan aman (indeks)
	3.	Menyelenggarakan kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat	3.	Meningkatnya kesehatan hewan	3.	Status Kesehatan Hewan (%)
	4.	Menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan daya saing produk hewan dan kesehatan masyarakat	4.	Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Nasional	4.	Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Unit Usaha)
					5.	Jumlah produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sertifikat Veteriner)
					6.	Jumlah maksimal kasus <i>zoonosis</i> yang terjadi penularan dari hewan ke manusia (kasus)



Visi	Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	
	5.	Meningkatkan pengolahan, dan pemasaran produk peternakan berdaya saing	5.	Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	7.	Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
					8.	Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif
	6.	Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional	6.	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai roadmap RB Kementerian Pertanian	9.	Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (indeks)

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II)

Sasaran

Ditjen PKH berdasarkan tugas dan kewenangannya memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui 3 (tiga) program dari 5 (lima) program Kementerian Pertanian. Sasaran Strategis (SS) tersebut yaitu:

- i) SS 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
- ii) SS 2 : Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
- iii) SS 6 : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel.

Program

Ditjen PKH awalnya memiliki program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, setelah adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Ditjen PKH mendapat mandat 3 (tiga) program. Adapun berbagai program dan sasaran program tersebut adalah:

A. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Sasaran Program:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.



2. Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

Kinerja keamanan pangan diukur berdasarkan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya persentase keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

3. Termanfaatkannya Sarana Pertanian sesuai dengan Kebutuhan

Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

4. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

5. Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis

Indikator kinerja sasaran program ini adalah Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

B. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan Sasaran Program:

1. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah sektor pertanian terbesar ada pada agroindustri. Menciptakan nilai tambah dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi. Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.



C. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program:

1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen PKH yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai PMPRB Ditjen PKH. Pencapaian nilai RB dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian.

2. Terkelolanya Anggaran Ditjen PKH yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Ditjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementerian Pertanian.

Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan Ditjen PKH diarahkan mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Peternakan yang Sesuai dengan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP)

GBP dan GFP adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. GBP dan GFP meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.



2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.
- b. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

3. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan *higiene* dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PKH dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya



manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen PKH dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen PKH

Indikator Kinerja Program merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Ditjen PKH dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) sesuai dokumen Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja yang ingin dicapai Ditjen PKH dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Ditjen PKH 2020-2024 Revisi II disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Ditjen PKH Tahun 2021-2024

Program	Sasaran Program		Indikator		Satuan	Target			
						2021	2022	2023	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	SP 1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,85	1,20	1,24	1,28
			2	Peningkatan produksi susu	%	0,55	0,61	0,71	0,85
			3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16	2,16	2,16
	SP 2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	85,20	85,50	85,70	86,00
	SP 3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase wilayah yang terkendali <i>zoonosis</i>	%	74,00	74,50	75,00	76,00
	SP 4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali	6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,50	80,50	81,00	81,00



Program	Sasaran Program		Indikator		Satuan	Target			
						2021	2022	2023	2024
		dari penyakit hewan menular strategis							
	SP 5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat pemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan	%	91,25	92,25	93,50	94,50
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	SP 6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat pemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	87,00	90,00	92,00	95,00
	SP 7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15,00	20,00	25,00	30,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	SP 8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,50	34,00	35,50
	SP 9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II)

Pada Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 (Revisi II), target indikator kinerja tahun 2024 untuk Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebesar 1,28%; Peningkatan Produksi Susu sebesar 0,85%; Peningkatan Produksi Telur sebesar 2,16%; Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 86,00%; Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis sebesar 81,00%; Tingkat Pemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 94,50%; Tingkat Pemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebesar



95,00% serta Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 30,00%.

Sementara itu, target indikator kinerja tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja (PK) Dirjen PKH untuk Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebesar 2,86%; Peningkatan Produksi Susu sebesar 1,25%; Peningkatan Produksi Telur sebesar 1,51%; Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 91,94%; Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis sebesar 80,50%; Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 100,00%; Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebesar 100,00% serta Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 1,00%. Selanjutnya, untuk indikator kinerja Nilai PMPRB Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2024 berubah menjadi Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lampiran 4).

Perbedaan target kinerja dan indikator kinerja antara Renstra Ditjen PKH 2020-2024 (Revisi II) dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 disebabkan adanya penyesuaian besaran target indikator kinerja dan perubahan nomenklatur indikator kinerja program dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, usulan penyelarasan target kinerja dan indikator kinerja pada PK tersebut yang akan dicantumkan pada Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Revisi III belum dapat diakomodir oleh Bappenas (Lampiran 5).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan implementasi atas amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan berjangka waktu



tertentu (*time based*). Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan pada bulan Desember 2023, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PKH T.A. 2024 disahkan. Seiring berjalannya waktu, selama tahun 2024 Ditjen PKH melakukan 4 (empat) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu:

- a. Revisi I pada bulan Januari 2024 dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran program “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima” yang semula “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” menjadi “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” dan “Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas” yang semula “Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” menjadi “Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” serta adanya perubahan pagu anggaran karena adanya relokasi anggaran untuk peningkatan produksi padi dan jagung.
- b. Revisi II pada bulan Agustus 2024 dikarenakan adanya perubahan target indikator kinerja “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” yang semula 80% menjadi 76,91% dan “Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” yang semula 87,30 Nilai menjadi 89,20 Nilai serta adanya perubahan pejabat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 685/KPTS/KP.230/M/11/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian
- c. Revisi III pada bulan Oktober 2024 dikarenakan adanya perubahan target indikator “Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan” yang semula 86,00% menjadi 91,94% sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa target kinerja tahun berjalan untuk disesuaikan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan “Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan” yang semula 3% menjadi 1% sesuai dengan hasil monitoring capaian kinerja bahwa realisasi Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan bulan Agustus 2024 (Angka Sementara) sebesar -1,18% serta adanya perubahan pagu anggaran.
- d. Revisi IV pada bulan Desember 2024 dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran. Dokumen rincian perubahan tersaji pada Lampiran 3.

Target kinerja Ditjen PKH yang termuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi IV disajikan pada Tabel 3.



Tabel 3 Target Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2024
SP 1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	2,86
		2	Peningkatan Produksi Susu	%	1,25
		3	Peningkatan Produksi Telur	%	1,51
SP 2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	91,94
SP 3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	%	76,00
SP 4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50
SP 5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	100,00
SP 6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	100,00
SP 7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	1,00
SP 8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	76,91
SP 9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	89,20

Sumber: Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2024 (Revisi IV)

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3, Ditjen PKH menjabarkannya pada Rincian Output (RO) yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi dengan besaran anggaran per 31 Desember 2024 tercantum pada Tabel 4.



Tabel 4 Rincian Output (RO) Ditjen PKH T.A. 2024

No	Rincian Output (RO)	Pagu Awal	Blokir	Pagu Non Blokir
1	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	1.237.704.000	-	1.237.704.000
2	1783.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	762.296.000	-	762.296.000
3	1783.QJA.001 Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	982.615.000	-	982.615.000
4	1783.RAG.003 Hijauan Pakan Ternak	5.683.327.000	-	5.683.327.000
5	1783.RAG.004 Pakan Olahan dan Bahan Pakan	24.403.384.000	-	24.403.384.000
6	1783.RBK.002 SBSN Prasarana Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Bekasi	22.138.606.000	-	22.138.606.000
7	1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	1.500.000.000	-	1.500.000.000
8	1784.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	3.188.074.000	130.614.000	3.057.460.000
9	1784.QAH.001 Layanan Kesehatan Hewan	113.388.900.000	-	113.388.900.000
10	1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan	2.311.485.000	-	2.311.485.000
11	1784.QJC.001 Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi	11.660.930.000	246.583.000	11.414.347.000
12	1784.RAG.001 Sarana Bidang Kesehatan Hewan	10.425.500.000	-	10.425.500.000
13	1784.RAG.003 Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi	9.492.222.000	-	9.492.222.000
14	1784.RAG.004 SBSN Sarana Laboratorium Pengujian Produk Hewan dan Biomolekuler di Sumatera Bagian Utara	32.958.663.000	20.240.000	32.938.423.000
15	1784.RAG.005 SBSN Sarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia	7.330.043.000	-	7.330.043.000
16	1784.RAG.006 SBSN Sarana Laboratorium Emerging Diseases di Kalimantan	12.647.103.000	-	12.647.103.000
17	1784.RBK.004 SBSN Prasarana Laboratorium Pengujian Produk Hewan dan Biomolekuler di Sumatera Bagian Utara	38.019.337.000	18.560.000	38.000.777.000
18	1784.RBK.005 SBSN Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia	20.991.720.000	-	20.991.720.000
19	1784.RBK.006 SBSN Prasarana Laboratorium Emerging Diseases di Kalimantan	39.352.897.000	-	39.352.897.000



No	Rincian Output (RO)	Pagu Awal	Blokir	Pagu Non Blokir
20	1784.RBK.100 Prasarana Bidang Kesehatan Hewan	5.130.386.000	-	5.130.386.000
21	1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	932.000.000	-	932.000.000
22	1785.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	1.068.000.000	-	1.068.000.000
23	1785.PDA.001 Benih Ternak Unggul	47.351.731.000	-	47.351.731.000
24	1785.PDA.002 Bibit Ternak Unggul	17.640.173.000	36.821.000	17.603.352.000
25	1785.QAH.001 Layanan Optimalisasi Reproduksi	35.630.746.000	49.315.000	35.581.431.000
26	1785.QEL.003 Ternak Ruminansia Potong	2.240.000.000	-	2.240.000.000
27	1785.QEL.004 Ternak Unggas	677.146.000	-	677.146.000
28	1785.QEL.006 Ternak Unggas (MP FE)	1.128.000.000	-	1.128.000.000
29	1785.RAG.001 Sarana Perbibitan Ternak	3.126.716.000	100.000.000	3.026.716.000
30	1785.RAG.005 SBSN Sarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia	6.499.855.000	-	6.499.855.000
31	1785.RAG.006 Ternak Yang Didata dan Ditandai	20.000.000.000	-	20.000.000.000
32	1785.RBK.001 Prasarana Perbibitan Ternak	2.389.980.000	-	2.389.980.000
33	1785.RBK.005 SBSN Prasarana Breeding Center Sapi Potong Indonesia	56.500.145.000	-	56.500.145.000
34	1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.500.000.000	-	1.500.000.000
35	1786.AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.500.000.000	-	1.500.000.000
36	1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	656.771.000	-	656.771.000
37	1786.RAG.001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	587.839.000	-	587.839.000
38	1787.EBA.956 Layanan BMN	3.691.537.000	1.521.260.000	2.170.277.000
39	1787.EBA.957 Layanan Hukum	3.231.363.000	700.000.000	2.531.363.000
40	1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.880.744.000	750.000.000	2.130.744.000
41	1787.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.038.987.000	700.000.000	2.338.987.000
42	1787.EBA.962 Layanan Umum	10.962.555.000	2.251.330.000	8.711.225.000



No	Rincian Output (RO)	Pagu Awal	Blokir	Pagu Non Blokir
43	1787.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.473.446.000	1.132.794.000	3.340.652.000
44	1787.EBA.994 Layanan Perkantoran	350.654.173.000	-	350.654.173.000
45	1787.EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.386.000.000	-	1.386.000.000
46	1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18.825.453.000	9.352.958.000	9.472.495.000
47	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.137.262.000	1.280.683.000	1.856.579.000
48	1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	10.808.281.000	3.954.497.000	6.853.784.000
49	5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9.389.500.000	329.264.000	9.060.236.000
50	5891.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	900.000.000	127.920.000	772.080.000
51	5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	12.915.000.000	4.911.207.000	8.003.793.000
52	5891.RAG.001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	5.360.500.000	1.978.769.000	3.381.731.000
53	5891.RBK.001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	4.900.000.000	1.500.000.000	3.400.000.000
Jumlah		1.009.589.095.000	31.092.815.000	978.496.280.000

Sumber: <https://satudja.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 15 Januari 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kriteria Keberhasilan Kinerja



Capaian dan Analisis Kinerja Organisasi



Kinerja Lainnya



Akuntabilitas Kinerja Anggaran



Analisis Efisiensi Sumber Daya

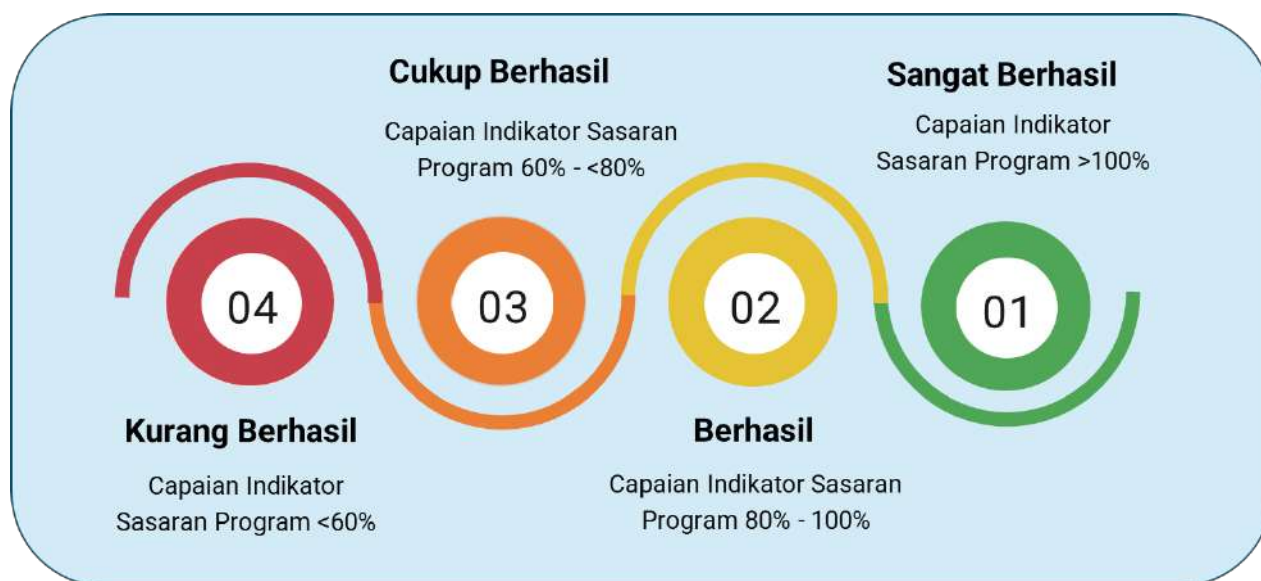




III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Kinerja Ditjen PKH tahun 2024 dinilai berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja yaitu membandingkan realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PKH. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui *scoring* dengan mengelompokkan capaian dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80%-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60%-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap Indikator Sasaran Program yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Ditjen PKH tahun 2024 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Program tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*:



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, serta terhadap target Kementerian Pertanian dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi target, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta upaya perbaikan pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.



3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024 memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yaitu: 1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Peningkatan Produksi Susu; (3) Peningkatan Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari *Zoonosis*; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Taggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; serta (11) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebelas indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis polarisasi *maximize target* yaitu apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target, nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian, capaian indikator kinerja dengan polarisasi *maiximize target* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan persentase capaian IKU

- Angka maksimum adalah 120.
- Angka minimum adalah 0.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja.

Pencapaian kinerja Ditjen PKH tahun 2024 selengkapnya disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Ditjen PKH Tahun 2024 sebesar **107,45 (Sangat Berhasil)**. Dari 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja program, 8 (delapan) indikator kinerja termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dan 3 (tiga) indikator kinerja termasuk dalam kategori Berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan wujud komitmen pimpinan serta jajaran Ditjen PKH dalam peningkatan kinerja yang dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Ditjen PKH tahun 2024.



Tabel 5 Capaian Indikator Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
SP 1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	2,86	2,80	97,90	Berhasil
		2	Peningkatan Produksi Susu	%	1,25	2,66	120,00	Sangat Berhasil
		3	Peningkatan Produksi Telur	%	1,51	4,42	120,00	Sangat Berhasil
SP 2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	91,94	92,53	100,64	Sangat Berhasil
SP 3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus <i>zoonosis</i>	5	Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	%	76,00	92,11	120,00	Sangat Berhasil
SP 4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis	%	80,50	80,62	100,15	Sangat Berhasil
SP 5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	100,00	99,05	99,05	Berhasil
SP 6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	100,00	100,00	100,00	Berhasil
SP 7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	1,00	1,21	120,00	Sangat Berhasil
SP 8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan	%	76,91	78,87	102,55	Sangat Berhasil



Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
			Kesehatan Hewan					
SP 9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	1 1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	89,20	90,67	101,65	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen PKH, 2025, data diolah.

Capaian indikator kinerja yang termasuk kategori **Sangat Berhasil** yaitu (1) Peningkatan Produksi Susu; (2) Peningkatan Produksi Telur; (3) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis*; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (6) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (8) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, capaian indikator kinerja yang termasuk kategori **Berhasil** yaitu (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Analisis capaian indikator kinerja setiap sasaran program adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 1 (SP1)

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN ASAL TERNAK

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan produksi daging sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Sasaran Strategis (SS) yaitu Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri melalui Subsektor Peternakan dengan target Indikator Program (ISP) adalah Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik).



SP1. IKU1 Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)	
Target 2,86%	Realisasi 2,80%
% Capaian 97,90% (Berhasil)	

Capaian indikator kinerja Peningkatan Produksi Daging merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) terhadap target tahun 2024.. Adapun cara perhitungan Pertumbuhan Produksi Daging adalah akumulasi produksi daging pada tahun berjalan (A^t) ($t=2024$) dikurangi akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$), dibagi dengan akumulasi produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci peningkatan produksi daging 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 6.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Capaian produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) tahun 2024 dalam bentuk *meatyield* sebesar 4.744,78 ribu ton. Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Daging sebesar 2,80%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 2,86%, maka capaian Peningkatan Produksi Daging sebesar 97,90% dengan kategori “**Berhasil**”. Selanjutnya Pertumbuhan Produksi Daging Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Produksi Daging Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
1	Sapi	378,25	339,75	365,51	374,43	461,30	478,85
2	Kerbau	18,57	13,88	14,19	16,54	16,16	17,39
3	Kambing	49,42	41,86	40,51	41,22	56,34	56,89
4	Domba	47,92	37,05	34,67	35,67	48,16	34,59
5	Babi	159,42	189,81	176,00	102,48	135,04	130,87
6	Ayam Buras	292,33	270,21	269,80	276,73	143,79	156,45
7	Ayam Ras Pedaging	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.668,88	3.721,64	3.835,92
8	Itik	39,81	35,75	41,02	44,65	33,03	33,82
Jumlah		4.480,80	4.147,43	4.127,40	4.560,59	4.615,46	4.744,78
Pertumbuhan Produksi Daging Komoditas Utama			-7,44%	-0,48%	10,50%	1,20%	2,80%

Sumber: Ditjen PKH, 2024

Keterangan: *) Angka Sementara (dalam *meatyield*, 000 ton)



Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa peningkatan produksi daging tahun 2023-2024 terjadi pada komoditas ternak sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik, sedangkan penurunan produksi daging terjadi pada komoditas ternak domba dan babi.

Peningkatan produksi daging untuk komoditas utama tersebut diiringi juga dengan terpenuhinya populasi ternak untuk komoditas utama yang dikembangkan yaitu sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7 Capaian "Terpenuhinya Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.545.110	2.472.154	Berhasil (97,13%)
Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	99.731	104.515	Sangat Berhasil (104,79%)
Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.620.863	4.171.957	Berhasil (90,28%)
Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.612.230	3.346.370	Berhasil (92,64%)
Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.530.545.184	3.572.911.726	Sangat Berhasil (101,19%)
Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	32.688.697	33.048.273	Sangat Berhasil (101,10%)
Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.299.389	2.322.383	Sangat Berhasil (101,00%)

Sumber: Buku Statistik Ditjen PKH, 2024 diolah Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Berdasarkan capaian pada Tabel 7, komoditas ternak yang capaian kinerjanya **Sangat Berhasil** yaitu Daging Kerbau, Ayam, Itik, dan Babi, sedangkan komoditas Sapi, Kambing dan Domba termasuk kategori **Berhasil**. Selanjutnya apabila dilihat dari data pemotongan 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023, komoditas yang mengalami peningkatan yaitu sapi potong, itik, dan ayam dengan jumlah pemotongan antara 0,50% – 5,31%, sedangkan untuk komoditas kerbau, kambing, domba, dan babi yang mengalami penurunan sebesar 0,83% - 12,44% sebagaimana tersaji pada Tabel 8.



Tabel 8 Jumlah Pemotongan Ternak 2023-2024

No	Komoditas	Jumlah Pemotongan (ekor)		%
		2023	2024	
1	Sapi	2.347.422	2.472.154	5,31
2	Kerbau	105.836	104.515	-1,25
3	Kambing	4.206.965	4.171.957	-0,83
4	Domba	3.683.219	3.346.370	-9,15
5	Ayam	3.532.119.615	3.572.911.726	1,15
6	Itik	33.030.234	33.048.273	0,05
7	Babi	2.318.252	2.029.864	-12,44

Sumber: Buku Statistik Ditjen PKH, 2024 diolah Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Ket: *Data Pemotongan Angka Tetap tahun 2023 dan Angka Sementara tahun 2024

Penurunan tingkat pemotongan ternak kambing dan domba di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kambing/domba untuk memenuhi keperluan keagamaan, seperti aqiqah dan Idul Adha. Menurut data pelaporan ASPAQIN (Asosiasi Pengusaha Aqiqah Indonesia), bahwa penjualan hewan kurban pada tahun 2024 di berbagai daerah mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2023, terutama kambing dan domba karena turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat kecenderungan pemotongan ternak domba untuk kebutuhan keagamaan sebagaimana tercantum pada Tabel 9, tidak hanya ternak jantan akan tetapi menyesuaikan dengan permintaan masyarakat terhadap ternak domba betina, yang berpengaruh terhadap penurunan populasi.

Tabel 9 Data Pemotongan Hewan Kurban Tahun 2023-2024

No	Komoditas	Jumlah Pemotongan Hewan Kurban (ekor)	
		2023	2024
1	Sapi	689.692	677.522
2	Kerbau	14.173	15.704
3	Kambing	895.709	819.118
4	Domba	434.421	356.849
Total		2.033.995	1.869.193

Sumber: Buku Statistik Ditjen PKH, 2024.

Selanjutnya, penurunan pemotongan dan produksi daging babi disebabkan karena adanya kendala dan permasalahan dalam pengembangan ternak babi antara lain:

1. Wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) di beberapa daerah sentra dan tidak tersediannya vaksin ASF di dalam negeri sehingga memerlukan waktu dalam penanganan penyakit.
2. Pembatasan lalu lintas ternak babi dan pemberhentian sementara ekspor babi ke beberapa negara konsumen reguler.



3. Belum adanya regulasi yang mengatur babi potong bakalan.
4. Kurangnya bibit babi berkualitas sehingga produktivitas tidak maksimal.
5. Faktor sosial budaya dan lingkungan dalam pengembangan babi

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Daging tahun 2024 adalah 2,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tercantum pada Tabel 10 cenderung fluktuatif. Produksi komoditas peternakan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan terhadap komoditas, demikian pula dengan komoditas daging. Menurunnya pertumbuhan produksi daging pada tahun 2020, diakibatkan menurunnya permintaan terhadap komoditas daging sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

Tabel 10 Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Daging Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	0,40	0,85	7,92	2,82	2,86
Realisasi ISP (%)	-7,44	-0,48	10,50	1,20	2,80
Capaian ISP (%)	0,00	0,00	120,00	42,55	97,90

Jika dibandingkan dengan capaian produksi daging tahun 2024 terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan, hal ini karena pandemi berangsur pulih, sehingga kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai normal (tidak dalam kondisi pandemi *Covid-19*), sehingga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap kebutuhan komoditas daging. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat, industri makanan, Horeka (Hotel, Restoran dan Katering), penjual makanan dan minuman semakin membaik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Daging dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target ISP (%)	0,40	0,85	1,20	1,24	1,28	218,90
Realisasi ISP (%)	-7,44	-0,48	10,50	1,20	2,80	



Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik) tahun 2024 sebesar 2,80%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Ditjen PKH 2020-2024 (Revisi II) sebesar 1,28%, maka **sangat berhasil** mencapai sebesar 218,90%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi kinerja peningkatan produksi daging tahun 2024 Ditjen PKH tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat pada target indikator kinerja Kementerian Pertanian.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2020-2024 dalam Kegiatan Prioritas 2, yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Laut Secara Berkelanjutan, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan peningkatan produksi daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Target produksi daging nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024) adalah sebesar 4,90 juta ton. Capaian produksi daging tahun 2024 (Angka Sementara dalam *meatyield*) adalah sebesar 4,74 juta ton, sehingga apabila dibandingkan dengan target produksi daging RPJMN 2020-2024, maka **berhasil** mencapai sebesar 96,73%.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2024, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mendukung peningkatan produksi daging. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Optimalisasi Reproduksi selama 2020-2023 telah mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 9.108.215 ekor yang berpengaruh terhadap peningkatan populasi ternak di dalam negeri.
2. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 15 unit usaha peternakan baru, sehingga pada berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pada periode 2020-2024 terdapat 53 unit usaha peternakan baru. Pertumbuhan unit usaha ini disebabkan adanya penguatan kelembagaan dan pembinaan dan koordinasi kemitraan usaha peternakan. Lima belas (15) unit usaha peternakan baru dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan perusahaan dibidang usaha peternakan ayam petelur 6 (enam), ayam pedaging 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit sapi potong, 2 (dua) unit sapi perah, 2 (dua) unit sarang burung wallet dan 1 (satu) unit itik. Sedangkan untuk pelaku usaha yang dibina pada tahun 2024 terdapat sejumlah 165 pelaku usaha.



Tabel 12 Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,88	3,1	2,59	2,91	3,64	3,64	4,26	4,26	5,14	5,14
a	Jumlah usaha bidang peternakan yang berkembang	Unit	270	270	275	275	282	282	292	292	180	180
b	Jumlah unit usaha peternakan baru	Unit	5	8	7	8	10	10	12	12	15	15
c	Jumlah usaha bidang peternakan yang dibina	Unit	270	270	275	275	282	282	292	292	165	165

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, data diolah, 2024

- Pengembangan ternak tahun 2024, yaitu pengadaan kambing/domba sebanyak 800 ekor, ayam lokal sebanyak 4.000 ekor dan itik 6.000 ekor.
- Fasilitasi tata niaga ternak dan hasil ternak yang dilaksanakan baik dengan menyelenggarakan pertemuan di pusat, maupun menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Kapal khusus angkutan ternak merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Jumlah muatan kapal ternak tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebanyak 44.300 ekor dengan *loading factor* 87%. Realisasi muatan ternak menggunakan kapal ternak pada tahun 2024 meningkat 18% jika dibandingkan dengan realisasi muatan tahun 2023.
- Fasilitasi Bank Pakan berupa Unit Pengolahan Pakan Ruminansia, Unggas, dan Babi sebanyak 460 unit di 142 kabupaten dan 28 provinsi dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024.
- Fasilitasi layanan kesehatan hewan dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dengan jumlah lokus penerima 719 Puskesmas di 29 provinsi, 150 kabupaten.
- Fasilitasi renovasi RPHR dan penyediaan peralatan pendukungnya sebanyak 53 unit di 53 kabupaten dan RPHU sebanyak 5 unit di 5 kabupaten melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait ketersediaan daging sapi/kerbau, Ditjen PKH terus melakukan terobosan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau, antara lain:

- Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- Peningkatan kapasitas petugas dan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan pelaksanaan *refresher* Inseminasi Buatan sapi/kerbau.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:

- Berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan melakukan pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*Closed Loop*).



2. Koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi peternak kambing/domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan dengan peternak.
3. Peningkatan sumber daya manusia peternak dalam penerapan teknologi untuk produksi dan produktivitas ternak kambing/domba melalui pelatihan Inseminasi Buatan kambing/domba.

Upaya yang dilakukan Ditjen PKH terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
2. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan investasi di industri hilir.
3. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
4. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam ras melalui sertifikasi *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP).
5. Melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dalam rangka menjaga keseimbangan dan stabilitas *supply-demand* ayam ras pedaging nasional.
6. Intervensi penetapan alokasi *Grand Parentt Stocks* (GPS) tahun 2024 untuk menghasilkan *Day Old Chick* (DOC) *Final Stock* (FS) dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging ayam nasional.
7. Himbauan kepada para pelaku usaha pembibit ayam ras untuk mengalokasikan DOC FS minimum 50% bagi peternak mandiri, koperasi atau peternak lainnya, serta maksimal 50% dialokasikan untuk internal perusahaan dan kemitraan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging babi dengan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak babi dengan pelaksanaan pelatihan Inseminasi Buatan babi. Selain itu, pada tahun 2024 pemerintah beserta perangkat daerah melakukan perbaikan dalam pengelolaan manajemen ternak babi dalam mengatasi penyakit ASF melalui pendekatan antara lain:

1. Penyusunan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) pada babi.
2. Peningkatan penerapan standar biosekuriti yang ketat di peternakan.
3. Vaksinasi dan edukasi kepada peternak tentang pencegahan penyakit.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja Produksi Daging ditunjang oleh beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH antara lain:

1. **Peningkatan Kelahiran Ternak melalui Kegiatan Optimalisasi Reproduksi**
Optimalisasi Reproduksi selama 2020-2023 mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 9.108.215 ekor.



2. Aspek Pembiayaan (Realisasi Pemberian Kredit Pembibitan dan Penggemukan)

Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka biaya produksi per satuan produk lebih rendah sehingga daya saing usaha meningkat. Fasilitas pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN.

Realisasi KUR pada tahun 2024 khusus untuk subsektor peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar Rp14,45 triliun untuk 321.098 debitur atau tercapai 64,36% dari target penyaluran Kementerian Pertanian sebesar Rp24,00 triliun. Selain untuk usaha peternakan dimaksud, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*mix-farming*) dengan minimal 60% dari akad kredit dimanfaatkan untuk usaha peternakan) sebesar Rp8,81 triliun untuk 219.871 debitur, sehingga total KUR untuk usaha peternakan sebesar Rp24,36 triliun untuk 540.969 debitur.

Tabel 13 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Peternakan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi KUR (Triliun)	13,75	21,12	28,60	20,76	24,36
1. Peternakan	10,63	15,54	19,22	14,59	15,45
2. Kombinasi Pertanian/ Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	3,12	5,58	9,38	6,16	8,81
Debitur	497.353	462.346	484.223	478.429	540.969

Sumber: SIKP dan SAKURA, Kementerian Pertanian, 2024

Realisasi KUR subsektor peternakan didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba dan pembibitan dan budidaya unggas. Secara rinci nilai dan jumlah debitur KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2024

NO	SEKTOR	TARGET (Rp Triliun)	REALISASI (Rp)	%	JUMLAH DEBITUR
----	--------	---------------------------	----------------	---	-------------------



1	Tanaman Pangan	28,00	20.226.998.318.935	72,24	468.697
2	Hortikultura	15,00	8.567.471.775.228	57,12	193.405
3	Perkebunan	33,00	37.010.660.165.609	112,15	567.425
4	Peternakan	24,00	15.445.865.643.189	64,36	321.098
5	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	-	8.910.934.054.100	0,00	219.871
6	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Perkebunan	-	1.019.812.185.180	0,00	22.083
Jumlah		100	91.181.742.142.241	91,18	1.792.579

Sumber: SIKP dan SAKURA, Kementerian Pertanian, 2024

3. Investasi Bidang Usaha Peternakan

Realisasi investasi total PMA dan PMDN subsektor peternakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (data sampai dengan September 2024) berdasarkan dari data realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diolah oleh Ditjen PKH mencapai 23,82 Juta US\$ untuk PMA dan Rp4,34 triliun untuk PMDN. Secara rinci perkembangan realisasi PMA dan PMDN subsektor peternakan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Perkembangan Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2023*	2024*
PMA (US\$ Juta)	44,44	28,56	43,71	48,69	20,69	23,82
PMDN (Rp Trilyun)	2,28	2,14	3,91	3,49	2,71	4,35

Sumber : BKPM, diolah Direktorat PPHNak, 2024

Sejak bulan September 2023, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi/BKPM telah menyepakati kebijakan data satu pintu data investasi. Untuk data investasi pertanian termasuk di dalamnya subsektor peternakan akan disampaikan melalui Pusat Data Informasi Kementerian Pertanian. Realisasi investasi subsektor peternakan sampai dengan triwulan III tahun 2024 mengalami kenaikan untuk PMDN sebesar 115,13 % dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023, sementara untuk PMA untuk periode yang sama mengalami penurunan mencapai 160,53 %.



Nilai investasi subsektor peternakan masih didominasi dari komoditas peternakan unggas baik PMA dan PMDN, namun demikian dari total investasi subsektor peternakan didominasi oleh Jasa Penunjang dan Tanaman Pakan, kemudian urutan kedua investasi PMA, yaitu peternakan walet, sedangkan urutan kedua investasi PMDN untuk aneka ternak lainnya. Secara rinci nilai total investasi PMA dan PMDN untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2024

No	Keterangan	PMA (dalam US\$ ribu)	PMDN (dalam Rp Juta)	Total PMA dan PMDN (dalam Rp Juta)
1	Peternakan Babi	0,7	359	370
2	Peternakan Domba Dan Kambing	7,1	14.640,3	14.745,8
3	Peternakan Sapi Dan Kerbau	397	486.242,1	492.197,5
4	Peternakan Unggas	6.967,3	842.754,2	947.563,5
5	Peternakan Walet	498,2	1.999,4	9.471,1
6	Aneka Ternak Lainnya	19,1	16.095,5	16.383,9
7	Jasa Penunjang Dan Tanaman Pakan	4.456,5	1.068.107,4	1.134.946,7
Jumlah		12.365,9	2.430.197,9	2.615.678,4

*) Data sampai dengan tanggal 30 September 2024

Sumber : BKPM, diolah Direktorat PPHNak, 2024

4. Penguatan Kelembagaan

Korporasi merupakan manajemen pengelolaan berorientasi bisnis dari hulu sampai hilir, berada dalam wadah ekonomi peternak yang berbadan hukum (koperasi atau Perseroan Terbatas), dengan basis lokasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian. Pengelolaan usaha peternakan berbasis kawasan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu sampai hilir dalam suatu sistem usaha tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, teknis, ekonomi dan ekologi/lingkungan, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang *feasible*, *bankable* dan berdaya saing.

Pengembangan kawasan korporasi peternakan pada tahun 2024 dialokasikan di 18 (delapan belas) kawasan di 12 (lima belas) provinsi, yaitu Aceh (Aceh Besar), Sumatera Selatan (Banyuasin), Sumatera Barat (Solok Selatan), Bengkulu



(Bengkulu Utara), Lampung (Lampung Selatan), Jawa Barat (Subang dan Cianjur), Jawa Timur (Probolinggo dan Kediri), Jawa Tengah (Banyumas dan Boyolali), Sulawesi Selatan (Gowa dan Sidrap), Sulawesi Tengah (Morowali), Kalimantan Timur (Penanjam Pasar Utara), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sumbawa).

Output dari aspek kelembagaan korporasi peternak untuk kegiatan pengembangan kawasan berbasis peternak adalah terbentuknya kelembagaan korporasi peternak yang berbadan hukum, sampai bulan September 2024 dari 18 lokasi kawasan telah terbentuk kelembagaan berupa 2 (dua) Perseroan Terbatas dan 16 (enam belas) koperasi sebagaimana Tabel 17.

Tabel 17 Kelembagaan Korporasi Peternak Tahun 2024

No	Provinsi	Kabupaten	Kelembagaan
1	Jawa Barat	1. Subang	PT. Brahman Gemilang Sejahtera
		2. Cianjur	Koperasi Produsen Sapi Mekar Surya Kencana
2	Bengkulu	3. Bengkulu Utara	Koperasi Sinar Usaha Tani Mulya
3	Lampung	4. Lampung Selatan	KPT Maju Bersama
4	Jawa Tengah	5. Banyumas	Koperasi Satria Lestari
		6. Boyolali	Koperasi Produksi Lembu Subur Rukun Tentrem
5	Jawa Timur	7. Probolinggo	Koperasi Langgeng Basuki
		8. Kediri	Koperasi Produsen Narendra Panca Sotya Abadi
6	NTB	9. Lombok Tengah	Koperasi Syariah Mandalika Baren Sampi
		10. Lombok Timur	Koperasi Ridho Illahi
		11. Sumbawa	Koperasi Labangka Gemilang Mandiri
7	Sulawesi Selatan	12. Gowa	PT. Bumi Berjaya Agriculture
		13. Sidrap	Koperasi Panca Ternak Sejahtera
8	Sumatera Barat	14. Solok Selatan	Koperasi Produsen Sangir Serumpun Sejahtera
9	Aceh	15. Aceh Besar	Koperasi Sapi Panca Montera
10	Kalimantan Timur	16. PPU	Koperasi Babulu Brahman Sejahtera
11	Sulawesi Tengah	17. Morowali	Koperasi Pemasaran Brahman Jaya Morowali
12	Sumatera Selatan	18. Banyuasin	Koperasi Produsen Dekopi Aka Jaya

Sumber : Direktorat PPHNak, 2024



5. Penguatan Sistem Logistik

Pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) kapal khusus angkutan ternak yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari daerah produsen ternak ke daerah konsumen. Ditjen PKH berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran tata niaga ternak melalui pemanfaatan kapal ternak dan optimalisasi muatan pada trayek kapal ternak. Jumlah muatan kapal ternak tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebanyak 44.300 ekor dengan *loading factor* 87%. Realisasi muatan ternak menggunakan kapal ternak pada tahun 2024 meningkat 18% jika dibandingkan dengan realisasi muatan tahun 2023. Jumlah muatan tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan yang sejalan dengan penambahan jumlah armada kapal, kecuali: tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19* dan tahun 2022 karena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta tahun 2023 terdapat *docking* 3 (tiga) armada pada bulan Maret 2023.

Grafik 3 Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2020-2024



Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2024

6. Regulasi

Pada tahun 2024 Ditjen PKH menyusun regulasi untuk peningkatan produksi daging dan susu diantaranya:

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di



Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan.

- c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/Kpts/OT.050/M/05/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Periode 2022-2027.
- d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6887/KPTS/KP.230/F/06/2024 tentang Rencana Produksi Nasional Bibit Ayam Ras Pedaging dan Petelur Tahun 2024.
- e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 00002/KPTS/HK.150/F/03/2024 tentang Penetapan Peternak Mandiri Penerima Cadangan Jagung Pemerintah.
- f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/KPTS/PK.030/M/07/2024 tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Domba Awassi.
- g. Keputusan Menteri Pertanian 282/KPTS/PK.030/M/07/2024 tentang Penetapan Rumpun Sapi Rambon Banyuwangi.
- h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan PMK.
- i. Keputusan Dirjen PKH Nomor 22052/PK.320/F/03/2024 tentang Penanggung Jawab Lokasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun Anggaran 2024.
- j. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- k. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah yang Baik. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat, serta penyesuaian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Rancangan Permentan ini mendukung program Presiden terpilih yakni Makan Bergizi sehingga penyusunan Rancangan Permentan ini sangat penting dalam mewujudkan peningkatan gizi masyarakat. Rancangan Permentan ini sudah melalui beberapa tahap pembahasan dalam triwulan III tahun 2024, Rancangan Permentan ini sudah memasuki tahapan *public hearing* dalam rangka menjaring masukan dari para pihak terkait.
- l. Dalam tahapan penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Untuk selanjutnya diterbitkan Berita Acara (BA) oleh Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, juga telah



selesai dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 26 September 2024.

m. Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Produksi Daging dan Susu Nasional dengan *outline* sebagai berikut:

- 1) Strategi percepatan swasembada susu dan daging nasional.
- 2) Penyelenggaraan swasembada susu dan daging nasional.
- 3) Penyerapan susu segar dalam negeri.

7. Penyediaan Pakan Ternak

Dalam mendukung pencapaian produksi daging sapi, pada tahun 2024 telah dilakukan penyediaan Hijauan Pakan Ternak di satker UPT Pusat dengan total 972,3 Ha sebagaimana tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18 Capaian Hijauan Pakan Ternak Tahun 2024

SATKER	TARGET	REALISASI	%
UPT Pusat	968,8 Ha	972,3 Ha	100,3
Total	968,8 Ha	972,3 Ha	100,3

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2024

Kegiatan pengembangan HPT di UPT Pusat dilaksanakan untuk pengembangan atau pemeliharaan kebun HPT maupun padang penggembalaan yang dialokasikan pada anggaran Kantor Daerah di 10 (sepuluh) UPT Pusat, yaitu 7 (tujuh) Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU/BPTU-HPT), 2 (dua) Balai Inseminasi Buatan (BBIB/BIB) dan 1 (satu) Balai Embrio Transfer (BET), seluas 968,8 Ha. Rincian capaian kegiatan untuk masing-masing lokasi pengembangan HPT di UPT Pusat disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Capaian Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di UPT Tahun 2024

No	UPT	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
1	BIB Lembang	22,3	22,3	100,0
2	BET Cipelang	20,0	20,0	100,0
3	BBPTU HPT Baturaden	195,5	195,5	100,0
4	BBIB Singosari	35,0	38,5	110,0
5	BPTU HPT Indrapuri	126,0	126,0	100,0
6	BPTU HPT Siborong-Borong	94,0	94,0	100,0
7	BPTU HPT Padang Mangatas	100,0	100,0	100,0
8	BPTU HPT Sembawa	193,0	193,0	100,0



No	UPT	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
9	BPTU HPT Pelaihari	64,0	64,0	100,0
10	BPTU HPT Denpasar	119,0	119,0	100,0
Total		968,8	972,3	110,0

Sumber: Direktorat Pakan, Ditjen PKH, 2024

Selain itu, dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pakan, maka pada tahun 2024 juga telah difasilitasi pengujian untuk 2.432 sampel produk pakan, baik yang dilakukan melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi dan laboratorium pakan daerah.

Pada tahun 2024 juga dialokasikan pengembangan Bank Pakan melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk 460 unit Bank Pakan yang tersebar di 29 provinsi. Pengembangan Bank Pakan melalui dana DAK terdiri dari menu rincian Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Babi, Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Unggas, Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Ruminansia dan Pembangunan Olahan Pakan Silase. Fasilitas Bank Pakan di tingkat kelompok diharapkan dapat memenuhi ketersediaan pakan di daerah, dengan penerapan teknologi pengolahan dan pengawetan pakan, serta pemanfaatan bahan pakan lokal.

8. Pengendalian Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

- Peningkatan kapasitas peralatan maupun SDM laboratorium veteriner.
- Penguatan Puskesmas dengan memfasilitasi ketersediaan obat-obatan dan sarana lainnya di lokasi kegiatan prioritas.
- Penempatan Tenaga Harian Lepas sebanyak 519 orang pada tahun 2024 yang terdiri dari 243 orang Dokter Hewan dan 276 orang Paramedik Veteriner untuk membantu dinas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit. Pada bulan Oktober 2024 karena adanya penerimaan CPNS dan PPPK, jumlah Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berkurang menjadi 431 orang yang terdiri dari 187 orang Dokter Hewan dan 244 orang Paramedik Veteriner.
- Kegiatan kompartementalisasi unit-unit usaha peternakan sehingga terjamin kesehatan unit usaha tersebut dari penyakit tertentu.

9. Penjaminan Produk Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Bagi yang Dipersyaratkan

- Sosialisasi dan pembinaan intensif dan berkelanjutan tentang penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan serta mendorong pelaku usaha produsen daging untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya. Tahun 2024 jumlah unit usaha produk hewan yang telah bersertifikat NKV sebanyak 1.137 sertifikat.



- b. Meningkatkan jumlah SDM Kesmavet (Auditor NKV, Pengawas Kesmavet, Petugas Pemeriksa *Antemortem-Postmortem*, serta Petugas Kesejahteraan Hewan) dan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam upaya penjaminan keamanan produk hewan.
- c. Peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet di UPT Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan agar penyediaan daging bagi masyarakat memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi yang dipersyaratkan.
- e. Renovasi Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R) beserta peralatan pendukungnya sebanyak 53 unit dan Renovasi Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPH-U) beserta peralatan pendukungnya sebanyak 5 unit melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Flsik.

SP1. IKU2	
Peningkatan Produksi Susu	
Target 1,25%	Realisasi 2,66%
% Capaian 120,00% (Sangat Berhasil)	

Capaian indikator kinerja Peningkatan Produksi Susu merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi susu terhadap target tahun 2024.

Cara perhitungan Peningkatan Produksi Susu adalah produksi susu pada tahun berjalan (A^t) ($t=2024$) dikurangi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$), dibagi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi susu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 6.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Capaian Produksi Susu tahun 2024 (Angka Sementara) sebesar 808,35 ribu ton. Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Susu pada tahun 2024 mencapai 2,66% dari target 1,25%, atau setara dengan 120,00% yang termasuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**” dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023



Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2024 sebesar 2,66%, sedangkan realisasi kinerja Peningkatan Produksi Susu tahun 2023 sebesar -4,48%; realisasi tahun 2022 sebesar -12,90%; realisasi tahun 2021 sebesar -0,06% dan realisasi tahun 2020 sebesar 0,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2024 **“sangat berhasil”** atau mengalami peningkatan sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 20 Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Susu Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	2,50	0,55	0,61	1,25	1,25
Realisasi ISP (%)	0,25	- 0,06	- 12,90	- 4,48	2,66
Capaian ISP (%)	10,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Pertumbuhan produksi susu yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020, produksi susu tumbuh positif sebesar 0,25% disebabkan oleh permintaan susu yang cenderung meningkat sebagai penambah daya tahan tubuh selama pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2022-2023, produksi susu menurun cukup besar karena kematian dan penurunan produktivitas sapi perah akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Peningkatan Produksi Susu tahun 2024 sebesar 2,66%, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra (RPJMN) tahun 2024 sebesar 0,85%, maka dapat disimpulkan **sangat berhasil** dengan capaian sebesar 312,94%.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Susu dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target ISP (%)	2,50	0,55	0,61	0,71	0,85	312,94
Realisasi ISP (%)	0,25	0,06	12,90	4,48	2,66	



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi kinerja peningkatan produksi susu tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama target Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Jumlah produksi susu ternak perah pada tahun 2024 dipengaruhi oleh jumlah sapi perah laktasi pada tahun berjalan dikalikan dengan produktivitas susu sapi perah rata-rata. Produksi susu dihitung melalui pertemuan verifikasi dan validasi data peternakan dan kesehatan hewan yang secara rutin dilakukan oleh Ditjen PKH dengan realisasi jumlah betina laktasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu pada tahun 2024 sebanyak 210.501 ekor atau **“berhasil”** mencapai 92,17% dari target 228.373 ekor.

Tabel 22 Capaian Kinerja "Meningkatnya Produksi Susu untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional" Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Produksi susu	Ton	844.923	808.352*	Berhasil (95,70%)
2	Jumlah betina laktasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor	228.373	210.501*	Berhasil (92,17%)
3	Jumlah bibit sapi perah sesuai kebutuhan produksi	Ekor	100	170	Sangat Berhasil (170,00%)

Keterangan: *) Angka Sementara

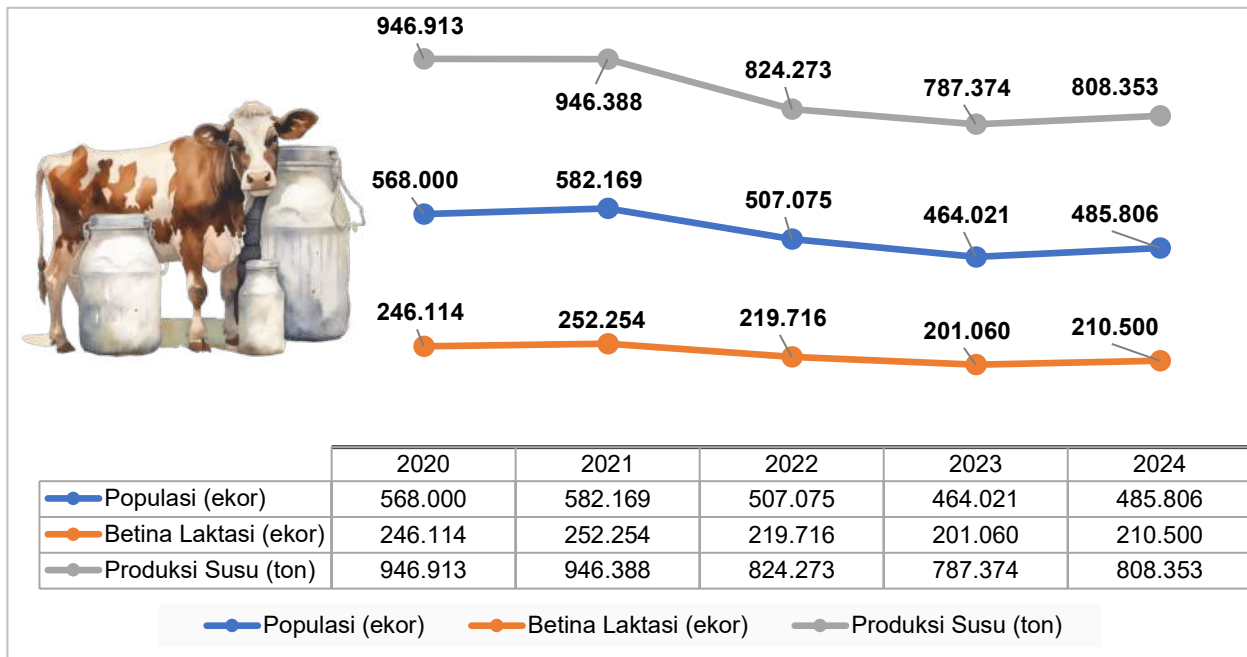
Sumber: *Buku Statistik PKH, data diolah dan UPT/UPTD 2024*

Realisasi betina laktasi ternak perah tahun 2024 sebesar 210.501 ekor. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 201.060 ekor, maka terjadi kenaikan betina laktasi sebesar 4,48%. Meskipun betina laktasi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi jumlah ini masih jauh dari jumlah betina laktasi yang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan susu nasional.

Faktor lain yang mempengaruhi upaya peningkatan populasi dan produksi sapi perah antara lain: 1) Penyakit Hewan, terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); 2) Isu perubahan iklim yang mengakibatkan terbatasnya sumber pakan ternak; 3) Fluktuasi harga susu yang menurunkan minat untuk beternak sapi perah; 4) Tantangan seperti keterbatasan lahan untuk kandang dan pakan hijauan, serta 5) Pemahaman peternak terhadap praktik peternakan yang baik yang belum memadai dalam pengembangan produksi susu segar dalam negeri (sumber: indonesia.go.id).



Grafik 4 Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, data diolah, 2024.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan produksi sapi perah yaitu:

- 1) Pembinaan UPTD/UPTD yang menangani perbibitan dan produksi sapi perah.
- 2) Pembinaan Kelompok dengan penerapan *Good Breeding Practices* (GBP)/ *Good Farming Practices* (GFP).
- 3) Pembuatan regulasi pembibitan dan produksi ternak sapi perah.
- 4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Denmark dalam bentuk kunjungan ke BBPTU HPT Baturraden untuk peningkatan manajemen pemeliharaan ternak untuk peningkatan produksi ternak.
- 5) Mendorong dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi usaha sapi perah dengan cara melakukan importasi sapi perah untuk menambah populasi di Indonesia.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan populasi dan produksi pada tahun 2024 yaitu:

- a. Impor sapi perah dilakukan dalam upaya perbaikan genetik di UPT perbibitan dan perusahaan sapi perah. Realisasi pemasukan bibit ternak perah pada periode 2020-2024 adalah sebanyak 8.026 ekor dengan rincian tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor, tahun 2023 sebanyak 2.563 ekor, dan tahun 2024 sebanyak 2.390 ekor.



- b. Penyediaan/produksi benih (semen beku dan embrio) dan bibit unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH sebagaimana tercantum pada Tabel 23.
- c. Pemasukan jenis ternak baru untuk peningkatan mutu genetik sapi perah di Indonesia melalui penerbitan rekomendasi pemasukan/impor benih ternak berupa semen beku sapi perah yang diterbitkan tahun 2024 sebanyak 75.000 dosis, yang terdiri dari rumpun Jersey sebanyak 7.300 dosis dan FH sebanyak 67.700 dosis. Pemasukan semen beku berasal dari Amerika Serikat dan Kanada.
- d. Kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional yang dilakukan sejak tahun 2004, saat ini uji zuriat memasuki periode IV (Tahun 2022 – 2026). Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu kebuntingan *Participated Cow* (PC), kelahiran dan pemeliharaan *Doughter Cow* (DC). Capaian Kebuntingan PC dari CPU sebanyak 3.797 ekor dengan rincian CPU Alba 1.489 ekor, CPU Conan 1.268 ekor, CPU Samson 1.040 ekor. Capaian kelahiran sebanyak 2.222 ekor yang terdiri dari DC sebanyak 953 ekor dan non DC (Jantan) sebanyak 1.269 ekor. Kelahiran DC 953 ekor dengan rincian CPU Alba sebanyak 321 ekor, CPU Conan 339 ekor, CPU Samson 293 ekor.

Tabel 23 Produksi Bibit dan Benih Sapi Perah Tahun 2020-2024

UPT	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
BBIB Singosari (dosis semen beku)	259.130	236.374	315.530	354.755	530.636	1.696.425
BIB Lembang (dosis semen beku)	339.135	319.313	217.139	213.258	156.222	1.245.067
BET Cipelang (dosis embrio)	0	69	75	96	0	240

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2024.

Kenaikan produksi susu pada tahun 2024 sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan susu sehingga untuk pemenuhan kebutuhan susu di dalam negeri dibutuhkan kenaikan produksi 6% per tahun. Oleh karena itu berbagai upaya akan dilakukan pada tahun 2025 agar terjadi peningkatan produksi susu dengan kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Pembinaan UPTD/UPTD yang menangani perbibitan dan produksi sapi perah.
- 2) Pembinaan kelompok peternak dengan penerapan *Good Breeding Practices* (GBP)/ *Good Farming Practices* (GFP).
- 3) Pembuatan regulasi pembibitan dan produksi ternak sapi perah.
- 4) Pemasukan jenis ternak baru dari Amerika Serikat dan Brazil untuk peningkatan mutu genetik sapi perah di Indonesia.
- 5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bekerja sama dengan Pemerintah Denmark melalui program *Strategic Sector Cooperation* (SSC) untuk peningkatan manajemen pemeliharaan ternak dan peningkatan produksi ternak.
- 6) Mendorong dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha baik PMA maupun juga PMDN untuk berinvestasi usaha sapi perah dengan cara melakukan importasi sapi perah untuk menambah populasi di Indonesia. Pemerintah



Indonesia, akan memberikan fasilitasi berupa: (i) kemudahan akses terhadap lahan dengan status *clear and clean* untuk investasi; (ii) penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, dll.; dan (iii) akses pembiayaan termasuk suku bunga, bea impor, pajak, subsidi, asuransi, dll.

SP1. IKU3 Peningkatan Produksi Telur	
Target 1,51%	Realisasi 4,42%
% Capaian 120,00% (Sangat Berhasil)	

Capaian indikator kinerja Peningkatan Produksi Telur merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) terhadap target tahun 2024.

Cara perhitungan Peningkatan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) adalah akumulasi produksi telur pada tahun berjalan (A^t) ($t=2024$) dikurangi akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$), dibagi dengan akumulasi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil peningkatan produksi telur 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 6.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 24 Produksi Telur Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Ayam Buras	246,69	358,86	368,70	389,27	214,73	236,65
2	Ayam Ras Petelur	4.753,38	5.141,57	5.156,00	5.579,25	6.116,07	6.342,71
3	Itik	294,01	316,95	313,84	316,17	200,21	236,48
4	Itik Manila	25,86	24,65	24,27	22,02	26,17	27,62
5	Puyuh	34,67	32,35	30,63	33,18	28,30	32,83
Jumlah		5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.585,49	6.876,28
Pertumbuhan Produksi Telur			9,71%	0,32%	7,58%	3,87%	4,42%

Keterangan : *) Angka Sementara (dalam 000 ton) Sumber: Buku Statistik PKH, 2024.



Capaian Produksi Telur tahun 2024 sebesar 6.876,28 ribu ton. Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Telur tahun 2024 sebesar 4,42%. Apabila dibandingkan terhadap target Peningkatan Produksi Telur tahun 2024 sebesar 1,51%, maka diperoleh capaian Peningkatan Produksi Telur tahun 2024 sebesar 120,00% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Capaian Peningkatan Produksi Telur tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel 24.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Telur tahun 2024 sebesar 4,42%. Realisasi Peningkatan Produksi Telur periode 2020-2024 bervariasi dalam rentang 0,32% - 9,71%. Produksi telur dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Tahun 2020 permintaan telur meningkat karena telur merupakan sumber protein yang terjangkau sebagai penambah daya tahan tubuh pada saat pandemi *Covid-19*. Tahun 2021 permintaan telur menurun tetapi tahun 2022 permintaan telur meningkat sehingga produksi *Day Old Chick Final Stock* (DOC FS) ayam ras meningkat yang berdampak pada peningkatan produksi telur.

Tabel 25 Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Telur Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	2,15	2,15	6,46	1,51	1,51
Realisasi ISP (%)	9,71	0,32	7,58	3,87	4,42
Capaian ISP (%)	120,00	14,88	117,34	120,00	120,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Peningkatan Produksi Telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) tahun 2024 sebesar 4,42%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 2,16%, maka capaian kinerja saat ini sudah mencapai 204,63%.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Telur dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target ISP (%)	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16	204,63
Realisasi ISP (%)	9,71	0,32	7,58	3,87	4,42	



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024 dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi telur tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena ini tidak terdapat pada target Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian Produksi Telur tahun 2024 sebesar 6.876,28 ribu ton dan realisasi Peningkatan Produksi Telur tahun 2024 sebesar 4,42%. Oleh karena itu, Ditjen PKH terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan untuk melakukan ekspor telur tetas (*hatching egg*) dan bersaing dalam perdagangan global. Telur merupakan komoditas yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara berkesinambungan untuk stabilisasi ketersediaan telur dengan pelaku usaha dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait.

Peningkatan produksi telur juga terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi telur yang meningkat. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi produksi telur antara lain:

1. Perbaikan genetik dan kualitas bibit ayam ras petelur difokuskan menggunakan bibit dengan produktivitas tinggi.
2. Perbaikan kualitas pakan dengan menitikberatkan pada komposisi nutrisi seimbang dengan menggunakan bahan pakan lokal.
3. Kesulitan mendapatkan bahan baku pakan khususnya jagung yang berdampak pada tingginya biaya produksi.
4. Perubahan pola pemeliharaan dengan menggunakan teknologi guna meningkatkan efisiensi produksi.
5. Wabah flu burung H5N1 dan penyakit *Newcastle Disease* menjadi ancaman dan mempengaruhi produksi.
6. Pandemi *Covid-19* berakibat pada penurunan produksi karena pembatasan aktivitas ekonomi utamanya pada sektor hotel, restoran dan catering (HOREKA). Selain itu terganggunya distribusi rantai pasok terhadap bahan pakan dan hasil produksi.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

1. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (peternak rakyat, perusahaan perunggasan *layer*, asosiasi peternak *layer*, BPS dan Badan Pangan Nasional).
2. Pemantauan pelaporan secara *online* melalui aplikasi POULTRYNESIA.
3. Koordinasi penetapan impor GPS *layer* dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.



4. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendata peternak *layer* untuk calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
5. Melakukan pembinaan teknis sebagai implementasi dari penerapan *Good Farming Practices* (GFP) baik di perusahaan peternakan dan asosiasi koperasi peternak.
6. Pengembangan klaster ayam petelur di luar daerah produksi ayam petelur.
7. Pelatihan peternak ayam petelur dalam penerapan peternakan yang baik melalui penerapan *biosecurity* dalam peternakan dan kandang.
8. Pelatihan pada peternak ayam petelur dalam penerapan ayam bebas kandang yang dapat meningkatkan produktivitas.
9. Kegiatan penetapan calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah melalui skema penyaluran Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini sangat membantu peternak dalam menyediakan bahan baku pakan atau jagung murah pada saat jagung langka atau mahal harganya.

Sasaran Program 2 (SP2)

MENINGKATNYA PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN

Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktik–praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen.

Untuk menjamin keamanan pangan maka diperlukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Di samping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta



mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

SP1. IKU4 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	
Target 91,94%	Realisasi 92,53%
% Capaian 100,64% (Sangat Berhasil)	

Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah persentase pangan segar mulai dari unit produksi hingga peredaran yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan. Formula perhitungan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah total pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan}}{\text{Jumlah total pangan segar asal hewan dari layanan pengujian UPT (sampel pasif)}} \times 100\%$$

Cara perhitungan jumlah pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh parameter uji cemaran mikroba dan residu yang menunjukkan hasil di bawah ambang Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) atau negatif terhadap jumlah sampel keseluruhan berdasarkan penerimaan sampel pasif yang diuji oleh UPT Pusat (Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan). Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, tidak dialokasikan anggaran untuk monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di UPT. Perhitungan hasil hanya berdasarkan sampel yang dikirimkan oleh unit usaha untuk permintaan pengujian.

Realisasi indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2024 sebesar 92,53%. Angka ini didapat dari perhitungan persentase jumlah sampel produk pangan segar asal hewan (daging, susu dan telur) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 23.526 sampel dari 25.424 total sampel produk pangan segar asal hewan yang diuji oleh laboratorium UPT. Sampel tersebut berasal dari unit usaha budidaya unggas petelur, budidaya ternak perah, rumah potong hewan, *cold storage*, kios daging, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi (PPPTK), dan tempat penampungan susu. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan, serta Rincian Sampel per UPT selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.

**a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2024 sebesar 92,53%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 91,94%, maka diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 100,64% dengan kategori “ **Sangat Berhasil**”.

Tabel 27 Produk Pangan Segar Asal Hewan Tahun 2020-2024

Sampel Produk Pangan Segar	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	16.367	16.862	13.560	12.260	23.526
Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan	18.900	20.316	14.375	13.335	25.424
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan asal hewan	86,60	83,00	94,33	91,94	92,53

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Capaian indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2024 sebesar 92,53%. Realisasi dan capaian tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2020-2023 bervariasi sebagaimana yang tersaji pada Tabel. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah sampel pangan segar asal hewan pada tahun 2020-2023 berasal dari layanan aktif surveilans dan monitoring yang dilakukan tidak hanya di UPT Pusat Ditjen PKH tetapi juga dilakukan oleh UPTD dan Laboratorium Provinsi.

Tabel 28 Capaian Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	81,50	85,20	85,50	85,70	91,94
Realisasi ISP (%)	86,60	84,00	94,00	91,94	92,53
Capaian ISP (%)	106,26	98,59	109,94	107,28	100,64



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2024 sebesar 92,53%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 86,00%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 105,26%.

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	81,50	85,20	85,50	85,70	86,00	107,59
Realisasi IKSP (%)	86,60	84,00	94,00	91,94	92,53	

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

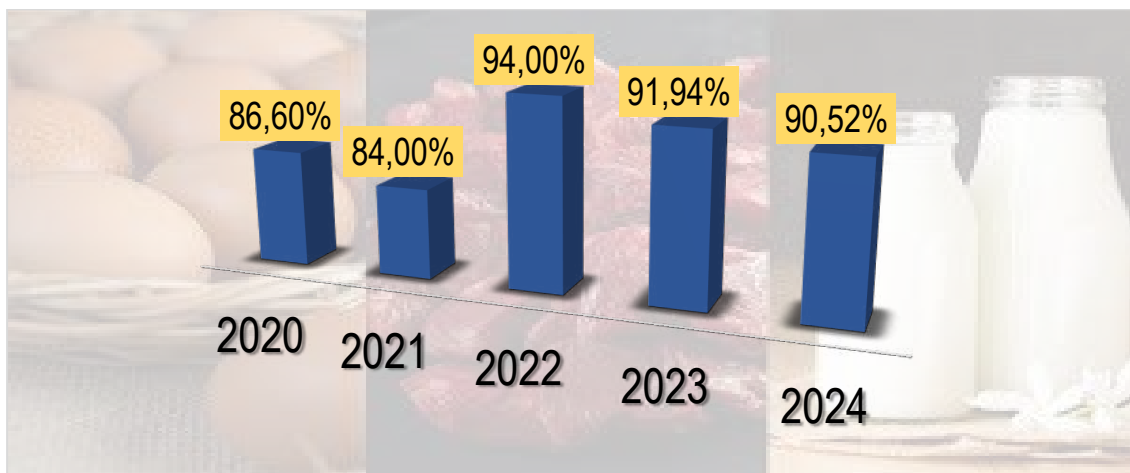
Realisasi indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2024 sebesar 92,53%. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 91,94%, maka capaian kinerja mencapai 100,64%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Pada tahun 2024 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, dan belum mencapai target yang ditetapkan. Penurunan ini terjadi karena sampel yang diuji merupakan sampel pasif yang dikirimkan oleh unit usaha untuk dilakukan layanan pengujian di UPT. Selain itu, belum optimalnya penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dapat berdampak pada keamanan dan mutu produk hewan yang dihasilkan. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 5.



Grafik 5 Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024



Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2024

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain: meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

Selain itu, pada tahun 2024 juga sudah diimplementasikan pengawasan lalu lintas produk hewan dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui aplikasi iSIKHNAS. Lalu lintas produk hewan mempersyaratkan antara lain produk hewan harus berasal dari unit usaha ber-NKV atau dalam pembinaan dan produk hewan memenuhi persyaratan keamanan produk hewan berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk parameter cemaran mikroba dan residu yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran lalu lintas produk hewan tentunya akan mendorong unit usaha untuk melakukan sertifikasi NKV serta memastikan produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat dilalulintaskan.



Adapun upaya-upaya tindak lanjut pada tahun 2025 antara lain:

- 1) Memfokuskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan;
- 2) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;
- 3) Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT maupun UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan;
- 4) Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.
- 5) Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkait dengan penjaminan keamanan produk hewan yang menjadi bahan baku harus menjadi prioritas untuk pembinaan unit usaha dan pengawasan keamanan produk hewannya.

Sasaran Program 3 (SP3)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERKENDALI KASUS ZOONOSIS

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit pada manusia yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas. Penentuan *zoonosis* prioritas yang perlu ditangani dan dikendalikan dilakukan menggunakan *One Health Zoonotic Disease Prioritization* (OHZDP) Tool, seperti dijelaskan oleh Rist *et al.* (2014). Metode ini memadukan pendekatan kualitatif dan semikuantitatif dengan melibatkan partisipan dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, perguruan tinggi, serta komisi ahli kesehatan hewan. Kriteria yang dipilih dalam proses ranking prioritas *zoonosis* terdiri dari :

- a. *Case fatality rate* dan mortalitas pada manusia di Indonesia.



- b. Kemampuan pengendalian dan pencegahan penyakit.
- c. Proporsi penyakit pada manusia akibat paparan hewan.
- d. Beban penyakit hewan.
- e. Adanya kolaborasi intersektoral.

Dalam pertemuan OHZDP disepakati 6 (enam) *zoonosis* prioritas utama lintas Kementerian untuk dicegah dan dikendalikan yaitu:

- a. Virus *Zoonosis Influenza* (flu burung dan babi).
- b. *Zoonosis Coronavirus* (COVID-19, Middle East Respiratory Syndrome (MERS),
- c. *Anthrax*,
- d. *Rabies*,
- e. *Zoonotik Tuberkulosis*
- f. *Leptospirosis*

Berdasarkan urgensi dan keterkaitan anggaran, ditetapkan *Rabies* dan *Anthrax* menjadi prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

SP3. IKU5	
Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis	
Target 76,00%	Realisasi 92,11%
% Capaian 120,00% (Sangat Berhasil)	

Indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* adalah persentase wilayah yang terkendali dari *zoonosis*. Wilayah terkendali adalah provinsi yang tidak terjadi kasus pada manusia atau mengalami penurunan *zoonosis*.

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dilihat dari status wilayah terhadap kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* pada tahun 2024 dibandingkan dengan kasus pada tahun 2023. Jumlah provinsi yang terkendali adalah provinsi yang tidak ada kasus sama sekali atau penurunan kasus atau tidak ada peningkatan kasus pada tahun berjalan. Cara penghitungannya yaitu jumlah provinsi yang terkendali dibagi dengan jumlah seluruh provinsi dikalikan 100% sebagaimana formula berikut:

$$\text{Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis} = \frac{\sum (\text{Provinsi yang terkendali penyakit zoonosis ke-}i) \text{ Jumlah provinsi}}{n} \times 100\%$$

Keterangan: n = jumlah jenis penyakit *zoonosis*

Capaian wilayah yang terkendali kasus *Rabies* pada tahun 2024 adalah 34 provinsi dibagi dengan 38 provinsi dikalikan 100% yaitu sebesar 89,47% dan capaian wilayah terkendali kasus *Anthrax* pada tahun 2024 adalah 36 provinsi dibagi 38 provinsi dikalikan 100% yaitu sebesar 94,74%. Selanjutnya, capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang



Terkendali Zoonosis pada tahun 2024 adalah rata-rata penjumlahan dari capaian wilayah terkendali kasus *Rabies* dan *Anthrax* tahun 2024 yaitu sebesar 92,11%.. Data status wilayah terhadap kasus penyakit *Rabies* dan *Anthrax* tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis pada tahun 2024 adalah 92,11%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 76,00%, maka diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis sebesar 120,00% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis tahun 2024 sebesar 92,11%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 karena IKU Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2021.

Tabel 30 Capaian Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	-	74,00	74,50	75,00	76,00
Realisasi ISP (%)	-	88,00	83,83	80,26	93,42
Capaian ISP (%)	-	118,92	112,52	107,01	120,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021-2023, realisasi tahun 2024 menjadi yang tertinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan penyakit *zoonosis* dan adanya dukungan lintas sektoral seperti Kementerian Kesehatan melalui vaksinasi, Kementerian Dalam Negeri melalui alokasi Dana Desa pada wilayah yang rentan *zoonosis*, dan Kementerian Pertanian melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta kegiatan layanan investigasi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis tahun 2024 sebesar 92,11%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 76%, maka saat ini sudah mencapai 121,20%.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	74,00	74,50	75,00	76,00	121,20
Realisasi IKSP (%)	-	88,00	83,83	80,26	92,11	

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Strategi pencegahan penularan *zoonosis* dilakukan melalui koordinasi intens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan *zoonosis*. Ditjen PKH melalui fungsi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan target pada populasi masyarakat di daerah endemis atau risiko tinggi tertular *zoonosis*. Selain itu mengingat *Rabies* merupakan salah satu *zoonosis* yang memiliki kasus cukup tinggi di Indonesia, maka dilakukan pembentukan Kader Siaga *Rabies* (Kasira) serta peningkatan kompetensi kader sebagai salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penularan *Rabies*.
2. Pencegahan penularan *zoonosis* dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan (RPH). Pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* berperan dalam mendeteksi penyakit hewan menular strategis dan *zoonosis* dalam rangka mendukung kegiatan surveilans di RPH.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, yang dua diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, yaitu *Rabies* dan *Anthrax*. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat strategi melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko Bersama

Penilaian risiko bersama ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian dan pemangku kebijakan terkait yang bertanggungjawab dalam aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Pelibatan ahli lintas



sektor dan berbagi informasi akan menghasilkan penilaian risiko bersama dalam penanggulangan *zoonosis* dalam hal pilihan manajemen dan komunikasi risiko terhadap ancaman *zoonosis*.

2. Pemeriksaan kesehatan hewan (*ante-mortem*/AM) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (*post-mortem*/PM).

Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan *zoonosis* dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak dipotong di RPH. Pemeriksaan AMPM merupakan elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, sehingga data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini *hazard* (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.

3. Pemetaan *Zoonosis*

Pemetaan *zoonosis* dalam menjamin keamanan pangan untuk memahami konsentrasi bahaya (*hazard*) pada tahapan rantai pangan asal hewan yang berdampak pada risiko kesehatan manusia. Bahaya pada pemetaan ini meliputi *Zoonotik-Tuberculosis* (zTB) yang disebabkan oleh *Mycobacterium Bovis* melalui pengujian sampel susu sapi di peternakan dan lesi pada organ (paru), *limfonodus* (*mediastinalis*, *mammary submandibula*, *intestinal* ada perkejuan), *extrapulmonary* (hati, limpa) yang diambil di RPH serta *Toksoplasmosis* yang disebabkan oleh *Toxoplasma gondii* pada kambing melalui pengujian sampel susu di peternakan dan organ jantung yang diambil di RPH.

4. Pembentukan Kader Siaga *Rabies* (Kasira)

Sebagai upaya mendorong pembebasan *Rabies* berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH menginisiasi pembentukan Kasira di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Kasira diharapkan mempercepat pelaporan kasus dan respon, meningkatkan cakupan vaksinasi anjing, memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat dalam pengendalian *Rabies*, serta mampu meningkatkan sinergitas Puskesmas, Puskesmas dan instansi terkait dalam meningkatkan motivasi dan komitmen kader serta mendorong implementasi *One Health* sehingga pengendalian *Rabies* dapat dilaksanakan secara efektif. Pada tahun mendatang Kasira diharapkan dapat direplikasi di wilayah-wilayah endemis dan berisiko tinggi di Indonesia.

5. Komunikasi Risiko

Pencegahan dan pengurangan risiko *zoonosis* dapat dilakukan melalui komunikasi risiko dalam bentuk advokasi kepada pemangku kepentingan dan pelaksanaan



Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang risiko *zoonosis*, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sasaran utama advokasi adalah pemerintah daerah dan instansi terkait sedangkan sasaran utama KIE adalah masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Sasaran Program 4 (SP4)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/ atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular. Ditjen PKH memprioritaskan Pengendalian Hewan Menular Strategis pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* (RABAH). Dengan mewabahnya penyakit *African Swine Fever* (ASF), *Lumpy Skin Disease* (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Septicaemia Epizootica* (SE), Surra dan Jembrana maka prioritas pengendalian ditambahkan kelima penyakit tersebut.

SP4. IKU6	
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,50%	Realisasi 80,62 %
% Capaian 100,15 (Sangat Berhasil)	

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS, khususnya pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, *Hog Cholera*, ASF, LSD, PMK, Surra dan Jembrana. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi



dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Formula capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah identifikasi total wilayah yang terkontrol dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kab. Kota yang Terkendali PHMS (a)}}{\text{Jumlah Kab. Kota yang Terdampak PHMS (b)}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis tahun 2024 sebesar 80,62% yang diperoleh dari rata-rata angka kesehatan hewan dari 11 (sebelas) PHMS (*Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, PMK, Surra, SE, dan Jembrana*) di kabupaten/ kota sebagaimana tersaji pada Lampiran 10.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun 2024 adalah 80,62%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja ini mencapai 100,15% atau dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2024 adalah sebesar 80,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 80,57%, realisasi tahun 2022 sebesar 80,00%, realisasi tahun 2021 sebesar 80,74%, dan realisasi tahun 2020 sebesar 80,01%, maka realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan tren positif.

Tabel 32 Capaian Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	80,00	80,50	80,00	80,50	80,50
Realisasi ISP (%)	80,01	80,74	80,00	80,57	80,62
Capaian ISP (%)	100,01	100,30	100,00	100,09	100,15



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS pada tahun 2024 adalah 80,62%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 81,00%, maka realisasi tahun 2024 mencapai 99,53%.

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	80,00	80,50	80,50	81,00	81,00	99,53
Realisasi IKSP (%)	80,01	80,74	80,00	80,57	80,62	

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS tahun 2024 sebesar 80,62%. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 80,50%, maka realisasi saat ini telah mencapai 100,15%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS, diantaranya disebabkan:

1. Program vaksinasi massal *Rabies* dan tertarget dengan cakupan lebih dari 70% populasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan pelaksanaan vaksinasi *Rabies* pada 30 provinsi sebanyak 350.610 dosis tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan.
2. Peningkatan implementasi kompartemen bebas *Avian Influenza* dengan melakukan pembinaan pada peternakan unggas terutama di daerah sentra ternak unggas dengan jumlah kompartemen unit usaha bebas *Avian Influenza* sebanyak 287 unit usaha pada tahun 2024 dan 267 unit usaha pada tahun 2023.
3. Penerapan biosekuriti dengan tepat, pemusnahan unggas selektif (depopulasi) di daerah tertular, vaksinasi, pengendalian lalu lintas, surveilans, dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) sebagai strategi pengendalian dan penanggulangan *Avian Influenza*.



4. Tenaga Harian Lepas sebanyak 519 orang pada tahun 2024 yang terdiri dari 243 orang Dokter Hewan dan 276 orang Paramedik Veteriner untuk membantu dinas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit. Pada bulan Oktober 2024 karena adanya penerimaan CPNS dan PPPK, jumlah Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berkurang menjadi 431 orang yang terdiri dari 187 orang Dokter Hewan dan 244 orang Paramedik Veteriner

5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

a. Pengendalian Penyakit *Rabies*

Sampai dengan tahun 2024 terdapat 12 dari 38 Provinsi di Indonesia yang berstatus bebas *Rabies* yaitu wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas *Rabies* yaitu Pulau Lombok (bebas historis), Pulau Pisang, Pulau Meranti, Pulau Weh, Pulau Mentawai, Pulau Enggano (2015), Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Pulau Tabuan (2018), Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Siau, Biaro Kab Kep Sitaro (2019). Pada tahun 2023 dalam proses penetapan status bebas dari *Rabies* oleh Menteri Pertanian untuk Pulau Rupa di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Pulau Weh Aceh. Selanjutnya, terdapat hibah vaksin *Rabies* dari *World Organization for Animal Health* (WOAH) sebanyak 400.000 dosis yang telah didistribusikan ke Prov. Bali sebanyak 200.000 dosis dan Prov. Nusa Tenggara Timur sebanyak 200.000 dosis.

b. Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (AI)

Sampai dengan tahun 2024, terdapat 3 provinsi yang memiliki status bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yaitu Provinsi Papua (2017), Maluku (2016) dan Maluku Utara (2016), Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Hingga tahun 2024 tercatat 287 unit usaha perunggasan telah mendapat sertifikat kompartemen bebas dari *Avian Influenza*.

c. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*

Penyakit *Brucellosis* atau penyakit keluron merupakan salah satu penyakit prioritas yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan populasi ternak di wilayah tertular. *Roadmap* Pengendalian dan Penanggulangan *Brucellosis* telah disusun dengan pola pengendalian penyakit dengan vaksinasi, pembebasan wilayah, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan penyusunan NSPK pengendalian *Brucellosis*. Pada tahun 2024, kegiatan Pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui pembebasan kompartemen bebas dari *Brucellosis* sebanyak 4 unit.



d. Pengendalian Penyakit *Anthrax*

Penyakit *Anthrax* merupakan penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, penyakit *Anthrax* merupakan salah satu penyakit yang diprioritaskan pengendaliannya. Langkah pengendalian penyakit *Anthrax* antara lain dengan pengobatan, vaksinasi, surveilans, pengawasan lalu lintas antar daerah, bimtek, sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

e. Pengendalian Penyakit *Hog Cholera*

Pengendalian dan penanggulangan *Hog Cholera* (HC)/*Classsical Swine Fever* (CSF) adalah melalui vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Sampai dengan saat ini, wilayah yang bebas HC sebanyak 2 provinsi yaitu Sumatera Barat (2014) dan Kalimantan Barat (2021).

f. Pengendalian Penyakit *African Swine Fever* (ASF)

Tantangan penanganan penyakit ASF yaitu tidak adanya vaksin ASF yang tersedia di dunia, jadi hanya mengandalkan penerapan biosekuriti dimana tipikal sistem pemeliharaan di Indonesia peternakan rakyat dengan berbagai level biosekuriti, serta pengendalian lalu lintas babi. Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan wilayah dengan pendekatan kompartemen. Kompartemen yang berhasil ditetapkan status bebas dari penyakit ASF sejumlah 2 kompartemen.

g. Pengendalian Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD)

Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) merupakan penyakit kulit pada ruminansia sapi dan kerbau, namun banyak dilaporkan pada sapi dan tidak bersifat *zoonosis*.

h. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam upaya pengendalian PMK telah dilakukan hibah vaksin tahap I dari Pusat Veteriner Farma sebanyak 50.000 dosis untuk mengurangi penyebaran PMK ke wilayah/daerah kasus. Program penanggulangan PMK dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi pada basis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan PMK melalui KIE, melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas ternak dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS, antara lain:



1. Fasilitas anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa operasional pusat kesehatan hewan (puskeswan) untuk obat hewan dan pendukungnya, operasional pelaporan iSIKHNAS, operasional pengobatan PHMS, surveilans dan pengujian.
2. Pelaksanaan monitoring dan investigasi tertarget oleh UPT Veteriner.
3. Produksi obat dan vaksin oleh Pusvetma sejumlah 7.655.850 dosis.
4. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan sejumlah 1.350 sampel.
5. Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan media pembawa (HPM) melalui penerbitan regulasi lalu lintas HPM, pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas HPM serta penerapan biosekuriti pada unit kompartemen.
6. Pengawasan obat hewan melalui pengawasan mutu dan peredaran obat hewan dengan kegiatan penerapan CPOHB, registrasi obat hewan, pelatihan pengawas obat hewan, dan pengawasan peredaran obat hewan oleh pengawas obat hewan.
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskeswan dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui dan kapasitas laboratorium veteriner pada 11 UPT veteriner.

Sasaran Program 5 (SP5)

TERMANFAATKANNYA SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN

Transformasi ke arah peternakan modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan *output* berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah maupun pusat menyebabkan terbatasnya penyediaan fasilitas tersebut di Indonesia.

SP5. IKU7	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 100,00%	Realisasi 99,05%
% Capaian 99,05% (Berhasil)	



Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi II yang terbit pada akhir tahun 2021 dan merupakan indikator baru pasca revisi. Pengukuran terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan baru dilaksanakan pada tahun 2021.

Target indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 100,00%, sedangkan target pada Renstra Tahun 2020-2024 Revisi II sebesar 95,00%. Hal ini sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), sehingga target perlu disesuaikan.

Tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan secara keseluruhan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\Sigma(\text{tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan})}{\Sigma(\text{Direktorat yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan})}$$

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan di Eselon II lingkup Ditjen PKH yang melaksanakan fasilitasi sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan, yaitu Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; Direktorat Pakan; Direktorat Kesehatan Hewan; dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana peternakan (sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, dan sarana pakan), maka dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Tingkat kemanfaatan sarana pakan berupa sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Pakan Olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak dan kesmavet menggunakan kuesioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menerima bantuan. Selanjutnya, tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan menggunakan kuesioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuesioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian berupa: kelengkapan administrasi, pengendalian dan pembinaan, serta pemeliharaan) dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner.

1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pakan

Sarana pakan terdiri dari alsintan penanaman/pemanenan hijauan pakan ternak dan pengolahan pakan. Dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan dapat



mendorong peningkatan penerapan penanaman hijauan pakan berkualitas dan pengolahan pakan yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja, peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Data jumlah sarana pakan pada tahun 2023 sebanyak 66 unit yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Olahan. Rincian sarana pakan ternak dan kuesioner kemanfaatannya tersaji pada Lampiran 11. Frekuensi pemanfaatan sarana pakan hijauan sebagai berikut:

1. *Chopper*

Pemakaian *chopper* bisa setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Rata-rata pemakaian dalam 1 bulan adalah 20-30 kali.

2. Sarana tata kelola air

Pemakaian sarana tata kelola air adalah 2-4 kali dalam seminggu atau 8-16 kali dalam 1 bulan. Tata kelola air digunakan untuk menyiram kebun hijauan (rumput dan legum).

3. Alat kerja personal kebun

Pemakaian alat kerja personal kebun yaitu berupa sabit/parang digunakan 10-30 kali dalam 1 bulan, sedangkan cangkul digunakan 4-12 kali dalam 1 bulan.

4. Kendaraan roda tiga pengangkut hijauan

Pemakaian kendaraan roda tiga bisa setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Rata-rata pemakaian dalam 1 bulan adalah 20-30 kali.

2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak yang didistribusikan tahun 2023 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dan N₂ cair dalam mendukung kegiatan optimalisasi reproduksi. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2023 telah didistribusikan 122 unit kontainer lapangan, 33 unit kontainer depo N₂ cair, dan 28 unit kontainer depo semen beku dengan rincian sebagaimana tersaji pada Lampiran 11. Tingkat kemanfaatan sarana produksi perbibitan dan produksi ternak diukur melalui metode survei dengan kuesioner yang di sampaikan ke seluruh provinsi di Indonesia pada tautan <https://forms.gle/tXtVuKkSbbpk8TN56>. Frekuensi penggunaan kontainer semen beku dan N₂ cair yang berasal dari pengadaan tahun 2023 berdasar pada jumlah pengadaan N₂ cair sebanyak 1.487.423 liter yang telah terealisasi.

3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Kesehatan Hewan

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan diperoleh dengan distribusi kuesioner ke 8 (delapan) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian sebagaimana Tabel 34 atas pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan tahun 2023 sebanyak 427 unit untuk laboratorium Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, dan Patologi sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.



Tabel 34 Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan Tahun 2024

Kriteria	Parameter	Status	Target	Capaian Kinerja	Kriteria Keberhasilan
Kelengkapan Administrasi			Score (YA=10/ TIDAK=0)		
1	Ada Spek dan data dukung pengadaan	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
2	Ada SK Pengawasan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
3	Ada Dokumen pengelolaan (pembukuan penggunaan) Alat Lab dan pemanfaatannya	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
Pengendalian					
4	Ada SOP Mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
5	Ada Pengawasan Kelayakan dan Pemanfaatan Alat Laboratorium Berkala	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
6	Ada Laporan Pemanfaatan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
7	Ada Mekanisme Realokasi Alat Laboratorium yang tidak dimanfaatkan secara optimal	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
8	Ada Database Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
Pembinaan& Pemeliharaan					
9	Ada pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
10	Ada pelatihan untuk operator	Ya/Tidak	10	100	Sangat berhasil
Rata-rata				100	

4. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner tahun 2024 dihitung dengan melihat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner yang difasilitasi pada tahun 2023. Tingkat kemanfaatan dihitung dengan menggunakan kuesioner sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.

Sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner yang difasilitasi pada tahun 2023 antara lain fasilitasi sarana RPHR di Kabupaten Depok dan Kabupaten Gowa, fasilitasi unit penanganan madu di Kabupaten Sumbawa Barat, fasilitasi sarana penanganan kesejahteraan hewan uji di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dan Balai Besar Pusat Veteriner Fatrma Pusvetma, dan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.



Fasilitasi sarana RPHR melalui APBN pada 2 (dua) RPHR yaitu RPHR Tapos Kota Depok Jawa Barat dan RPHR Tamarunang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pengadaan sarana RPHR di RPHR Tapos Kota Depok Tahun 2023 berupa peralatan alat perebahan (*restraining box*) dan *skinning craddle stainless* dengan anggaran sebesar Rp608.000.000. Pengadaan sarana RPH-R di RPH-R Tamarunang berupa *railing system*, *hoist*, *spreader*, *hidrolik hook cutter*, *carcass hook* (penggantung karkas), *brisket saw* (gergaji tulang dada), *dehider*, *knife sterilizer*, *bone saw*, *vaccum pack machine*, *shrink tank*, *stapping band machine*, *rak blasting daging*, *ABF*, *genset*, pisau, asahan pisau dan tempat pisau, kipas angin dan AC dengan anggaran sebesar Rp2.300.000.000.

Sarana RPH yang diberikan tahun 2023 dapat dimanfaatkan pada tahun 2024 yang dinilai dari pemotongan hewan di RPH yang mendapatkan fasilitasi bantuan sarana dari pemerintah pusat tersebut yaitu RPHR Tapos Kota Depok dan RPHR Tamarunang Kabupaten Gowa. Dengan adanya pemotongan hewan di RPH-R tersebut menandakan bahwa sarana yang diberikan dimanfaatkan dengan baik sehingga Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet di RPHR Tapos dan RPHR Gowa adalah 100%.

Selanjutnya, fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji tahun 2023 berada pada laboratorium Pusvetma dan BBPMSOH. Pada Pusvetma berupa animal insulator. Insulator hewan ini berfungsi untuk mengatur kelembaban dan suhu di dalam ruangan tempat pemeliharaan hewan laboratorium. Melalui pengaturan suhu dan kelembaban yang optimal maka akan membuat hewan laboratorium nyaman dan produktif. Pada BBPMSOH berupa rak *stainless steel* untuk kandang hewan percobaan. Adapun fasilitasi laboratorium kesmavet tersebut juga telah dimanfaatkan pada tahun 2023 hingga sekarang. Pemanfaatan sarana di BBPMSOH, dalam penggunaannya dilakukan setiap hari dengan kapasitas dapat menampung hewan coba laboratorium sebanyak 1.200 ekor dengan rincian 6 rak yang masing-masing rak berisi 10 kandang dan 1 kandang berisi 10 ekor.

Fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di BPMSPH Bogor berupa *biosafety cabinet*, *realtime PCR*, *waterbath shaker* untuk mendukung layanan pengujian dengan metode *Real Time PCR* (qPCR) dan PC Bioinformatika untuk keperluan analisis genomik/*genotyping* sebagaimana Tabel 35.

Tabel 35 Pemanfaatan Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet BPMSPH Bogor

No	Nama Peralatan	Fungsi Peralatan	Parameter Uji
1	Bisafety Cabinet	Proses Ekstraksi	Campylobacter spp.
		DNA dari	qPCR
		sampel/contoh	E. coli O157 qPCR



No	Nama Peralatan	Fungsi Peralatan	Parameter Uji
		menggunakan BSC untuk mencegah kontaminasi silang dan melindungi personel dari risiko zoonosis	Identifikasi Spesies (Ayam) qPCR
			Identifikasi Spesies(Babi) ELISA
			Identifikasi Spesies(Babi) qPCR
			Identifikasi Spesies(Sapi) qPCR
			Identifikasi Spesies (Tikus) qPCR
			Influenza A qRT-PCR
			PMK qRT-PCR
			ASF qPCR
			Salmonella spp. qPCR
2	Realtime PCR	Deteksi/identifikasi DNA/RNA tertarget	Campylobacter spp.qPCR
			E. coli O157 qPCR
			Identifikasi Spesies(Ayam) qPCR
			Identifikasi Spesies(Babi) ELISA
			Identifikasi Spesies(Babi) qPCR
			Identifikasi Spesies(Sapi) qPCR
			Identifikasi Spesies(Tikus) qPCR



No	Nama Peralatan	Fungsi Peralatan	Parameter Uji
			Influenza A qRT-PCR
			PMK qRT-PCR
			ASF qPCR
			Salmonella spp. qPCR
3	Waterbath Shaker	Proses preparasi/ekstraksi sampel/contoh terutama asal sampel dari fragmen kecil seperti sarang burung walet, gelatin dsb sebelum analisis menggunakan instrumen utama seperti HPLC, PCR dll	Residu hormon MGA
			Identifikasi Spesies(Ayam) qPCR
			Identifikasi Spesies(Babi) ELISA
			Identifikasi Spesies(Babi) qPCR
			Identifikasi Spesies(Sapi) qPCR
			Identifikasi Spesies(Tikus) qPCR
4	PC Bioinformatika	Analisis bioinformatika untuk keperluan analisis genomik/ genotyping seperti AMR, metagenomik dsb.	Sequencing sebagai kelanjutan AST

Adapun fasilitasi laboratorium kesmavet tersebut juga telah dimanfaatkan pada tahun 2023 hingga tahun 2024, telah dilakukan Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR) oleh BPMSPH Bogor sebanyak 856 sampel sebagaimana Tabel 36.



Tabel 36 Jumlah Sampel Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR) BPMSPH Bogor Tahun 2024

Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR)	Jumlah Sampel
Campylobacter spp.	20
E. coli O157	48
Identifikasi Spesies Babi	6
Identifikasi Spesies Domba	3
Identifikasi Spesies Kambing	3
Identifikasi Spesies Sapi	3
Salmonella Enteritidis	401
Salmonella spp.	364
Salmonella Typhimurium	8
Jumlah	856

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana unit usaha madu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tahun 2023, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi madu yang memenuhi standar keamanan pangan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan teknis NKV dan registrasi produk hewan. Pembangunan sarana ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana unit usaha madu telah mencapai 87%. Capaian ini mencerminkan peningkatan penggunaan fasilitas yang telah disediakan, termasuk bangunan, alat produksi, dan fasilitas penunjang lainnya.

Rincian pemanfaat bangunan unit usaha madu berdasarkan kuesioner telah digunakan oleh kelompok usaha madu "Harapan Keluarga" di Dusun Montong Singgan, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Pembagian bangunan mencakup ruang proses penerimaan bahan baku, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan dan display produk madu.

Dampak positif yang didapat dari pemanfaat prasarana dan sarana unit usaha madu antara lain peningkatan produksi madu sebesar 10%, sehingga diharapkan kedepan akan ada peningkatan yang lebih signifikan.

Keterbatasan anggaran APBN yang dialokasikan menyebabkan beberapa sarana dan prasarana belum selesai dibangun secara menyeluruh. Disparitas harga prasarana dan sarana saat realisasi pembangunan menyebabkan kebutuhan material dan penyelesaian bangunan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu



dilakukan tindak lanjut berupa pengadaan tambahan anggaran untuk penyelesaian bangunan dan peralatan produksi untuk mendukung pemenuhan persyaratan teknis keamanan produk madu masih perlu dilakukan. Penambahan alokasi anggaran untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana yang belum selesai seperti lantai yang belum di epoksi, dinding dan langit-langit yang belum dicat.

Dengan tingkat pemanfaatan mencapai 87%, sarana dan prasarana unit usaha madu diharapkan terus dapat ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya peningkatan produksi dan pemenuhan persyaratan teknis dalam rangka surveilan NKV dan regsitrasi produk hewan.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKH tahun 2024 sebesar 99,05%.

Tabel 37 Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Direktorat Pakan				100,00%
Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	63	63	63	100,00%
Saranaa Prasarana Pakan Olahan	3	3	3	100,00%
Direktorat Perbibitan dan Produksi ternak				98,36%
Kontainer Semen Beku dan N ₂ Cair	183	183	180	98,36%
Direktorat Keswan				100,00%
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	427	427	427	100,00%
Direktorat Kesmavet				97,83%
Sarana Prasarana Kesmavet	6	6	6	97,83%
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				99,05%

Sumber: Hasil perhitungan dari Kuesioner yang dibagikan ke Responden yang diolah oleh Direktorat lingkup Ditjen PKH, 2024

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 99,05% atau masuk dalam kategori **“Berhasil”**. Jenis sarana-prasarana dapat dilihat pada Lampiran 11 dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 37.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 99,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi



tahun 2023 sebesar 92,59%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 106,98% atau **“Sangat Berhasil”**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90,20%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 109,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,82%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 121,06%, sedangkan untuk realisasi capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena belum ada target. Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38 Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	-	91,25	92,25	93,50	100,00
Realisasi ISP (%)	-	98,42	95,86	96,65	99,05
Capaian ISP (%)	-	107,86	103,91	103,37	99,05

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 99,05%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PKH 2020-2024 pada akhir periode tahun 2024 sebesar 95,00%, maka realisasi indikator kinerja sasaran program ini mencapai 104,81%

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target ISP (%)	-	91,25	92,25	93,50	94,50	104,81
Realisasi ISP (%)	-	98,42	95,86	96,65	99,05	

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 99,05%. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 94,62%, maka realisasi indikator kinerja



sasaran program ini mencapai 104,68%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner yang difasilitasi pada tahun 2024 antara lain fasilitasi sarana RPHR di Kabupaten Depok dan Kabupaten Gowa, fasilitasi unit penanganan madu di Kabupaten Sumbawa Barat, fasilitasi sarana penanganan kesejahteraan hewan uji di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dan Balai Besar Pusat Veteriner Fatma Pusvetma, dan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana tahun 2024 sebesar 97,83%.

Tabel 40 Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Uraian	Lokasi	Volume	Satuan	% Pemanfaatan
Fasilitasi RPHR Kota Depok	Kota Depok, Jawa Barat	1	Unit	100,00%
Fasilitasi RPHR Kab. Gowa	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Unit Penanganan Madu	Kab. Sumbawa Barat, NTB	1	Unit	87,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	BBPMSOH	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	PUSVETMA	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet	BPMSPH Bogor	1	Unit	100,00%
Rata-rata				97,83%

2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi program/kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini serta pelaporan.

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi. Bila belum ada



laboratorium veteriner yang terakreditasi, Menteri menetapkan laboratorium veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan. Untuk penetapan laboratorium veteriner, Menteri harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang berkompeten, peralatan yang memadai dan menggunakan metodologi yang sahih. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen penyakit hewan, bahan berbahaya, residu dan cemaran dalam rangka surveilans dan penyidikan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja persentase pemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan UPT wilayah barat dan timur tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan diantaranya monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat dan bahan laboratorium veteriner, identifikasi dan pemetaan gap standar dan masalah terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat laboratorium veteriner, melakukan perbaikan dan pelatihan untuk penguatan kapasitas dan kompetensi teknis terkait kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat laboratorium veteriner, memperkuat kolaborasi, koordinasi dan *veterinary laboratory networking system* untuk *updating* dan pemutakhiran kinerja dan prosedur teknis standar kemanfaatan sarana kesehatan hewan UPT wilayah barat dan timur dengan *stakeholder*/sektor dan mitra pembangunan terkait, menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC dan LMT untuk kemanfaatan sarana kesehatan hewan UPT wilayah barat dan timur untuk penjaminan kualitas kinerja laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner dan output kemanfaatan sarana kesehatan hewan yang dimonitor secara periodik dan berkelanjutan.

3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2024 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi yang telah didistribusikan pada tahun 2023 sebanyak 183 unit ke Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dan N2 cair dalam rangka mensukseskan kegiatan optimalisasi reproduksi.

Koordinasi dilakukan secara periodik antara pusat dan daerah untuk membahas kinerja kegiatan Optimalisasi Reproduksi, salah satu pembahasannya adalah pemanfaatan sarana dan prasana penunjang pelaksanaan inseminasi buatan. Sarana penunjang berupa container baik container depo N2 cair, container semen beku dan container lapangan sangat menunjang kegiatan layanan optimalisasi reproduksi. Kegiatan layanan optimalisasi reproduksi diharapkan dapat optimal dengan adanya sarana berupa container.



4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan

Sarana pakan diberikan oleh Ditjen PKH untuk memfasilitasi kegiatan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Olahan di daerah. Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pakan tahun 2024 mencapai 100%, diperoleh dari pemanfaatan sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang didistribusikan pada tahun 2023 sebanyak 66 unit di 15 provinsi yang peruntukannya untuk kelompok peternak dan UPTD

Sarana pakan terdiri dari alsintan penanaman/pemanenan hijauan pakan ternak dan pengolahan pakan. Dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerapan penanaman hijauan pakan berkualitas dan pengolahan pakan yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja, peningkatan produksi dan produktivitas ternak.

Keberhasilan tercapainya indikator tingkat kemanfaatan sarana pakan yang dialokasikan dalam rangka peningkatan kegiatan penyediaan pakan hijauan dan pakan olahan karena ditunjang dengan adanya beberapa hal diantaranya yaitu:

- a. Penentuan kriteria lokasi dan kelompok penerima sarana yang tepat.
- b. Jenis dan spesifikasi sarana sesuai dengan kebutuhan penerima.
- c. Adanya pelaksanaan verifikasi kelompok berdasarkan hasil CP/CL yang dilakukan oleh tim teknis.
- d. Adanya penetapan lokasi dan kelompok penerima berdasarkan usulan tim teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- e. Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan.
- f. Adanya pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap sarana yang diberikan kepada penerima bantuan.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- 2) Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat dan bahan laboratorium veteriner;
- 4) Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- 5) Penguatan kapasitas dan bimbingan teknis terkait:
 - a) Peningkatan sistem mutu laboratorium
 - b) Penggunaan peralatan pengujian laboratorium;
 - c) Pakan olahan;
 - d) Kesmavet.



Sasaran Program 6 (SP6)

MENINGKATNYA NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN

Sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan terdiri dari unit/alsintan dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerapan pengelolaan pascapanen yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk peternakan.

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan kepada kelompok/Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di seluruh Indonesia pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya.

SP6. IKU8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
Target 100,00%	Realisasi 100%
% Capaian 100,00% (Berhasil)	

Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh pembina daerah dan penerima manfaat dinyatakan dalam satuan persen (%). Penghitungan realisasi tingkat kemanfaatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kemanfaatan} &= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana termanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana prasarana}} \times 100\% \\
 &= \frac{35}{35} \times 100\% \\
 &= 100,00\%
 \end{aligned}$$

Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada Tabel 41.



Tabel 41 Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

KODE	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah yang disalurkan	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
RAG.00 1	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	17	17	17	100
102	Sarana Pengolahan Telur	1	1	1	100
103	Sarana Pengolahan Susu	3	3	3	100
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100
105	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100
107	Sarana Pasar Ternak	4	4	4	100
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100
RBK.00 1	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	18	18	18	100
102	Prasarana Pengolahan Telur	1	1	1	100
103	Prasarana Pengolahan Susu	2	2	2	100
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100
105	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100
107	Prasarana Pasar Ternak	4	4	4	100
108	Prasarana Tata Niaga	2	2	2	100
109	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100
Jumlah		35	35	35	100
Rata-Rata Tingkat Kemanfaatan					100

Sumber: Direktorat PPHNak, Ditjen PKH, 2024

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Apabila



dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100,00%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 100,00% atau masuk dalam kategori “**Berhasil**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 92,59%, maka capaian indikator sasaran program ini sebesar 108,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90,20%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 110,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,82%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 122,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 85%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 108,93%.

Tabel 42 Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	15,00	15,00	2,00	5,00	1,00
Realisasi ISP (%)	29,60	8,21	13,52	5,26	6,15
Capaian ISP (%)	120,00	54,73	120,00	105,20	120,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah tahun 2024 sebesar 95%, maka capaian indikator sasaran program ini mencapai 105,26%.

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	87,00	90,00	92,00	95,00	105,26
Realisasi IKSP (%)	-	81,82	90,20	92,59	100,00	



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2024 sebesar 100,00 %. Apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 91,19%, maka realisasi kinerja saat ini telah mencapai 109,66%..

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tingkat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, diantaranya:

1. Ketepatan pemilihan lokasi penerima sarpras pada saat CP/CL;
2. Ketepatan jenis dan spesifikasi sarpras dengan kebutuhan penerima, yang sebelumnya dilakukan pada saat RKP (Rencana Kebutuhan Penerima);
3. Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan;
4. Kondisi sarana prasarana (kondisi baik dan tidak rusak);
5. Tingkat pemahaman dan keterampilan personil yang mengoperasikan sarana pengolahan;
6. Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2023) berjumlah 35 unit terdiri dari 17 unit sarana prasarana pengolahan dan 18 unit sarana prasarana pemasaran hasil peternakan. Jenis sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 12. Total 35 unit fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2023 telah termanfaatkan semuanya.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat sarana prasarana yang diberikan;
- 2) Bantuan sarana prasarana pengolahan pemasaran yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi;
- 3) Komitmen dari penerima manfaat dalam memanfaatkan sarana prasarana yang diberikan;
- 4) Koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan terlaksana dan termanfaatkan dengan baik;
- 5) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 6) Monitoring dan Evaluasi kegiatan sarana prasarana secara berkala dan terjadwal;



- 7) Konsistensi dalam menjaga mutu produk dan memanfaatkan sarpras yang diberikan

Sasaran Program 7 (SP7) MENINGKATNYA DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN

Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua negara di dunia berlomba-lomba meningkatkan ekspor dari berbagai sektor untuk menyumbang devisa negara. Sektor pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu komoditas yang terus didorong untuk dapat meningkatkan neraca perdagangan di Indonesia. Beberapa komoditas peternakan dan Kesehatan hewan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti obat hewan dan produk unggas. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan agar mampu mendorong peningkatan nilai ekspor untuk menyumbang devisa negara.

SP7. IKU 9 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 1,00%	Realisasi 1,21%
% Capaian 120,00% (Berhasil)	

Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan nilai ekspor terhadap target tahun 2024.

Cara perhitungan Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan (A^t) ($t=2024$) dikurangi akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$), dibagi dengan akumulasi nilai ekspor produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2023$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Lampiran 13.



a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Peertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 adalah sebesar 1,21%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 1,00%, maka realisasi Indikator mencapai 120,00% atau masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Realisasi ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan per kelompok komoditas tahun 2003-2024 dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44 Realisasi Capaian Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Per Kelompok Komoditas Tahun 2023-2024

No	Kelompok Komoditas	Jan-Des 2023		Jan-Des 2024*		Perbandingan 2024/2023 (%)	
		Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol	Nilai
1	Hewan Hidup	410,56	6.516,13	253,95	5.670,72	-38,15	-12,97
2	Produk Pangan	205.521,52	1.044.411,90	279.423,09	1.075.491,53	35,96	2,98
3	Produk Non Pangan	165.029,20	198.490,77	162.998,75	205.434,65	-1,23	3,50
4	Obat Hewan	71.157,15	87.672,81	46.341,11	65.770,64	(34,87)	(24,98)
5	Benih dan Bibit	1.073,74	2.156,27	1.045,38	3.029,08	(2,64)	40,48
TOTAL		443.192,17	1.339.247,88	490.062,28	1.355.396,62	10,58	1,21

Sumber : BPS & Pusdatin Kementan 2024, diolah Direktorat PPHNak, 2024

*) Angka Sementara Desember 2024

Berdasarkan Tabel 44, Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan per Kelompok Komoditas tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Peningkatan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan berhasil mencapai yang ditargetkan. Artinya, yaitu realisasi nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024 berdasarkan angka sementara Desember 2024 secara total keseluruhan telah berhasil mencapai yang ditargetkan, yaitu mencapai sebesar USD1,36 Miliar atau meningkat 1,21% jika dibandingkan dengan total nilai ekspor Desember 2023 sebesar USD 1,33 Miliar.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 1,21%. atau menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 5,26% jika dilihat pada Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023. Demikian pula apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 hingga tahun 2020, maka realisasi kinerja Indikator Sasaran Program (ISP) ini mengalami penurunan secara signifikan. Tabel target dan realisasi kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 45.



Tabel 45 Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	15,00	15,00	2,00	5,00	1,00
Realisasi ISP (%)	29,60	8,21	13,52	5,26	1,21
Capaian ISP (%)	120,00	54,73	120,00	105,20	120,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 1,21% atau mencapai 120,00%, sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 1,00%. Namun demikian apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir tahun (2024) dari Renstra Ditjen PKH tahun 2020-2024 sebesar 30,00%, maka Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 hanya mampu mencapai 4,03% atau belum berhasil.

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2024 terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	4,03
Realisasi IKSP (%)	29,60	8,21	13,52	5,26	1,21	

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 1,21% atau mencapai 120,00% dari target, sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Namun apabila dibandingkan dengan target Kementerian Pertanian sebesar 9,96%, maka indikator kinerja sasaran program Ditjen PKH mencapai 12,15%.



e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala

Berdasarkan Tabel 44 Realisasi Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Per Kelompok Komoditas Tahun 2023-2024 dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang menyumbang capaian kinerja peningkatan ekspor berasal dari produk pangan segar dan olahan (naik 2,98% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan naik 35,96% untuk pertumbuhan volume ekspor), produk non pangan (naik 3,50% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan turun 1,23% untuk pertumbuhan volume ekspor), serta benih dan bibit ternak (naik 40,48% untuk pertumbuhan nilai ekspor, sedangkan untuk pertumbuhan volume ekspor turun 2,64%).

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor untuk produk peternakan diantaranya:

- a) Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia pada pertengahan tahun 2022. Hingga Desember 2023 pihak Singapore *Food Agency* (SFA) telah melakukan audit ke 8 unit usaha perunggasan yang sudah dan akan melakukan ekspor ke Singapura.
- b) Adanya peningkatan volume dan nilai ekspor produk pangan terutama produk telur yang peningkatan volume ekspor sebesar 366,42% dan nilai ekspor mencapai 299,47% jika dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor pada tahun 2023.
- c) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.

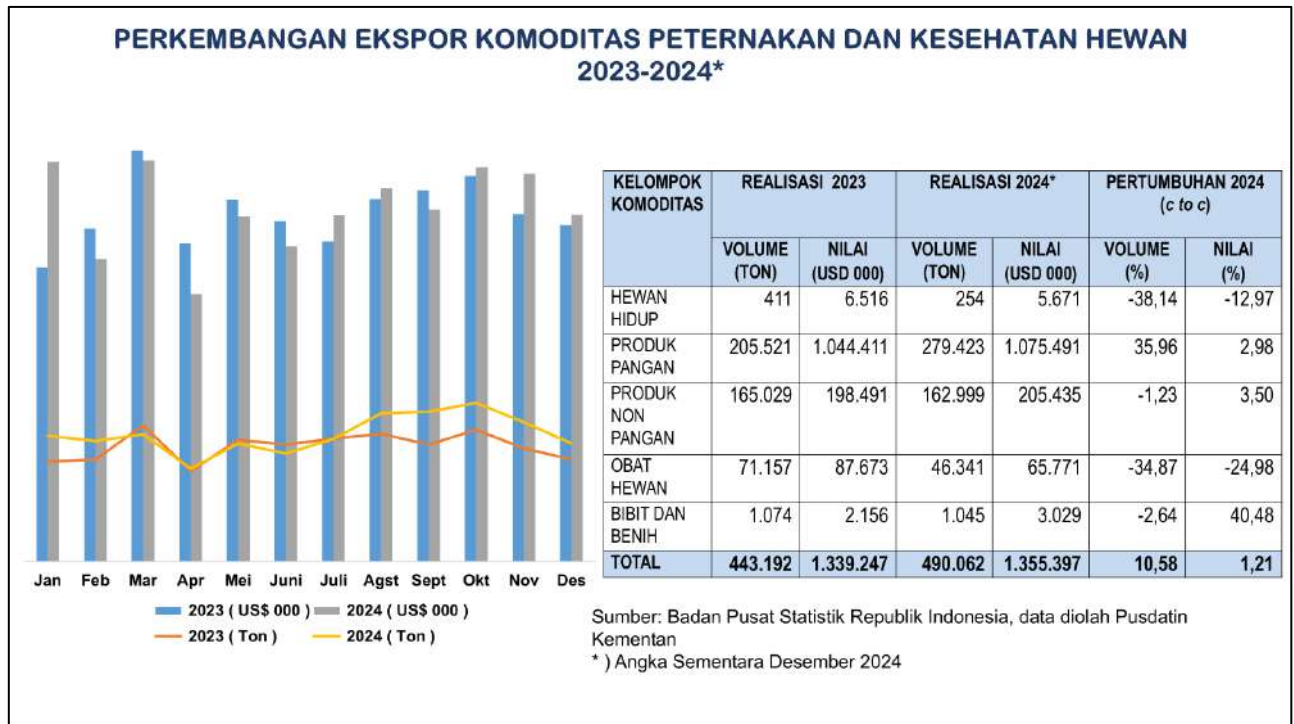
Rincian Capaian Realisasi per komoditas peternakan dan Kesehatan hewan dapat dilihat pada Lampiran 13. Secara rinci Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Grafik 6.

Penurunan ekspor pada tahun 2024 terjadi pada kelompok komoditas hewan hidup (turun 12,97% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan turun 38,15% untuk pertumbuhan volume ekspor) dan obat hewan (turun 24,98% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan turun 34,87% untuk pertumbuhan volume ekspor).

Penurunan ekspor secara signifikan terjadi untuk kelompok hewan hidup terjadi pada ternak unggas sebesar 35,16% (untuk nilai pertumbuhan ekspor) dan 59,01% (untuk volume pertumbuhan ekspor). Penurunan ekspor unggas hidup terjadi karena sebagian besar nilai ekspor ke negara tujuan Timor Leste terhenti akibat pada tahun 2024 ada pergantian kepemimpinan di Timor Leste, sehingga pemerintah yang baru meminta dilakukan ulang *Import Risk Assessment* (IRA) yang telah dilaksanakan pada



17-23 September 2025. Hal ini menyebabkan ekspor pada 9 (Sembilan) unit usaha yaitu PT. Icon Niaga Internusa, PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT. Super Unggas Jaya, PT. Dua Putra Utama, PT. Ciomas Adisatwa, PT. Rumah Makan Delta Sari Indah, PT. Sukanda Djaya, PT. Cisarua Mountain Dairy and PT. Suryagati Nusaraya menjadi tertunda pada tahun 2024.



Grafik 6 Perkembangan Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023-2024

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili melalui surat Brafaks telah menyampaikan hasil *audit Import Risk Assessment* (IRA) Pemerintah Timor Leste pada Tanggal 17-23 September 2024 pada beberapa unit usaha tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 20 Januari 2025 telah mengirimkan surat ke para pelaku usaha terkait Pemberitahuan Hasil *Import Risk Analysis* (IRA) Timor Leste, disampaikan bahwa unit usaha tersebut telah lulus uji IRA dan disetujui untuk melakukan ekspor ke Timor Leste dengan rincian perusahaan dan jenis produk terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap unit usaha dapat segera merealisasikan ekspor produk dimaksud dengan dilengkapi persyaratan pengeluaran produk hewan (*Veterinary Health Certificate*) dari Indonesia sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai catatan tambahan disampaikan oleh Pihak Karantina dan Biosecurity Timor Leste bahwa setiap ketidaksesuaian terhadap Undang-Undang Pemerintah Timor-Leste akan menyebabkan barang yang diekspor akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan.



Penurunan ekspor untuk hasil ternak juga terjadi pada ternak babi akibat adanya wabah ASF yang melanda Pulau Bulan dan beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu juga masih terdapat hambatan pasar ekspor untuk komoditas kambing dan domba dari Indonesia yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku juga menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya kinerja peningkatan ekspor. Sedangkan untuk kelompok obat hewan juga tercatat terjadi penurunan nilai ekspor produk *premix* dan *lysin* pada tahun 2024, yaitu 44,10% (untuk nilai pertumbuhan ekspor) dan turun 41,38% (untuk volume pertumbuhan ekspor).

Berdasarkan informasi dari eksportir aktif menyampaikan bahwa adanya penurunan aktivitas ekspor obat hewan selama periode Tahun 2024 disebabkan adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbatasan tersedianya armada pengangkutan melalui laut (kapal) serta bertambah jauhnya rute tempuh karena adanya konflik di beberapa negara.
- 2) Pada periode tertentu terdapat penurunan permintaan terhadap sediaan obat hewan dari Indonesia karena adanya produk serupa produksi cina dengan harga yang lebih murah dengan selisih harga sekitar 20%.
- 3) Dibutuhkan produk lain yang dapat diorder secara berkelanjutan, namun produk ini masih dalam tahap pendaftaran/registrasi di Kementan ataupun KLHK karena adanya kandungan GMO.
- 4) Masih terbatasnya jumlah produsen obat hewan di Indonesia mengingat unit usaha ini membutuhkan biaya yang besar. Hingga saat ini hanya 116 produsen yang terdaftar di Indonesia. Dengan jumlah produsen yang terbatas, maka jumlah produk obat hewan hanya sedikit dan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Perlu effort yang lebih besar untuk menumbuhkan minat pelaku usaha untuk membuka produksi obat hewan, misal mempermudah ijin, bimbingan sertifikasi CPOHB sesuai skala usaha, bantuan modal, jaminan distribusi produk yang konsisten serta pembatasan sediaan jadi dari importasi.
- 5) Jumlah unit usaha eksportir obat hewan yang aktif melakukan kegiatan masih sangat terbatas
- 6) Bahan baku untuk produksi sebagian besar merupakan sediaan yang berasal dari importasi
- 7) Kurang aktifnya kegiatan yang bersifat promosi ke negara pengimpor, sehingga perlu peran aktif pemerintah melalui atase pertanian atase perdagangan yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia untuk dapat membuka peluang ekspor.

Dalam melakukan ekspor ternak dan hasil ternak beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia diantaranya:

- a) Masih adanya proses *G to G* yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor;



- b) Status Penyakit Hewan seperti PMK, LSD, dan ASF menghambat eksportasi hewan hidup, antara lain: ekspor babi ke Singapura, ekspor kambing ke Malaysia, dan domba ke Brunei Darussalam.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor komoditas peternakan dan Kesehatan hewan, maka Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan negara tujuan dalam pemenuhan persyaratan terkait adanya kasus PMK dan ASF di Indonesia.
- b) Pemerintah melalui Ditjen PKH terus berupaya secara maksimal untuk mengendalikan penyebaran PMK dan ASF di wilayah NKRI.
- c) Tim percepatan ekspor Ditjen PKH melakukan penyelesaian proses penyelesaian *G to G* dengan beberapa negara melalui pendekatan dengan KBRI maupun atase pertanian dan perdagangan yang ada melalui promosi produk ke beberapa negara (Denmark, Jepang, dan Uni Emirat Arab).

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH dalam meningkatkan ekspor komoditas peternakan dan Kesehatan hewan yaitu:

- a) Pada tahun 2024, Ditjen PKH telah menerbitkan sertifikat kompartemen bebas AI sebanyak 287 unit usaha tersebar di 20 provinsi dan dapat dilihat melalui <https://ditjenpkih.pertanian.go.id/pages/45-kompartemen-bebas-phm>.
- b) Pada tahun 2024 telah dilakukan upaya pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan provinsi dan UPT lingkup Ditjen PKH. Melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor.
- c) Ditjen PKH melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor).
- d) Peningkatan status kesehatan hewan melalui penerapan kompartementalisasi bebas penyakit sebagai salah satu persyaratan produk peternakan yang akan diekspor.
- e) Peningkatan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pasca panen dan pengolahan.



- f) Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak baik di tingkat nasional.
- g) Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral.
- h) Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K).

Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditi ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Upaya lain adalah dengan mempertemukan antara pelaku usaha peternakan dengan calon *buyer* di negara tujuan, seperti di Jepang yang saat ini telah lancar melakukan eksportasi olahan daging ayam, kita juga mendorong agar produk UMKM Indonesia seperti abon, rendang daging kambing kaleng, dan rendang daging sapi juga bisa dibeli oleh buyer yang sama.

- i) Meningkatkan frekuensi pengiriman. Upaya peningkatan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Tabel 44 dari rincian capaian peningkatan ekspor dari kelima kelompok komoditas terlihat bahwa kontribusi terbesar yang menyumbang capaian kinerja peningkatan ekspor berasal dari produk pangan segar dan olahan (naik 3,15% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan naik 35,38% untuk pertumbuhan volume ekspor), produk nonpangan (naik 3,67% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan naik 1,33% untuk pertumbuhan volume ekspor), serta benih dan bibit ternak (naik 34,30% untuk pertumbuhan nilai ekspor, sedangkan untuk pertumbuhan volume ekspor turun 11,55%).

Penurunan ekspor baik volume maupun nilai pada tahun 2024 terjadi pada kelompok komoditas hewan hidup (turun 19,13% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan untuk pertumbuhan volume ekspor turun 39,04%) dan obat hewan (turun 30,13% untuk pertumbuhan nilai ekspor dan untuk pertumbuhan volume ekspor turun 40,75%). Penurunan ekspor secara signifikan terjadi untuk kelompok hewan hidup terjadi pada ternak unggas sebesar 35,90% (untuk nilai pertumbuhan ekspor) dan 59,80% (untuk volume pertumbuhan ekspor). Demikian pula pada ternak babi akibat adanya wabah



ASF yang melanda Pulau Bulan dan beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu juga masih terdapat hambatan pasar ekspor untuk komoditas kambing dan domba dari Indonesia yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku juga menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya kinerja peningkatan ekspor. Sedangkan untuk kelompok obat hewan juga tercatat menurun 30,13% (untuk nilai pertumbuhan ekspor) dan turun 40,75% (untuk volume pertumbuhan ekspor) yang disebabkan karena penurunan nilai ekspor produk *premix* dan *lysine* pada tahun 2024.

Berdasarkan informasi dari eksportir aktif, memang terjadi penurunan aktivitas ekspor obat hewan selama periode Tahun 2024 dengan beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbatasan tersedianya armada pengangkutan melalui laut (kapal) serta bertambah jauhnya rute tempuh karena adanya konflik di beberapa negara.
- 2) Pada periode tertentu terdapat penurunan permintaan terhadap sediaan obat hewan dari Indonesia karena adanya produk serupa produksi cina dengan harga yang lebih murah dengan selisih harga sekitar 20%.
- 3) Dibutuhkan produk lain yang dapat diorder secara berkelanjutan, namun produk ini masih dalam tahap pendaftaran/registrasi di Kementan ataupun KLHK karena adanya kandungan GMO.
- 4) Masih terbatasnya jumlah produsen obat hewan di Indonesia mengingat unit usaha ini membutuhkan biaya yang besar. Hingga saat ini hanya 116 produsen yang terdaftar di Indonesia. Dengan jumlah produsen yang terbatas, maka jumlah produk obat hewan hanya sedikit dan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Perlu effort yang lebih besar untuk menumbuhkan minat pelaku usaha untuk membuka produksi obat hewan, misal mempermudah ijin, bimbingan sertifikasi CPOHB sesuai skala usaha, bantuan modal, jaminan distribusi produk yang konsisten serta pembatasan sediaan jadi dari importasi.
- 5) Jumlah unit usaha eksportir obat hewan yang aktif melakukan kegiatan masih sangat terbatas
- 6) Bahan baku untuk produksi sebagian besar merupakan sediaan yang berasal dari importasi
- 7) Kurang aktifnya kegiatan yang bersifat promosi ke negara pengimpor, sehingga perlu peran aktif pemerintah melalui atase pertanian atase perdagangan yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia untuk dapat membuka peluang ekspor.

Ekspor unggas hidup Sebagian besar ke Timor Leste. Namun demikian, pada tahun 2024 ada pergantian kepemimpinan di Timor Leste, sehingga pemerintah yang baru meminta dilakukan ulang *Import Risk Assessment* (IRA) yang telah dilaksanakan pada 17-23 September 2024. Hal ini menyebabkan ekspor pada 9 (Sembilan) unit usaha yaitu PT. Icon Niaga Internusa, PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT. Super Unggas Jaya, PT. Dua Putra Utama, PT. Ciomas Adisatwa, PT. Rumah Makan Delta Sari



Indah, PT. Sukanda Djaya, PT. Cisarua Mountain Dairy and PT. Suryagati Nusaraya menjadi tertunda pada tahun 2024.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili melalui surat Brafaks telah menyampaikan hasil audit Import Risk Assessment (IRA) Pemerintah Timor Leste pada Tanggal 17-23 September 2024 pada beberapa unit usaha tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 20 Januari 2025 telah mengirimkan surat ke para pelaku usaha terkait Pemberitahuan Hasil *Import Risk Analysis* (IRA) Timor Leste, disampaikan bahwa unit usaha tersebut telah lulus uji IRA dan disetujui untuk melakukan ekspor ke Timor Leste dengan rincian perusahaan dan jenis produk terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap unit usaha dapat segera merealisasikan ekspor produk dimaksud dengan dilengkapi persyaratan pengeluaran produk hewan (*Veterinary Health Certificate*) dari Indonesia sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai catatan tambahan disampaikan oleh Pihak Karantina dan Biosecurity TimorLeste bahwa setiap ketidaksesuaian terhadap Undang-Undang Pemerintah Timor-Leste akan menyebabkan barang yang diekspor akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan.

Sasaran Program 8 (SP8)

TERWUJUDNYA BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA

SP8. IKU 10 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 76,91%	Realisasi 79,05%
% Capaian 102,78%	

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional Birokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.



Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024; dan (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang berpengaruh pada perubahan evaluasi dan pengukuran kinerja reformasi birokrasi.

Komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu dimensi RB General yang berfokus pada penyelesaian isu hulu dan RB Tematik yang berfokus pada penyelesaian isu hilir. RB General akan menilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal instansi pemerintah. Sementara RB tematik akan menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat, dalam upaya percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual Presiden berupa pengendalian inflasi dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024, indikator Reformasi Birokrasi (RB) yang sebelumnya merupakan “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” pada saat penyusunan PK awal berubah menjadi “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Nilai Reformasi Birokrasi} = \frac{\sum \text{Bobot Capaian Komponen}}{\sum \text{Nilai Bobot Komponen}} \times 100\%$$

untuk memperoleh Bobot Capaian per komponen, formulanya adalah:

$$\text{Bobot Capaian per Komponen} = \frac{\text{Nilai Capaian per Komponen}}{\text{Range Nilai Maksimal per Komponen}} \times \text{Nilai Bobot per Komponen}$$

Pedoman dalam mengukur capaian kinerja indikator “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” sesuai surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 yaitu:



- Nilai capaian indikator komponen tahun 2024 yang telah dirilis oleh Evaluator Meso yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator Internal yang menilai komponen RB level unit kerja.
- Jika nilai indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) **belum dirilis** oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2023.
- Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk level unit kerja **tidak dihitung** akibat perubahan regulasi dan/ atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2024 level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.
- Capaian indikator RB tematik pengendalian inflasi belum dirilis nilainya pada tahun 2024, sedangkan nilai pada tahun 2023 adalah 0. Untuk itu, capaian pada tahun 2024 dapat ditulis N/A (*Not Available*) dan tidak diperhitungkan pada capaian CNRB.

Tabel 47 Target “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” Tahun 2024

No	Komponen	Range Nilai	TARGET 2024			% CNRB
			Nilai Target	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
	Total RB General & RB Tematik			49	37,68	76,91%
A	RB General			43	33,88	
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	3,00	4	2,40	Cascade
2	Nilai SAKIP	0 - 100	76,00	4	3,04	Cascade
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	89,50	2	1,79	Cascade
4	Capaian IKU	0 - 100	95,00	7	5,05	Cascade
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	85,00	4	3,40	Cascade
6	Indeks BerAKHLAK	0 - 100	80,00	4	3,20	Cascade
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	78,00	10	7,80	Cascade
8	Survei Kepuasan Masyarakat	0 - 100	90,00	8	7,20	Cascade
B	RB Tematik			6	3,80	
1	Pengentasan Kemiskinan	0-2		2	1,2	
2	Realisasi Investasi	0-2		2	1,4	



No	Komponen	Range Nilai	TARGET 2024			% CNRB
			Nilai Target	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
3	Pengendalian Inflasi	0-2		2	1,2	

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, 2025.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 adalah 79,05% dari target sebesar 76,91% atau mencapai 102,78% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun eviden komponen-komponen Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 tercantum dalam Lampiran 14.

Tabel 48 Realisasi “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan” Tahun 2024

No.	Komponen	CAPAIAN 2024			% CNRB
		Nilai Realisasi	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
	Total RB General & RB Tematik		47	37,07	78,87%
A	RB General		43	34,61	
1	Tingkat Maturitas SPIP	3,43	4	2,74	Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Tahun 2024 oleh Itjentan
2	Nilai SAKIP	80,33	4	3,21	Hasil Evaluasi AKIP Ditjen PKH Tahun 2023 oleh Itjentan
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,67	2	1,81	OM SPAN Kemenkeu
4	Capaian IKU	100,00	7	5,62	Rata-rata capaian PK dengan mengeluarkan indikator CNRB



No.	Komponen	CAPAIAN 2024			% CNRB
		Nilai Realisasi	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	94,15	4	3,77	Hasil pengukuran TLHP Itjentan
6	Indeks BerAKHLAK	68,80	4	2,75	Capaian Kementan
7	Survei Penilaian Integritas	74,46	10	7,45	Hasil penilaian SPI Kementan tahun 2024
8	Survei Kepuasan Masyarakat	90,65	8	7,25	Hasil penilaian Biro OK
B	RB Tematik		4	2,46	
1	Pengentasan Kemiskinan	0,96	2	0,96	Capaian tahun 2023
2	Realisasi Investasi	1,5	2	1,50	Capaian tahun 2023
3	Pengendalian Inflasi	0	2	N/A	Tidak diperhitungkan

Sumber: Ditjen PKH, data diolah, 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2023

Dengan terbitnya surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024, maka indikator ini merupakan indikator baru, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Dengan terbitnya surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024, maka indikator ini merupakan indikator baru, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan target kinerja jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian

Realisasi indikator kinerja Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



tahun 2024 sebesar 78,87%. Sementara itu, indikator kinerja Kementerian Pertanian yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2024 dengan target 84,76 Nilai. Terdapat perbedaan indikator sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Reformasi Birokrasi (RB) General yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH yaitu 1) Tingkat maturitas SPIP; 2) Nilai SAKIP; 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; 4) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU); 5) Tindak lanjut rekomendasi; 6) Indeks BerAKHLAK; 7) Survei Penilaian Integritas; dan 8) Survei Kepuasan Masyarakat. Capaian RB General Ditjen PKH yang melebihi target diupayakan melalui implementasi setiap indikator komponen RB General yang berpedoman pada peraturan yang berlaku diikuti dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut serta koordinasi dengan unit kerja dan *stakeholder* terkait.

Selanjutnya, untuk Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH yaitu 1) Pengentasan kemiskinan; 2) Realisasi investasi; dan 3) Pengendalian inflasi. Pada indikator Pengentasan Kemiskinan, kegiatan yang mendukung yaitu pengembangan ternak ayam lokal yang dilengkapi dengan bantuan pakan, vitamin dan obat, serta biaya pembuatan kandang sebanyak 4.000 ekor untuk 8 (delapan) kelompok penerima manfaat dengan rincian:

- a. Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.500 ekor untuk 3 kelompok penerima manfaat.
- b. Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sebanyak 500 ekor untuk 1 kelompok penerima manfaat.
- c. Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sebanyak 1.000 ekor untuk 2 kelompok penerima manfaat.
- d. Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 ekor untuk 2 kelompok penerima manfaat.

Untuk indikator Pengendalian Inflasi, kegiatan yang mendukung yaitu Optimalisasi Reproduksi dengan pemberian bantuan semen beku dan N2 cair pada 36 provinsi yang telah ditetapkan; Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi; koordinasi stabilisasi produksi daging ayam ras dan telur ayam ras. Selanjutnya, untuk indikator Peningkatan investasi subsektor peternakan memiliki 3 (tiga) rencana aksi, yaitu: (1) pelayanan berizin berusaha peternakan; (2) penyediaan informasi kemudahan informasi (investasi); dan (3) fasilitasi investasi.

1) Pelayanan Perizinan Berusaha Peternakan

Pelayanan perizinan peternakan dengan rincian kegiatan monitoring dan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui OSS dengan target tahunan



terlaksana 100%. *Assesment* persyaratan Teknis Ijin Usaha Bidang Peternakan dalam OSS (Online Single Submission) untuk 26 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia):

- a) Dokumen Pemenuhan Persyaratan Teknis berupa:
 - Surat pernyataan berupa kesanggupan memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha pada Permentan No. 15 tahun 2021 sesuai dengan KBLI bidang usahanya;
 - Surat pernyataan kesanggupan memenuhi prasyarat instalasi pengolahan limbah, dan disertai lampiran izin lingkungan dari dinas terkait (apabila pelaku usaha merupakan pelaku usaha lama dan hanya pembaharuan di OSS);
 - Surat pernyataan berisi keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan (farm).
- b) Pada 2024 terdapat 7 (tujuh) pengajuan perizinan berusaha via OSS dan telah dilakukan verifikasi atas dokumen yang dipersyaratkan yaitu:
 - PT. QL Agrofood
 - PT. Aqua Birdnest
 - PT. Gold Coin Indonesia
 - PT. Wahtat Natural Farm and Trading
 - PT. Lohongka Indonesia
 - PT. Talent Joint Indonesia
 - PT. Ground Source Grup)
- c) Kendala/Permasalahan:
 - Pelaku usaha baru sebagian masih belum memahami sistem perizinan OSS;
 - Beberapa perusahaan dilaporkan mengisi jenis usaha resiko rendah saat mengajukan perizinan via OSS, sehingga tidak diperlukan verifikasi oleh kementerian teknis, namun perusahaan dimaksud merealisasikan usaha dengan resiko tinggi;
 - Perizinan dengan OSS diberlakukan sejak tahun 2019/2020, akan tetapi perizinan sebelumnya yang menggunakan manual tetap harus dimigrasikan ke OSS, sehingga pelaku usaha merasa terbebani dengan dua kali mengurus izin;
 - DPMPTSP di daerah masih ada yang mengeluarkan izin untuk pelaku usaha PMA, yang seharusnya merupakan kewenangan Pusat.
 - Perizinan berusaha peternakan belum menjadi satu rangkaian dengan perizinan UMKU bidang peternakan. Jadi perizinan berusaha belum menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam mengurus perizinan UMKU sehingga mengakibatkan pemilik izin UMKU belum tentu memiliki izin usaha peternakan. Kondisi seperti ini pemilik izin UMKU belum tentu turut mendukung pengembangan usaha peternakan.



d) Upaya Tindak Lanjut

- Berkoordinasi dengan Pusat PVTPP terkait sosialisasi baik ke daerah maupun kepada pelaku usaha baik yang perluasan maupun yang baru, dengan target semua pelaku usaha memahami SOP perizinan berusaha;
- Usulan revisi regulasi untuk memberikan form isian tentang surat pernyataan, sehingga pelaku usaha lebih jelas dan terdapat keseragaman surat pernyataan sebagai pemenuhan persyaratan;
- Perlu dilakukan monitoring, setelah 6 bulan terbit izin, perusahaan harus melakukan pelaporan perkembangan produksi dan kemitraan.
- Perlu dilakukan pengawasan terhadap 3 komitmen yang telah ditandatangani oleh direksi perusahaan.

2) Penyediaan Informasi Kemudahan Informasi (Investasi)

Dalam upaya mendorong investasi bidang peternakan dilakukan penyediaan informasi kemudahan investasi berupa informasi/profil investasi pada daerah yang memiliki potensi dan peluang investasi bidang peternakan. Tujuannya adalah untuk bahan promosi ataupun sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk mempermudah menyusun ataupun menentukan rencana investasi bidang peternakan. Informasi/profil investasi dimaksud antara lain berupa adalah *Investment Project Ready to Over* (IPRO), Memo info dan/atau profil investasi.

Penyediaan informasi melalui kegiatan penyusunan leaflet dan profil investasi dengan target tahun 2024 sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen yaitu Memo Info sapi potong Kabupaten Jombang dan Memo Info Sapi Perah Kabupaten Lombok Timur.

Permasalahan:

- Anggaran untuk penyusunan bahan promosi dalam bentuk *Investment Project Ready to Over* (IPRO) dan Memo info memerlukan anggaran yang cukup besar.
- Dinas yang menangani fungsi peternakan masih belum dapat maksimal memahami dan mengetahui tata cara penyusunan bahan promosi.

3) Fasilitasi Investasi

Fasilitasi investasi dilaksanakan melalui pendampingan calon investor bidang peternakan yang berencana melakukan investasi di bidang peternakan. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon investor mulai dari pendampingan pengurusan perizinan berusaha, pencarian lahan, koordinasi dengan pemerintah daerah tempat lokasi farm, koordinasi dengan DPMPSTSP daerah, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Beberapa kegiatan fasilitasi investasi pada tahun 2024 antara lain:



- Fasilitasi/pendampingan lanjutan PMA asal Vietnam PT TH Group. Pendampingan investor TH Group dilaksanakan di beberapa lokasi sejak bulan Oktober-Desember 2024. Lokasi yang disurvei diantaranya sebagai berikut:
 - (1) Napu, Sulawesi Tengah (3.594 ha)
 - (2) Gowa, Sulawesi Selatan (900 ha)
 - (3) Wajo, Sulawesi Selatan (13.458 ha)
 - (4) Seko Sulawesi Selatan (39.476 ha)
 - (5) Barito Utara, Kalimantan Tengah (10.270 ha)
- Kendala
 - (1) Napu, Sulawesi Selatan

Lahan seluas 3.594 ha telah dikonfirmasi oleh Badan Bank Tanah melalui surat resmi ke Dirjen PKH bahwa yang tersedia hanya seluas 2.883,23 ha. Hal ini perlu di *clear* kan ke pihak investor.
 - (2) Gowa, Sulawesi Selatan
 - ✓ Luas lahan 900 ha relatif kecil menurut pihak investor sehingga masih kurang untuk dilakukan pengembangan.
 - ✓ PT. TH Group kurang tertarik dengan lahan di Gowa karena luas lahan terpecah dua lokasi yang terpisah, dimana 200 ha dalam satu hamparan dengan sumber air yang cukup. Sementara 700 ha lainnya di berada di lokasi yang berdampingan dengan perkampungan.
 - (3) Wajo, Sulawesi Selatan
 - ✓ Lahan seluas 13.485 ha dengan hamparan yang cukup luas.
 - ✓ PT. TH Group menyetujui lokasi Wajo sebagai salah satu untuk investasi akan tetapi diperlukan kelengkapan data informasi terkait lahan yang akan digunakan.
 - (4) Seko, Sulawesi Selatan
 - ✓ Lahan yang berlokasi di Seko Kab. Luwu Utara dengan total luas lahan potensial 39.476,02 ha terdapat beberapa tantangan/permasalahan diantaranya permasalahan topografi dengan kondisi berbukit dan lereng, infrastruktur dan akses yang kurang memadai, jenis dan kondisi tanah yang kurang sesuai, serta curah hujan yang relatif tinggi. Hal tersebut menurut pandangan investor bahwa lahan seko untuk dilakukan pengembangan peternakan membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga dianggap tidak feasible.
 - ✓ Selain itu, investasi dari pemerintah akan sangat besar untuk menyiapkan Seko sebagai kawasan pengembangan peternakan. Dengan demikian, lahan Seko saat ini belum menjadi prioritas bagi investor TH Group untuk menjadi opsi pengembangan sapi perah. Namun pada prinsipnya keputusan



mengenai Seko tetap akan dipertimbangkan dan ditentukan di level pimpinan TH Group.

(5) Barito, Kalimantan tengah

- ✓ Survey dilakukan di desa Batu Raya-Ngurit di Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara dengan luas yang ditawarkan 10.270 Ha yang merupakan kawasan hutan produksi membentang di Kab. Barito Utara dan Kab. Barito Selatan yang secara kondisi topografi dan jenis tanah cocok untuk peternakan. Namun dari pihak TH Group menganggap hanya 70% atau sekitar 7.000 Ha yang sesuai untuk pengembangan farm sapi perah, karena diatas lahan tersebut terdapat banyak pepohonan/tegakan mengingat lahan merupakan kawasan hutan produksi sehingga diperlukan reklamasi dan land clearing terhadap lahan tersebut.
- ✓ Ketersediaan sumber air juga menjadi tantangan karena disekitar lahan hanya terdapat sungai-sungai kecil.
- ✓ TH Group masih membutuhkan tambahan lahan seluas 5.000 Ha lagi untuk pengembangan farm di lahan tersebut.
- Tindak lanjut
 - (1) Data teknis terkait curah hujan, analisis NPK tanah, pemetaan lahan yang clean and clear, dan aspek-aspek teknis lainnya akan disiapkan oleh stakeholder sesuai kewenangannya.
 - (2) Setelah melakukan site visit survey ke berbagai lokasi tersebut, TH group telah memutuskan investasi di 3 lokasi yaitu Napu, Wajo, dan Barito Utara.
 - (3) Chairwoman TH Group berencana ke Jakarta di awal Januari 2025 untuk finalisasi, dan ingin bertemu dengan Presiden jika memungkinkan.
 - (4) Pimpinan TH Group juga akan menyesuaikan waktu untuk pertemuan dengan Menteri Pertanian, Harapannya ketika Sekjen PKV berkunjung ke Indonesia (rencana Maret 2025) telah terdapat *investment certificate*.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Ditjen PKH telah mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi dengan bentuk kegiatan antara lain:

- 1) Penilaian Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Veteriner, yang menjadi contoh bagi Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2024.
- 2) Kenaikan Loka Jayapura menjadi Balai Veteriner Jayapura sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024.



- 3) Pembinaan Budaya Kerja BerAKHLAK, dengan pengisian survei BerAKHLAK untuk seluruh ASN Ditjen PKH sebanyak 1.813 orang dengan capaian 100%.
- 4) Pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dengan capaian semester 1 tahun 2024 adalah 90,21 masuk dalam predikat A (Sangat Baik).
- 5) Penilaian Mandiri Zona Integritas Ditjen PKH dengan cara *cross assessment* yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- 6) Penyelesaian usulan Jabatan Fungsional baru (Penata Perijinan).
- 7) Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai : 4 orang .
- 8) Pengusulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya secara rutin berkala, dengan penetapan penghargaan 92 orang pegawai .
- 9) Penyelesaian Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja UPT BVet Jayapura (Medik Pertama 15, Medik Muda 8, Paramedik mahir 6, Paramedik Terampil 10, Paramedik pemula 5).
- 10) Penyelesaian Rekomendasi Jabatan Fungsional RIHP bagi Dinas Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
- 11) Penyusunan Pedoman Rekomendasi Jabatan Fungsional RIHP bagi Dinas Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
- 12) Melaksanakan Pelatihan Teknis untuk peningkatan kompetensi Pegawai, sesuai dengan tuntutan kebutuhan bagi 2.827 pegawai, terdiri atas PNS 1.778 orang, P3K: 34 orang, Honorer/PPNP: 1.015 orang.
- 13) Dukungan peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar 34 orang (S2: 29 orang, S3: 5 orang).
- 14) Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Peringkat IV Lingkup Kementerian Pertanian (TU) □ Kategori AA (sangat memuaskan).
- 15) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS) mendapatkan penghargaan Terbaik 1 Kategori Kementerian (Ditjen PKH menjadi salah satu sampel EPSS Kementan).
- 16) Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Peternakan mendapatkan penghargaan Bhumandala Awards Tahun 2024 kategori Nawasena IGT atau Pendatang Baru Terbaik.
- 17) Perbaikan Kualitas Data Produktivitas Susu melalui Survei Produktivitas Susu.
- 18) Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Berbagi Pakai Data Hasil ST2023 dan Data Pemotongan Ternak dengan BPS RI serta Publikasi Data dalam Buku Statistik Nasional PKH dan Statistik Indonesia BPS RI.
- 19) Penerbitan dokumen perizinan/rekomendasi ekspor/impor sebanyak 33.746 dokumen serta dokumen pendaftaran/registrasi/sertifikasi sebanyak 1.812 dokumen.
- 20) Pengembangan SIMREK (Sistem Rekomendasi) PKH pada Pengajuan Summary Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan.
- 21) Pengembangan SIMPOL (Sistem Pendaftaran On Line) PKH utk Pelaporan Registrasi Produk Hewan dan Pengajuan Permohonan CPOHB.



- 22) Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Perizinan/Rekomendasi Bidang PKH.
- 23) Penyusunan draft Renstra Ditjen PKH Renstra Sekditjen PKH Tahun 2025-2029 (Proses Finalisasi).
- 24) Tersusunnya PK Dirjen PKH (68 Perjanjian Kinerja).
- 25) Tersusunnya Rencana Kerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025.
- 26) Tersusunnya Pembagian Lokasi Kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Permentan 3 Tahun 2024 sebagai lampiran revisi Kepmentan No 472 Tahun 2018).
- 27) Pengusulan Prioritas Strategis Nasional (PSN) Peningkatan Produksi daging sapi dan susu sapi beserta lokasinya dalam RPJMN 2025-2029.
- 28) Perbaikan dan penyusunan dokumen perencanaan (Roadmap): (i) Sinergi UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; (ii) Roadmap SBSN UPT PKH.
- 29) Pengembangan Aplikasi Prenjak (untuk perbaikan database dan efektivitas penyusunan program lingkup Ditjen PKH).
- 30) Perbaikan SOP penyusunan perencanaan kerja program dan kegiatan.
- 31) Penyusunan DIPA 2025 di 64 Satker.
- 32) Perbaikan Sistem Penganggaran Ditjen PKH sesuai RSPP.
- 33) Restrukturisasi posting dan costing belanja 002: a) Penyesuaian anggaran pakan; b) anggaran pemeliharaan menyesuaikan RKBMN, c) mengusulkan belanja UPT menjadi belanja madatori.
- 34) Inisiasi Penyusunan SBKK (20 RO) dan SBKU 9 RO sebagai acuan dalam penuangan anggaran dan penetapan target kegiatan.
- 35) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
- 36) Analisis dan rancangan penyesuaian Anggaran PKH 2025 Pasca Refocusing.
- 37) Capaian Kualitas Perencanaan Anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) s.d. Oktober 2024 senilai 85,91 dari 100 (Baik).
- 38) Perbaikan SOP revisi Anggaran lingkup Ditjen PKH.
- 39) Pemanfaatan Hibah Luar Negeri Untuk Mendukung Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 40) Ditjen PKH menjadi Lead Ministry untuk proyek The Global Environment Facilities (GEF) ke-8 Food Systems Integrated Program (FSIP).
- 41) Evaluasi Hibah 2024 dan perbaikan tatakelola/SOP Hibah.
- 42) Perbaikan Tata Kelola/SOP perjalanan dinas luar negeri.
- 43) PP No. 34/2024 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
- 44) Permentan No. 10/2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
- 45) Permentan No. 11/2024 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan.



- 46) Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/ 2023/PN.Dpu, di PN Dompu, Perkara Perdata No. 81/Pdt.G/ 2023/PN.Pwt di PN Purwokerto, Perkara perdata No.1040/Pdt.G/ 2023/PN.Jkt.Brt PN Jakbar, Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Sel di PN Jaksel, Perkara Perdata No. 249/Pdt.G /2024/PN.Jkt.Pst di PN Jakpus. (5 perkara perdata).
- 47) Sengketa Informasi Publik No. 043/V/KIP-PSI/2024 di Komisi Informasi Pusat; Unit Kerja Terkait: BPTU-HPT Padang Mangatas, BPMSOH, dan BVet Lampung.
- 48) Perkara PKPU No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; Unit Kerja Terkait: BBVet Farma Pusvetma.
- 49) NK antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perhubungan, NK Antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia, NK Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Rangka Pemberian Hibah, NK antara Menteri Pertanian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (4 Nota Kesepahaman).
- 50) PKS antara Direktur Jenderal PKH dengan Kepala BPJPH dan PKS Antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat. (2 PKS).
- 51) Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Sekretaris Utama BNPB.
- 52) Peringkat ke-II Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kategori khusus sebagai Unit Kerja dengan Komitmen Pimpinan Terbaik.
- 53) Inovasi pustakaan Talk (Perpus Talk) yang menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu.
- 54) Inovasi menyediakan buku dan Form Informasi Publik dalam bentuk buku Braille, khusus untuk pemohon disabilitas.

Sasaran Program 9 (SP9)

TERWUJUDNYA ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

SP9. IKU11	
Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target	Realisasi
89,20 Nilai	90,67 Nilai
% Capaian	
101,65% (Sangat Berhasil)	



Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, pemanfaatan nilai IKPA antara lain:

1. Instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.
2. Salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi *General* Kementerian/Lembaga dengan bobot 2 (dua).
3. Salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Kementerian Pertanian dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta komponen penilaian untuk penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, poin utama penilaian IKPA tahun 2024 meliputi 3 (tiga) aspek pengukuran dan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

1. Aspek **kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 2 (dua) indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Aspek **kualitas implementasi pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 5 (lima) indikator: Penyerapan Anggaran; Belanja Kontraktual; Penyelesaian Tagihan; Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP); dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Aspek **kualitas hasil pelaksanaan anggaran** dengan 1 (satu) indikator: Capaian Output.

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator-indikator tersebut di atas dengan pembobotan masing-masing indikator pada seluruh Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (62 satker yang terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat; 23 Satker Kantor Daerah dan 38 Satker Tugas Pembantuan Provinsi). Adapun formula perhitungan IKPA adalah sebagai berikut:



$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^* - \text{Dispensasi SPM}$$

Nilai IKPA sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya, dikategorikan menjadi: i) sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; ii) baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; iii) cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau iv) kurang, apabila nilai IKPA < 70 . Berdasarkan Tabel XX, capaian Nilai IKPA Ditjen PKH tahun 2024 sebesar 90,99 atau dalam kategori “Baik”.

Tabel 49 Nilai IKPA Ditjen PKH Tahun 2024

No.	Periode	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	Desember	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai Bobot	99,66	74,35	92,85	90,33	99,36	95,58	93,84	91,67	100%		1,00	90,67
				Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25					
				Nilai Aspek	9,97	11,15	18,57	9,03	9,94	9,56	23,46					
					87,01			94,53			93,84					

Sumber: OMSPAN, 2025

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Realisasi Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 adalah 90,67 dari target 89, 20 atau mencapai 101,65% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2020-2024

Dengan terbitnya surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024 (Lampiran 4), maka indikator ini merupakan indikator yang baru dilaksanakan di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Ditjen PKH dengan Target Kementerian Pertanian



Realisasi Nilai IKPA Ditjen PKH pada tahun 2024 sebesar 90,67. Apabila dibandingkan dengan target Nilai IKPA Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 89,50 maka capaian Nilai IKPA Ditjen PKH tahun 2024 mencapai 101,31%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan kinerja capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PKH tahun 2024 didukung oleh beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek **kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 2 (dua) indikator:
 - a) Revisi DIPA dengan nilai 10 dari bobot maksimal 10.
 - b) Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 11,15 dari bobot maksimal 15.
2. Aspek **kualitas implementasi pelaksanaan anggaran** yang terdiri dari 5 (lima) indikator:
 - a) Penyerapan Anggaran dengan nilai 18,57 dari bobot maksimal 20.
 - b) Belanja Kontraktual dengan nilai 9,43 dari bobot maksimal 10.
 - c) Penyelesaian Tagihan dengan nilai 9,94 dari bobot maksimal 10.
 - d) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan nilai 9,56 dari bobot maksimal 10.
 - e) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nilai 0,75.
3. Aspek **kualitas hasil pelaksanaan anggaran** dengan 1 (satu) indikator: Capaian Output dengan nilai 21,88 dari bobot maksimal 25.

f. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kendala dalam pencapaian target kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 adalah:

- 1) Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan Satker, termasuk komitmen pimpinan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2) Kebijakan pelaksanaan anggaran yang dinamis sepanjang tahun seperti refocusing anggaran.
- 3) Penyerapan anggaran beberapa Satker lingkup Ditjen PKH masih di bawah target yang telah ditetapkan oleh Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian yaitu sebesar 98%.
- 4) Realisasi anggaran per bulan kurang konsisten terhadap RPD yang telah ditetapkan. Hal ini secara umum diakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana yang telah disusun per bulannya.



- 5) Terdapat kontrak Belanja Modal bernilai antara Rp50-200 Juta yang diselesaikan setelah triwulan I, sehingga mengakibatkan nilai komponen Akselerasi Belanja Modal menjadi tidak optimal.
- 6) Masih terdapat Capaian Output yang mengalami anomali utamanya terkait dengan layanan kesehatan hewan, hasil uji mutu obat hewan, benih dan bibit ternak unggul..

Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai IKPA Ditjen PKH diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengakselerasi belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan target penyerapan anggaran triwulanan;
- 2) Meningkatkan sinergi internal, komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran setiap bulan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang telah disusun. Seluruh Satker agar mengajukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA setiap triwulan;
- 3) Memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan validasi data serta ketercapaian target output dan outcome;
- 4) Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak;
- 5) Mendorong Penyedia Barang/Jasa untuk segera mengajukan tagihan setelah hak tagih muncul;
- 6) Melakukan revolving dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, dengan memperhatikan besaran dan rentang waktu revolving serta memitigasi pengajuan pertanggungjawaban GUP dan TUP di hari terakhir jatuh tempo;
- 7) Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri;
- 8) Memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual; dan
- 9) Menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berkenaan merupakan upaya perwujudan peningkatan Nilai IKPA Ditjen PKH.

3.3. Kinerja Lainnya

a. SNI Awards 2024

SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia skala nasional bagi organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten dengan kinerja unggul dan berkelanjutan. SNI Award dapat menjadi wujud tekad organisasi dalam



meningkatkan kredibilitasnya di mata konsumen dan *stakeholder* sehingga berdaya saing di tingkat nasional maupun global.



Gambar 1 UPT Penerima SNI Awards 2024 (dari kiri Kepala BPTUHPT Padang Mangatas, BBIB Singosari, dan BBVF Psuветma)

Ditjen PKH pada tahun 2024 kembali menorehkan prestasi membanggakan yaitu 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya berhasil meraih penghargaan SNI Awards 2024 yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN). Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari meraih penghargaan Emas, mencerminkan dedikasi tinggi dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara itu, Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Padang Mengatas masing-masing menerima penghargaan Perunggu, menunjukkan kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Keberhasilan tiga UPT Ditjen PKH ini mempertegas komitmen Ditjen PKH dalam membangun peternakan nasional yang berdaya saing dalam mendukung swasembada pangan.

b. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Kementerian Pertanian kembali menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Ditjen PKH berhasil meraih dua penghargaan yaitu Peringkat Kedua Kategori Eselon I dan Pemenang Kategori Khusus sebagai unit kerja dengan Kolaborasi Terbaik dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Prestasi ini menjadi bukti nyata atas dedikasi Ditjen PKH



dalam mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan informasi publik yang berkualitas.



Gambar 2 Dirjen PKH Menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Tidak hanya PPID Ditjen PKH, beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah lingkup Ditjen PKH juga berhasil membawa pulang penghargaan dalam berbagai kategori, menegaskan kontribusi besar dari subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam mendukung visi keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Daftar kategori pemeringkatan yang diraih Ditjen PKH:

Kategori Eselon I

Peringkat 2: Ditjen PKH

Kategori Khusus

Kolaborasi Terbaik dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik - Ditjen PKH

Kategori Eselon II

Peringkat 1: BBVet Farma Pusvetma Surabaya

Peringkat 3: BBIB Singosari

Peringkat 4: BBPTU HPT Baturraden

Peringkat 7: BBVet Denpasar

Peringkat 9: BBVet Wates



Kategori Eselon III

Peringkat 1: BET Cipelang

Peringkat 5: BPMSPH Bogor

c. Bhumandala Award Tahun 2024

Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH memperoleh penghargaan Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan perolehan perunggu “Bhumandala Ariti” atas kontribusinya dalam penyusunan peta lahan peternakan skala 1:50.000. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementerian Pertanian dalam pemetaan sumber daya alam yang dapat menunjang pengelolaan peternakan di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 3 Bhumandala Award 2024, 4 November 2024

Peta lahan peternakan skala 1:50.000 adalah peta yang menggambarkan distribusi dan potensi lahan yang cocok untuk kegiatan peternakan di seluruh Indonesia, dengan rasio skala 1:50.000, artinya satu sentimeter di peta mewakili 50.000 sentimeter di lapangan. Peta ini sangat penting untuk memetakan lokasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan, baik untuk sapi, kambing, domba, maupun jenis ternak lainnya.

Dengan informasi ini, pemangku kebijakan dan pelaku usaha peternakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penggunaan lahan, distribusi pakan, serta pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan.



3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024, pagu anggaran awal Program/Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikelola oleh Ditjen PKH sebesar Rp2.543.051.794.000,00 (*dua triliun lima ratus empat puluh tiga miliar lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*). Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat perubahan pagu anggaran, yaitu:

1. Pagu Ditjen PKH pada DIPA Awal yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar sebesar Rp2.543.051.794.000,00.
2. Revisi I yaitu relokasi anggaran sebesar Rp1.635.201.943.000,00 dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung T.A. 2024 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi I sebesar Rp907.849.851.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-8/AG/Ag.3/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-1).
3. Revisi II yaitu Revisi Pencantuman Blokir Automatic Adjustment pada Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp28.693.545.000 dan Pembukaan Blokir Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah (akun 526) T.A. 2024 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi II sebesar Rp 907.849.851.000,00. Revisi DIPA Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-44/AG/Ag.3/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-2).
4. Revisi III yaitu Pembukaan Blokir Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah (akun 526) T.A. 2024 sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi III sebesar Rp929.988.457.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-175/AG.AG.3/2024 tanggal 14 Februari 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-3).
5. Revisi IV yaitu Revisi Buka Blokir, Pergeseran SBSN dan Belanja Operasional sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi IV sebesar Rp930.761.790.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-324/AG/AG.3/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-4).
6. Revisi V yaitu Revisi Pergeseran anggaran SBSN dan Operasional Perkantoran sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi V sebesar Rp957.556.673.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-486/AG/AG.3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-5).

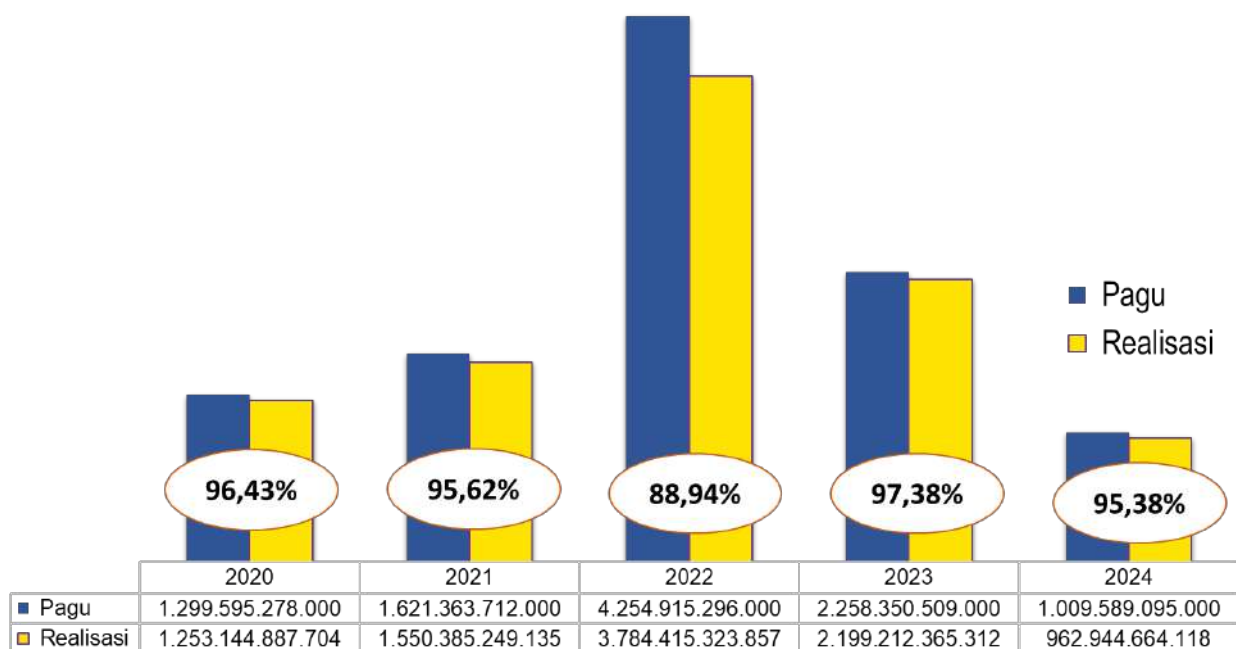


7. Revisi VI yaitu Pergeseran Belanja Operasional antar Eselon I sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VI menjadi Rp989.444.549.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-539/AG/Ag.3/2024 tanggal 2 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-6).
8. Revisi VII yaitu Revisi SBSN, Pergeseran antar Program dalam Eselon I Revisi sehingga pagu Ditjen PKH setelah Revisi VII sebesar Rp1.005.887.352.000,00. Revisi DIPA ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-736/AG/Ag.3/2024 tanggal 4 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TA 2024 (Revisi ke-7).



Grafik 7 Dinamika Perubahan Pagu Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2024, pagu Ditjen PKH sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.009.589.095.000,00 atau menurun 60,30% dari pagu awal dengan jumlah pagu blokir sebesar Rp31.092.815.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 62 (enam puluh dua) satuan kerja, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Kantor Pusat, 23 (dua puluh tiga) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan 38 (tiga puluh delapan) Satker Tugas Pembantuan (TP).



Grafik 8 Tren Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, penyerapan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp962.944.664.118,00 atau setara dengan 95,38% terhadap total pagu anggaran akhir sebesar Rp1.009.589.095.000,00. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp978.496.280.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 98,41%. Berdasarkan Tabel 50 dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk 6 (enam) kegiatan, proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, karena kegiatan tersebut mencakup kegiatan belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan minimal UPT.



Tabel 50 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Kegiatan

KEGIATAN	PAGU	BLOKIR (AA & NonAA)	PAGU TANPA BLOKIR	REALISASI SP2D	% SP2D	% SP2D TANPA BLOKIR
1	2	3	4=2-3	5	6=5/2	8=7/4
Peningkatan Produksi Pakan Ternak	55.207.932.000	-	55.207.932.000	55.177.139.251	99,94	99,94
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	308.397.260.000	415.997.000	307.981.263.000	303.199.563.708	98,31	98,45
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	195.184.492.000	186.136.000	194.998.356.000	191.201.027.079	97,96	98,05
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.244.610.000	-	4.244.610.000	4.172.034.644	98,29	98,29
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	413.089.801.000	21.643.522.000	391.446.279.000	385.042.399.324	93,21	98,36
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	33.465.000.000	8.847.160.000	24.617.840.000	24.152.500.112	72,17	98,11
JUMLAH	1.009.589.095.000	31.092.815.000	978.496.280.000	962.944.664.118	95,38	98,41

Sumber: OMSPAN, 2025

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Kantor Pusat sebesar Rp135,75 miliar atau 89,77% dari pagu anggaran Rp151,22 miliar; (ii) Kantor Daerah (UPT) sebesar Rp676,02 miliar atau 97,88% dari pagu anggaran Rp690,66 miliar; dan (iii) Tugas Pembantuan (Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi) sebesar Rp151,17 miliar atau 90,14% dari pagu anggaran Rp167,71 miliar.

Tabel 51 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Kewenangan

KEWENANGAN	PAGU	BLOKIR (AA & NonAA)	PAGU TANPA BLOKIR	REALISASI SP2D	% SP2D	% SP2D TANPA BLOKIR
1	2	3	4=2-3	5	6=5/2	8=7/4
Pusat	151.217.570.000	12.691.337.000	138.526.233.000	135.753.621.387	89,77	98,00
Kantor Daerah	690.661.001.000	2.948.684.000	687.712.317.000	676.019.190.140	97,88	98,30
Tugas Pembantuan	167.710.524.000	15.452.794.000	152.257.730.000	151.171.852.591	90,14	99,29
JUMLAH	1.009.589.095.000	31.092.815.000	978.496.280.000	962.944.664.118	95,38	98,41

Sumber: OMSPAN, 2025.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar Rp142,53 miliar atau 99,13% dari pagu anggaran Rp143,77 miliar; (ii) Belanja Barang sebesar Rp572,78 miliar atau 93,67% dari pagu anggaran Rp611,47 miliar; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp247,64 miliar atau 97,36% dari pagu Rp254,35 miliar.



Tabel 52 Realisasi Anggaran Ditjen PKH T.A. 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	BLOKIR (AA & NonAA)	PAGU TANPA BLOKIR	REALISASI SP2D	% SP2D	% SP2D TANPA BLOKIR
1	2	3	4=2-3	5	6=5/2	8=7/4
Belanja Pegawai	143.773.541.000	-	143.773.541.000	142.525.366.684	99,13	99,13
Belanja Barang	611.465.768.000	31.092.815.000	580.372.953.000	572.778.784.407	93,67	98,69
Belanja Modal	254.349.786.000	-	254.349.786.000	247.640.513.027	97,36	97,36
JUMLAH	1.009.589.095.000	31.092.815.000	978.496.280.000	962.944.664.118	95,38	98,41

Sumber: OMSPAN, 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, antara lain: i) adanya pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*, *refocusing*, dan blokir lainnya) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal; dan ii) kegiatan SBSN pada BVet Lampung berupa Sarana dan Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan *Zoonosis* di Wilayah Barat Indonesia tidak dapat terselesaikan sepenuhnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran dan sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, pada tahun 2024 Ditjen PKH telah menyusun sebanyak 25 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pada kegiatan: a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak; b) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; c) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak; d) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan e) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (rincian NSPK tercantum pada Lampiran 16).

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran program Ditjen PKH tahun 2024 berpedoman pada hasil perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Efisiensi Ditjen PKH sebagai Unit Kerja Eselon I diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Rincian Output (RO) dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Ditjen PKH. Pengukuran Nilai Efisiensi Ditjen PKH dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$



Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem informasi Aplikasi Monev Kemenkeu sebagai sumber data Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK untuk menghitung Nilai Efisiensi Unit Kerja Eselon I. Berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu, nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK sebagaimana tersaji pada Lampiran 15 sehingga dapat diperoleh Nilai Efisiensi Ditjen PKH T.A. 2024 adalah:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK}) \\ &= (40\% \times 82,80) + (60\% \times 80,43) \\ &= 33,12\% + 48,26\% \\ &= \mathbf{81,38\%}\end{aligned}$$

BAB IV

PENUTUP





IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKH merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Ditjen PKH. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Ditjen PKH kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Ditjen PKH tahun 2024 dari 9 (sembilan) sasaran program yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) indikator kinerja program sebesar **107,45 (Sangat Berhasil)** dengan uraian 8 (delapan) capaian indikator kinerja termasuk kategori Sangat Berhasil yaitu (1) Peningkatan Produksi Susu; (2) Peningkatan Produksi Telur; (3) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (6) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (8) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya, 3 (tiga) capaian indikator kinerja termasuk kategori **Berhasil** yaitu (1) Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik); (2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024, Ditjen PKH per 31 Desember 2024 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp962.944.664.118,00 atau setara dengan 95,38% dari alokasi pagu APBN sebesar Rp1.009.589.095.000,00. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp. 31.092.815.000,00, maka pagu anggaran tanpa blokir sebesar Rp978.496.280.000,00, sehingga realisasi anggaran tanpa blokir sebesar 98,41%.

Keberhasilan yang telah dicapai Ditjen PKH dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024 khususnya perkembangan capaian 11 (sebelas) indikator kinerja program tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen PKH, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 11 (sebelas) indikator kinerja program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen PKH. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Ditjen PKH yang bersih, transparan, dan akuntabel.



Namun demikian, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Sebagian besar kepemilikan ternak untuk ruminasia potong, baik besar maupun kecil adalah peternakan rakyat yang bersifat subsiten dengan kepemilikan 2-3 ekor; 2) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti *African Swine Fever*, Penyakit Mulut dan Kuku, *Septicaemia Epizootica*, *Surra*, *Avian Influenza*, Jembrana, dan *Anthrax* di beberapa wilayah di Indonesia yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 3) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya keterbatasan lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 4) Produktivitas ternak masih rendah karena manajemen reproduksi dan pemuliaan belum optimal; 5) Tingginya harga komoditas pangan asal ternak karena jaringan distribusi, infrastruktur dan akses yang belum memadai; 6) Belum optimalnya penerapan inovasi dan teknologi dalam pengembangan usaha peternakan, terutama sistem pendataan, sistem kesehatan hewan, inovasi pakan, serta sistem produksi; 7) Daya saing produk peternakan masih rendah; 8) Perdagangan bebas; 9) Dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin terbatas.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Ditjen PKH telah melakukan upaya-upaya dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan non APBN. Dalam upaya untuk mendukung percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mewujudkan swasembada pangan asal ternak, maka Ditjen PKH pada tahun 2025 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber, selain Rupiah Murni dan non APBN antara lain: BLU, PNBP, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara, dan hibah luar negeri.
2. Mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dalam mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional.
3. Memperkuat regulasi yang mendukung percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu nasional.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait.
5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
6. Mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terutama percepatan vaksinasi PMK yang saat ini sedang merebak, baik kejadian maupun kasus di lapangan.



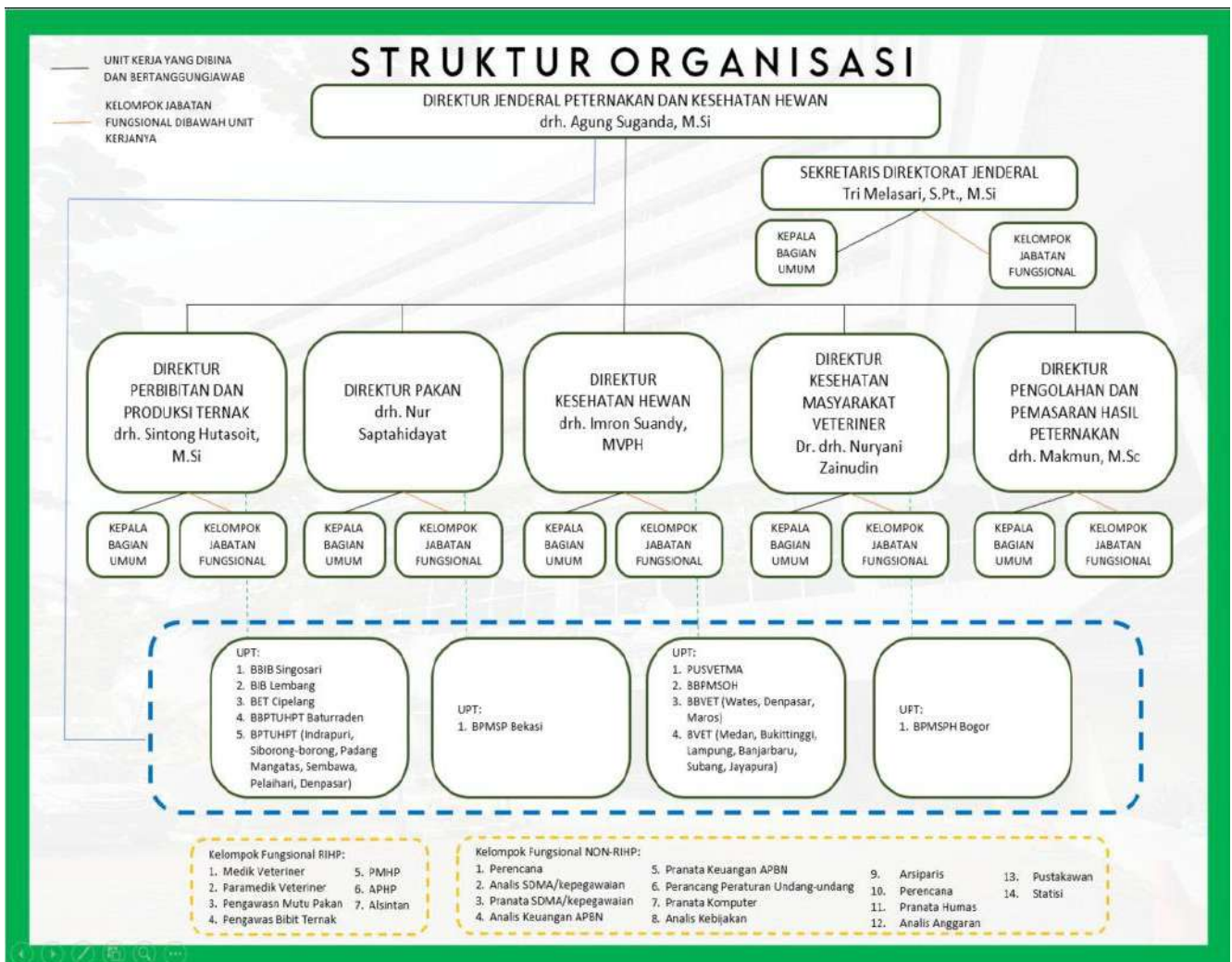
7. Menyelesaikan Regulasi Jasa Perkawinan Ternak (JPT) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan optimalisasi reproduksi di lapangan.
8. Menyusun perubahan mekanisme layanan optimalisasi reproduksi, serta desain lokasi atau pemetaan wilayah IB yang akan dibiayai oleh APBD, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengupayakan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.
9. Melakukan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan terkait perubahan metode audit sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.
10. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan POV di seluruh Provinsi/Kab/Kota sesuai PP nomor 34 Tahun 2024.
 - b. Mengembangkan sistem pelaporan Identik Ternak untuk pendataan ternak sapi dan kerbau serta pendataan unggas dan kambing domba.
 - c. Menyusun data prognosa kebutuhan dan ketersediaan berbasis wilayah.
 - d. Optimalisasi peran Dinas Prov/Kab/Kota dan asosiasi perunggasan (PINSAR, GPPU, ARPHUIN, GOPAN, KPUN, dll).
 - e. Mengembangkan sistem pelaporan data secara berjenjang melalui *Poultrynesia* dan *SiPoultry*.
 - f. Menyusun model atau mengembangkan klaster peternakan ayam ras berbasis desa dan kecamatan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
 - g. Mendukung akselerasi penambahan populasi dan pengembangan sapi potong dan sapi perah, utamanya dalam i) Penyediaan informasi lahan yang dapat digunakan serta *clean and clear*; ii) Penyediaan insentif Pajak Daerah yang dapat menarik investor; iii) Peningkatan kapasitas SDM (petani dan peternak, kelompok peternak); iv) Mendorong kelompok peternak sapi untuk dapat berkerja sama dengan mitra kerja atau investor.
 - h. Melakukan identifikasi sekaligus evaluasi terhadap pemanfaatan unit RPH, RPHU dan Puskesmas agar unit yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
 - i. Menfasilitasi Sertifikasi NKV melalui anggaran APBD dan melakukan pelatihan auditor NKV baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
 - j. Membentuk Satgas Kemitraan dan Pembinaan/ Pengawasan Kemitraan dan dapat dialokasikan pada APBD.

LAMPIRAN





Lampiran 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024



Sumber: Ditjen PKH, 2024



Lampiran 2 Distribusi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

DISTRIBUSI JUMLAH PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN									GOLONGAN				
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	57	61	1	32	58	-	10	-	15	1	-	-	-	4	100	11
3	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	35	21	2	24	22	2	3	-	3	-	-	-	-	2	38	16
4	DIREKTORAT PAKAN	20	23	-	22	18	-	2	-	1	-	-	-	-	1	30	12
5	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN	27	42	4	55	5	-	2	-	3	-	-	-	-	1	25	39
6	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	18	27	1	38	3	-	1	-	2	-	-	-	-	2	16	23
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	28	19	-	22	21	-	2	-	1	1	-	-	-	2	31	14
8	BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA	42	48	1	35	14	1	19	-	20	-	-	-	-	13	53	24
9	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	28	35	2	23	9	1	11	-	17	-	-	-	-	11	32	19
10	BALAI BESAR VETERINER WATES	31	56	3	43	7	1	25	-	8	-	-	-	-	10	50	27
11	BALAI BESAR VETERINER MAROS	32	41	2	22	12	-	13	-	23	-	1	-	-	14	46	9
12	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	30	20	1	22	6	-	8	-	10	2	1	-	-	12	20	15
13	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURADEN	69	34	-	19	31	7	13	-	19	9	5	1	31	54	15	
14	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	46	34	2	23	29	2	12	-	11	1	-	-	-	10	51	19
15	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	42	24	1	11	12	3	17	1	21	-	-	-	-	12	41	11
16	BALAI EMBRIO TERNAK BOGOR	36	19	-	9	17	2	9	-	14	2	2	-	-	18	31	6
17	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN	22	41	1	24	13	-	12	1	11	-	1	1	8	35	16	
18	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	26	17	-	11	15	-	8	-	9	-	-	-	-	8	30	5
19	BALAI VETERINER MEDAN	25	26	1	21	10	-	6	-	13	-	-	-	-	6	34	11
20	BALAI VETERINER BUKITTINGGI	24	32	1	21	1	-	14	-	19	-	-	-	-	13	26	14



**DISTRIBUSI JUMLAH PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024**

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN										GOLONGAN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
21	BALAI VETERINER LAMPUNG	28	29	1	15	11	3	17	-	11	-	-	-	-	6	42	10
22	BALAI VETERINER BANJARBARU	32	18	-	16	8	-	11	-	15	-	-	-	-	8	28	9
23	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI	42	12	-	14	19	1	4	-	15	1	-	-	-	9	32	12
24	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	41	26	-	9	13	-	9	-	32	1	3	1	19	41	6	
25	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS	51	18	-	10	14	2	10	-	28	3	2	-	23	42	4	
26	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	59	17	1	7	21	1	6	-	38	1	1	2	25	40	9	
27	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	41	14	-	7	13	1	14	-	20	-	-	-	12	39	4	
28	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR	30	21	1	8	18	1	4	-	18	1	-	-	18	27	6	
29	BALAI VETERINER SUBANG	31	17	-	21	5	4	14	-	4	-	-	-	8	29	11	
30	LOKA VETERINER JAYAPURA	4	6	-	6	2	-	2	-	-	-	-	-	2	7	1	
JUMLAH		998	798	27	590	427	32	278	2	401	23	16	5	308	1.070	379	

Sumber: Ditjen PKH, 2024



Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 – Awal



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
TELP. (021) 7815580 - 83, 78847319, FAXSIMILI : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjenpak@pertanian.go.id
website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

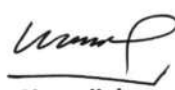
Pihak Kedua,



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2023

Pihak Pertama,



Nasrullah



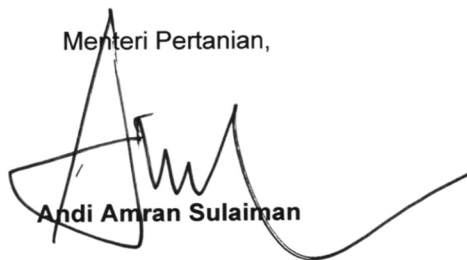
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik)	2,86 %
		Peningkatan Produksi Susu	0,23 %
		Peningkatan Produksi Telur	1,51 %
2	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	86 %
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	76 %
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,5 %
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	94,5 %
6	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	95 %
7	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	7 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	35,50 <i>Nilai</i>
9	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel Dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	90.85 <i>Nilai</i>



No	Program	Anggaran
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 33.565.000.000
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 2.124.244.393.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 385.242.401.000
Total		Rp. 2.543.051.794.000

Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Nasrullah



Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 – Revisi Terakhir



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama,


Agung Suganda



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi dan Itik)	2,86 %
		Peningkatan Produksi Susu	1,25 %
		Peningkatan Produksi Telur	1,51 %
2	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	91,94 %
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	76 %
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50 %
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 %
6	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	100 %
7	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	76,91 %
9	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,20 Nilai



No	Program	Anggaran
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 33.465.000.000
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 563.034.294.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 413.089.801.000
Total		Rp. 1.009.589.095.000

Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Agung Suganda



Lampiran 4 Penyesuaian Indikator Sasaran Program “Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi” dan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816186
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-264/OT.240/H.2/01/2024
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Biasa
Hal : Perubahan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi.

17 Januari 2024

Yth.
Kepala Biro Perencanaan
di Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Terkait evaluasi Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dihentikan.

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 terdapat perubahan indikator Reformasi Birokrasi. Sehubungan hal tersebut, kami mengusulkan penyesuaian indikator Perjanjian Kinerja (PK) pengganti PMPRB menjadi Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai indikator yang diampu, konsep usulan perubahan terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,
Indira Fitriani, S.H., M.AP
NIP 197211061999032002

**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131, 7804116, FAKSIMILI (021) 7803237
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-1477/OT.240/A.1/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024

23 Agustus 2024

Yth,
Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti rapat pembahasan Penyesuaian Indikator Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024 serta surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-1753/OT.240/A2/06/2024 hal Target Indikator Reformasi, dimana memerlukan penyesuaian indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024.

Berkaitan dengan penyesuaian indikator tersebut, terlampir disampaikan indikator baru yang harus digunakan dalam dokumen PK lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan saudara untuk dapat menyiapkan dokumen PK Revisi berdasarkan penyesuaian indikator sebagaimana dimaksud pada level Eselon I, Eselon II, dan UPT vertikal lingkup Kementan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M. Si
NIP 196904191998031002

Tembusan:
Pit. Sekretaris Jenderal

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : B-1477/OT.240/H.1/08/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

TARGET INDIKATOR PERSENTASE CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI (%CNRB) LINGKUP KEMANTAN

No	Eselon I	Indikator	Target 2024 (%) disesuaikan kembali
1	Sekretariat Jenderal	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal	81,14
2	Inspektorat Jenderal	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal	69,91
3	Ditjen Tanaman Pangan	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen TP	76,64
4	Ditjen Hortikultura	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Horti	75,09
5	Ditjen Perkebunan	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perkebunan	76,91
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen PKH	76,91
7	Ditjen PSP	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSP	74,57
8	BPPSDMP	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP	77,96
9	BSIP	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BSIP	78,41



Lampiran 5 Tanggapan atas Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi III



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : T-16064/Dt.3.1/PP.03.02/08/2024 Jakarta, 23 Agustus 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tanggapan atas Perubahan Rencana
Strategis Kementerian Pertanian Revisi III

Yth. Kepala Biro Perencanaan,
Kementerian Pertanian
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-3333/RC.020/A/09/2023 perihal Usulan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Revisi III, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pembahasan dan pencermatan terhadap Draft Renstra (terlampir), dimana di antaranya masih diperlukan penajaman kembali terhadap penjabaran Indikator RPJMN 2020-2024 ke dalam Renstra Kementerian Pertanian, yaitu:
 - a. Persentase pangsa pangan organik; dan
 - b. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Aksesi).
2. Adapun Indikator RPJMN 2020-2024 yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Renstra Kementerian Pertanian perlu dilakukan kajian/analisis dampak dukungan Kementerian Pertanian terhadap pencapaian target indikator tersebut.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2 di atas, maka kami harapkan Saudara dapat melengkapi dokumen tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pangan dan Pertanian,

Jarot Indarto

Tembusan:
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas



Lampiran 6 Tabel Produksi Daging, Susu dan Telur Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
1	Sapi	378,25	339,75	365,51	374,43	461,30	478,85
2	Kerbau	18,57	13,88	14,19	16,54	16,16	17,39
3	Kambing	49,42	41,86	40,51	41,22	56,34	56,89
4	Domba	47,92	37,05	34,67	35,67	48,16	34,59
5	Babi	159,42	189,81	176,00	102,48	135,04	130,87
6	Ayam Buras	292,33	270,21	269,80	276,73	143,79	156,45
7	Ayam Ras Pedaging	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.668,88	3.721,64	3.835,92
8	Itik	39,81	35,75	41,02	44,65	33,03	33,82
Jumlah		4.480,80	4.147,43	4.127,40	4.560,59	4.615,46	4.744,78
Pertumbuhan Produksi Daging Komoditas Utama			-7,44%	-0,48%	10,50%	1,20%	2,80%

Keterangan :

*) Angka Sementara (dalam *meatyield*, 000 ton)

Sumber: Buku Statistik PKH 2024

No	Jenis Komoditas	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
1	Susu Sapi	944,54	946,91	946,39	824,27	787,37	808,35
Pertumbuhan Produksi Susu			0,25%	-0,06%	-12,90%	-4,48%	2,66%

Keterangan :

*) Angka Sementara (dalam 000 ton)

Sumber: Buku Statistik PKH 2024

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Ayam Buras	246,69	358,86	368,70	389,27	214,73	236,65
2	Ayam Ras Petelur	4.753,38	5.141,57	5.156,00	5.579,25	6.116,07	6.342,71
3	Itik	294,01	316,95	313,84	316,17	200,21	236,48
4	Itik Manila	25,86	24,65	24,27	22,02	26,17	27,62
5	Puyuh	34,67	32,35	30,63	33,18	28,30	32,83
Jumlah		5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.585,49	6.876,28
Pertumbuhan Produksi Telur			9,71%	0,32%	7,58%	3,87%	4,42%

Keterangan :

*) Angka Sementara (dalam 000 ton)

Sumber: Buku Statistik PKH 2024



Lampiran 7 Tabel Populasi Ternak Tahun 2023-2024

(000 Ekor/000
Head)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year	
		2023	2024 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK		
1	Sapi Potong/Beef Cattle	10.828,7	11.749,8
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	464,0	485,8
3	Kerbau/Buffalo	453,3	556,8
4	Kuda/Horse	69,9	125,8
II	TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK		
1	Kambing/Goat	14.374,0	15.710,1
2	Domba/Sheep	4.358,3	9.219,2
3	Babi/Pig	4.245,8	4.115,0
III	TERNAK UNGGAS/POULTRIES		
1	Ayam Buras/Native Chicken	99.047,6	146.469,7
2	Ayam Ras Petelur/Layer	410.168,8	414.758,4
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	3.189.381,8	3.148.389,1
4	Itik/Duck	27.475,5	36.673,0
5	Itik Manila/Muscovy Duck	5.961,2	6.876,8
IV	ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK		
1	Kelinci/Rabbit	248,1	345,3
2	Puyuh/Quail	24.553,7	24.278,7

Keterangan/Note :

Populasi ternak tahun 2023 Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023), kecuali populasi ayam ras/
The population of livestock in 2023 is the result of ST2023, except the population of broiler and layer

Sumber: Ditjen PKH, 2024



Lampiran 8 Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2024

Jenis Produk	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Jumlah
Daging	18.009	1.591	19.600
Susu	737	153	890
Telur	4.780	154	4.934
Jumlah	23.526	1.898	25.424
Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan			92,53%

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2024

Tabel Rincian Target dan Realisasi Sampel Pangan Segar Asal Hewan Per UPT dan Wilayah Kerja Tahun 2024

No	UPT/ Jenis Sampel PSAH	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Grand Total
1	BBVet Denpasar	3.227	209	3.436
	Daging	3.042	200	3.242
	Susu	55	1	56
	Telur	130	8	138
2	BBVet Maros	2.192	100	2.292
	Daging	1.494	60	1.554
	Telur	698	40	738
3	BBVet Wates	2.098	894	2.992
	Daging	1.633	779	2.412
	Susu	281	71	352
	Telur	184	44	228
4	BPMSPH Bogor	9.452	501	9.953
	Daging	7.849	400	8.249
	Susu	267	77	344
	Telur	1.336	24	1.360
5	BVet Banjarbaru	1.315	31	1.346
	Daging	1.253	31	1.284
	Susu	12	-	12
	Telur	50	-	50



No	UPT/ Jenis Sampel PSAH	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Grand Total
6	BVet Bukittinggi	1.584	77	1.661
	Daging	262	66	328
	Susu	14	-	14
	Telur	1.308	11	1.319
7	BVet Lampung	2.080	30	2.110
	Daging	1.131	7	1.138
	Susu	76	3	79
	Telur	873	20	893
8	BVet Medan	1.287	9	1.296
	Daging	1.138	7	1.145
	Susu	9	1	10
	Telur	140	1	141
9	BVet Subang	169	14	183
	Daging	116	8	124
	Susu	23	-	23
	Telur	30	6	36
10	BVet Jayapura	122	33	155
	Daging	91	33	124
	Telur	31	-	31
	Grand Total	23.526	1.898	25.424

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, 2024



Lampiran 9 Status Wilayah Terhadap Kasus Penyakit Rabies dan Anthrax Tahun 2023-2024

Provinsi	Kasus <i>Rabies</i>			Kasus <i>Anthraks</i>		
	2023	2024	Status	2023	2024	Status
Aceh	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Bali	9	6	Terkendali	0	0	Terkendali
Bangka Belitung	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Banten	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Bengkulu	1	0	Terkendali	0	0	Terkendali
D I Yogyakarta	0	0	Terkendali	36	38	Tidak Terkendali
DKI Jakarta	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Gorontalo	0	2	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Jambi	1	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Jawa Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Jawa Tengah	0	0	Terkendali	5	0	Terkendali
Jawa Timur	0	0	Terkendali	21	8	Terkendali
Kalimantan Barat	16	7	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Tengah	3	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Timur	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Kepulauan Riau	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Lampung	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Maluku	12	2	Terkendali	0	0	Terkendali
Maluku Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Nusa Tenggara Barat	2	10	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Nusa Tenggara Timur	30	41	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali



Provinsi	Kasus <i>Rabies</i>			Kasus <i>Anthraks</i>		
	2023	2024	Status	2023	2024	Status
Papua	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Barat Daya	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Pegunungan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Tengah	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Riau	2	5	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Barat	1	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Selatan	18	3	Terkendali	0	1	Tidak Terkendali
Sulawesi Tengah	2	1	Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Tenggara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Utara	21	5	Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Barat	9	3	Terkendali	5	0	Terkendali
Sumatera Selatan	5	4	Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Utara	24	14	Terkendali	0	0	Terkendali
Total	156	103		67	39	

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024



Lampiran 10 Status Kesehatan Hewan Per Penyakit Tahun 2024

Penyakit	Kab/Kota Target pengendalian (b) (Kepmentan 311/ 2023)	Kab/Kota Terkendali (a)	Angka Kesehatan Hewan (a/b)
<i>Anthrax</i>	72	69	95,83%
<i>Avian Influenza</i>	170	150	88,24%
<i>Brucellosis</i>	96	88	91,67%
<i>Classic Swine Fever</i>	98	91	92,86%
<i>Rabies</i>	234	180	76,92%
<i>Septicaemia Epizootica</i>	103	67	65,05%
Jembrana	118	94	79,66%
<i>Lumpy Skin Disease</i>	170	110	64,71%
Penyakit Mulut dan Kuku'	356	238	66,85%
<i>Surra</i>	148	123	83,11%
<i>African Swine Fever</i>	144	118	81,94%
Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			80,62%

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, 2024



Lampiran 11 Data Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

a. Sarana Produksi Pakan

No	Provinsi	Kabupaten	Lokasi	Volume	Satuan	Jenis Sarana Prasarana
Sarana Hijauan Pakan						
1	Sumatera Utara	Langkat dan Deli Serdang	Lokasi integrasi sapi sawit	4	Unit	Sarana tata kelola air
				2	Unit	Mesin pencacah rumput
				1	Paket	Alat kerja personal kebun
2	Riau	Siak dan Indragiri Hulu	Lokasi integrasi sapi sawit	2	Paket	Alat kerja personal kebun
				2	Unit	Mesin press (shredder)
3	Lampung	Pesawaran	Lokasi perhutanan sosial	1	Unit	Mesin pencacah rumput
4	Bangka Belitung	Bangka Tengah	Lokasi integrasi sapi sawit	2	Paket	Alat kerja personal kebun
				3	Unit	Mesin pencacah rumput
5	Jawa Tengah	Wonogiri, Batang dan Jepara	Lokasi kawasan sapi potong	6	Unit	Mesin pencacah rumput
6	DIY	Sleman	Lokasi kawasan sapi potong	4	Unit	Sarana tata kelola air
				4	Unit	Mesin pencacah rumput
7	Banten	Lebak Pandeglang	Lokasi integrasi sapi sawit	1	Unit	Kendaraan roda tiga
				1	Unit	Mesin pencacah rumput
				5	Unit	Sarana tata kelola air
8	NTT	Sumba Timur	Lokasi pilot project Kemenperin	2	Unit	Sarana tata kelola air
				3	Paket	Alat kerja personal kebun
				1	Unit	Mesin press (shredder)
9	Kalimantan Barat	Sekadau	Lokasi integrasi sapi sawit	2	Unit	Mesin press (shredder)
		Sanggau		2	Unit	Sarana tata kelola air
				2	Paket	Alat kerja personal kebun
		Konawe Selatan		4	Unit	Kendaraan roda tiga



No	Provinsi	Kabupaten	Lokasi	Volume	Satuan	Jenis Sarana Prasarana
				2	Paket	Alat kerja personal kebun
12	Jawa Barat	Bandung Barat	Lokasi kawasan sapi perah	1	Unit	Kendaraan roda tiga
				1	Paket	Sarana tata kelola air
				1	Unit	Mesin pencacah rumput
				1	Unit	Mesin babat rumput
Sarana Pakan/ Bahan Pakan						
1	Lampung	Lampung	UPTD Pembibitan Ternak Sapi Lampung	1	Unit	Mesin Chopper Kendaraan Roda Tiga Peralatan Pendukung
2	NTB	Sumbawa	UPT BPT HMT Serading	1	Unit	Mesin Chopper Tong Silase Mesin Press Jerami Peralatan Pendukung
3	Jawa Timur	Kota Batu	UPT PT dan HMT Batu	1	Unit	Mesin Chopper Mesin Sprayer Mesin Baller Silase Peralatan Pendukung
Total				66	Paket/Unit	

b. Sarana Produksi Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Provinsi	Total Sarana dan Prasarana (Unit)	Termanfaatkan (Unit)	Persentase (%)
1	Sumatera Selatan	12	12	100
2	Kalimantan Tengah	5	5	100
3	Sulawesi Selatan	2	1	50
4	Jawa Tengah	40	40	100
5	Sulawesi Tengah	3	3	100
6	Sulawesi Barat	1	1	100
7	Sumatera Barat	17	17	100
8	Kepulauan Riau	1	1	100
9	Kalimantan Utara	5	5	100
10	Aceh	13	13	100



No	Provinsi	Total Sarana dan Prasarana (Unit)	Termanfaatkan (Unit)	Persentase (%)
11	Di Yogyakarta	4	4	100
12	Bangka Belitung	2	2	100
13	Kalimantan Timur	4	4	100
14	Maluku	2	2	100
15	Maluku Utara	1	0	0
16	Sulawesi Tenggara	2	2	100
17	Riau	5	5	100
18	Gorontalo	5	5	100
19	Jambi	9	9	100
20	Jawa Barat	27	27	100
21	Kalimantan Barat	1	1	100
22	Nusa Tenggara Barat	15	15	100
23	Papua Barat	7	6	86
Total		183	180	98

c. Sarana Produksi Kesehatan Hewan

No	UNIT KERJA	NAMA ALAT	VOL	SAT
1	BVET MAROS		13	
		Elisa Reader	2	Unit
		BSC Class II	1	Unit
		Autoclave	1	Unit
		Refrigerated Microcentrifuge	2	Unit
		Water Purify	1	Unit
		Stabilizer	2	Unit
		Freezer -20	3	Unit
		Refrigerator	1	Unit
2	BVET SUBANG		153	
		7500 Fast Real Time PCR	1	Unit
		Pipette tip filter 10 µl	5	unit
		Pipette tip filter 100 µl	15	unit
		Pipette tip filter 200 µl	10	unit
		Pipette tip filter 1000 µl	16	unit



N o	UNIT KERJA	NAMA ALAT	VOL	SAT
		Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250)	6	pack
		PCR Tubes, 0.2 ml (1000)	3	pack
		PCR Tubes 0.6 ml	3	pack
		Microtubes 1,5 ml	6	unit
		Microtubes 2 ml	8	pack
		Viral Nucleic Acid Extraction Kit	10	kit
		Ag path	35	kit
		Allplex 2019-nCoV Assay	35	kit
3	BVET BANJARBARU		12	
		Stabilizer BSL	1	Set
		Microcentrifuge refrigerated	1	Unit
		Autoclave	2	Unit
		Incenerator Portable	1	Unit
		Freezer -20 (368 L)	2	Unit
		BSC kelas A2	1	Unit
		Vortex Mixer	1	Unit
		Waterbath	1	Unit
		Baterai UPS 2200	1	Unit
		Baterai UPS 1201	1	Unit
4	BVET LAMPUNG		9	
		PCR	1	Unit
		CENTRIFUGE	1	Unit
		EYE WASHER STATION PORTABLE	6	Unit
		PRESSURE GAUGE (PENGUKUR TEKANAN UDARA BSL)	1	Unit
5	BBVET WATES		12	
		BSC Class II	1	Unit
		Autoclave	1	Unit
		Refrigerated Microcentrifuge	1	Unit
		Shaking Micro Incubator (Heating Block)	1	Unit



N o	UNIT KERJA	NAMA ALAT	VOL	SAT
		QuantStudio 5 Real-Time PCR System	1	Unit
		KingFisher Flex Robotic Extraction Machine	1	Unit
		Freezer -20	1	Unit
		Refrigerator	1	Unit
		UPS 1500 KVA	4	Unit
6	BVET MEDAN		76	
		Refrigerated Centrifuge	1	Unit
		Autoclave	2	Unit
		Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Udara BSL)	1	Unit
		BSC CLASS II A	2	Unit
		Deep Frezeer	2	Unit
		Mikropipet single channel	12	Unit
		INCENERATOR	1	Set
		PERALATAN SARANA PENUNJANG INCENERATOR	1	Set
		BSC CLASS II A	4	Unit
		AUTOCLAVE	4	Unit
		INCUBATOR	4	Unit
		STERILISASI KERING (OVEN)	4	Unit
		Deep Frezeer	2	Unit
		FREEZER UNTUK LABORATORIUM	6	Unit
		KULKAS UNTUK LABORATORIUM	24	Unit
		MIKROSKOP	4	Unit
		ELISA READER	1	Unit
		MESIN SHREDDER (PENGHANCUR LIMBAH)	1	Unit
7	BVET BUKITTINGGI		52	
		BSC Class II	2	Unit
		Autoclave	5	Unit
		Refrigerated Microcentrifuge	1	Unit
		Thermo Shaker for microtube and PCR plate	1	Unit
		KingFisher Flex Robotic Extraction Machine	1	Unit
		Deep Freezer	1	unit
		Freezer -20	1	Unit
		Refrigerator	3	Unit



N o	UNIT KERJA	NAMA ALAT	VOL	SAT
		Server Komputer	1	Unit
		Monitor Display Digital Standing 43 Inch	1	Unit
		Perangkat Alat Audio Conferen	1	Pak et
		Thermo Shaker	1	Unit
		CPU Alat Vitec	1	Unit
		Waterbath	2	Unit
		elektroforesis	1	Unit
		Vortex Mixer	1	Unit
		AC 2 PK	5	Unit
		Magnetik Hot Plate Stires	1	Unit
		Timbangan	3	Unit
		Mini Centrifuge	2	Unit
		UPS 6 KVA	6	Unit
		Inkubator	1	Unit
		Shaker	2	Unit
		PH Meter	2	Unit
		Lemari bahan kimia	3	Unit
		Hematologi analizer	1	Unit
		Stabilizer Genset	1	Unit
		Inkubator 250 lt	1	Unit
8	BBVET DENPASAR		22	
		Biosafety Cabinet (BSC) 2 Type B2 plus	1	Unit
		Antigen Retrievel untuk Imunohistokimia	1	Unit
		Microcentrifuge	1	Unit
		Frizer -20°	1	Unit
		Elisa Washer	1	Unit
		Lamina Air Flow	1	Unit
		Lamina Air Flow	1	Unit
		Mikroskop Lengkap dengan layar monitor	1	Unit
		Biosafety Cabinet (BSC) 2	2	Unit
		Mikroskop stereo	1	Unit
		Autoclove	1	Unit
		Inkubator	1	Unit
		Lemari Pendingin	1	Unit



N o	UNIT KERJA	NAMA ALAT	VOL	SAT
		Mikroskop FAT	1	Unit
		Tissu e Culture	1	Unit
		Frizer -20°	1	Unit
		Lemari Pendingin tempat media	1	Unit
		Centrifuge tabung 9 -10 ml	1	Unit
		Spindown	1	Unit
		Autoclove	1	Unit
		Frizer -20°	1	Unit

d. Sarana Produksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Uraian	Lokasi	Volume	Satuan	% Pemanfaatan
Fasilitas RPHR Kota Depok	Kota Depok, Jawa Barat	1	Unit	100,00%
Fasilitas RPHR Kab. Gowa	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	1	Unit	100,00%
Fasilitas Unit Penanganan Madu	Kab. Sumbawa Barat, NTB	1	Unit	87,00%
Fasilitas Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	BBPMSOH	1	Unit	100,00%
Fasilitas Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	PUSVETMA	1	Unit	100,00%
Fasilitas Sarana Laboratorium Kesmavet	BPMSPH Bogor	1	Unit	100,00%
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				97,83%



KUESIONER
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA HEWAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Farnia Pulvetina
Nama Responden : Drh. Sri Budi Sulita, M.Si
Jabatan : Kepala BPPV Pulvetina
Kegiatan Sarana Prasarana Hewan Laboratorium Tahun 2023 : Sarana/Fasilitas Hewan Laboratorium

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat kesesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasana laboratorium terpasang	✓				

Keterangan:
SS = 5, S = 4, Rg = 3, TS = 2, STS = 1

Standa BPPV Pulvetina

Standa BPPV Pulvetina, M.Si

KUESIONER
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA HEWAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Farnia Pulvetina
Nama Responden : Drh. Dwi Kurnia Lestari, M.Si
Jabatan : Subkoordinator Kelompok Pengujian Mutu
Kegiatan Sarana Prasarana Hewan Laboratorium Tahun 2023 : Sarana/Fasilitas Hewan Laboratorium

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat kesesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasana laboratorium terpasang	✓				

Keterangan:
SS = 5, S = 4, Rg = 3, TS = 2, STS = 1

Subkoordinator Pengujian Mutu

Drh. Dwi Kurnia Lestari, M.Si

KUESIONER TINGKAT KEMANFAATAN
SARANA PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
KEGIATAN RENOVASI RUMAH POTONG HEWAN DAN SARANA
PENDUKUNGNYA

1	Tanggal Pengisian Kuisisioner	: 18 Desember 2024
2	Nama/ No Telp. Responden	: Drh. Suprijanto
3	Jabatan Responden	: Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Provinsi	: Jawa Barat
5	Kabupaten/Kota	: Kota Bandung
6	Nama Dinas	: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
7	Rincian Kegiatan *) ceklis salah satu	: ☒ Renovasi RPH-R : ☐ Renovasi RPH-U : ☐ Renovasi RPH-B
8	Lokasi Nama RPH Alamat RPH	: RPH Tapos Depok : Desa/Kelurahan : : Kecamatan : : Kabupaten : Kota Depok
9	Nama Penanggung Jawab Kegiatan	: Drh. Suprijanto
10	Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
11	No Telepon/ Hp Penanggung Jawab Kegiatan	: 62 821-1520-0472
12	Jumlah Anggaran yang diterima (Rp)	: 697.000.000.000
13	Komponen Kegiatan	: Restraining box Mark IV 1 Unit Restraining box tipe stunning 1 Unit Skining Cradle 20 Unit
14	Realisasi Keuangan	: 608.000.000

KUESIONER
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA HEWAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Farnia Pulvetina
Nama Responden : Drh. Firdaus Lingga Kusuma, M.Si
Jabatan : Pengkaji Sarana dan Prasarana
Kegiatan Sarana Prasarana Hewan Laboratorium Tahun 2023 : Sarana/Fasilitas Hewan Laboratorium

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat kesesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasana laboratorium terpasang	✓				

Keterangan:
SS = 5, S = 4, Rg = 3, TS = 2, STS = 1

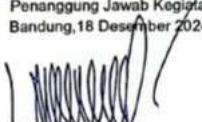
Pengkaji Sarana dan Prasarana

Drh. Firdaus Lingga Kusuma, M.Si



KUESIONER TINGKAT KEMANFAATAN
SARANA PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
KEGIATAN RENOVASI RUMAH POTONG HEWAN DAN SARANA
PENDUKUNGNYA

1	Tanggal Pengisian Kuisisioner	: 18 Desember 2024
2	Nama/ No Telp. Responden	: Drh. Supriyanto
3	Jabatan Responden	: Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Provinsi	: Jawa Barat
5	Kabupaten/Kota	: Kota Bandung
6	Nama Dinas	: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
7	Rincian Kegiatan *) ceklis salah satu	☒ Renovasi RPH-R ☐ Renovasi RPH-U ☐ Renovasi RPH-B
8	Lokasi Nama RPH Alamat RPH	: RPH Tapos Depok Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kota Depok
9	Nama Penanggung Jawab Kegiatan	: Drh. Supriyanto
10	Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
11	No Telepon/ Hp Penanggung Jawab Kegiatan	: 62 821-1520-0472
12	Jumlah Anggaran yang diterima (Rp)	: 697.000.000.000
13	Komponen Kegiatan	: Restraining box Mark IV 1 Unit Restraining box tipe stunning 1 Unit Skinning Cradle 20 Unit
14	Realisasi Keuangan	: 608.000.000

	(Rp)																																																													
15	Realisasi Fisik	: Restraining box Mark IV 1 Unit Restraining box tipe stunning 1 Unit Skinning Craddle 20 Unit																																																												
17	Jumlah pemotongan tahun 2024 (lampirkan data pemotongan per bulan)	<table><tr><th colspan="4">Jenis</th></tr><tr><th>Bulan</th><th>Sapi Impor</th><th>Sapi Lokal</th><th>Grand Total</th></tr><tr><td>Jan</td><td>681</td><td></td><td>681</td></tr><tr><td>Feb</td><td>641</td><td>24</td><td>665</td></tr><tr><td>Mar</td><td>552</td><td>23</td><td>575</td></tr><tr><td>Apr</td><td>585</td><td>103</td><td>688</td></tr><tr><td>May</td><td>407</td><td>4</td><td>411</td></tr><tr><td>Jun</td><td>286</td><td></td><td>286</td></tr><tr><td>Jul</td><td>192</td><td></td><td>192</td></tr><tr><td>Aug</td><td>265</td><td></td><td>265</td></tr><tr><td>Sep</td><td>141</td><td></td><td>141</td></tr><tr><td>Oct</td><td>129</td><td></td><td>129</td></tr><tr><td>Nov</td><td>156</td><td></td><td>156</td></tr><tr><td>Dec</td><td>69</td><td></td><td>69</td></tr><tr><td>Grand Tot</td><td>4104</td><td>154</td><td>4258</td></tr></table>	Jenis				Bulan	Sapi Impor	Sapi Lokal	Grand Total	Jan	681		681	Feb	641	24	665	Mar	552	23	575	Apr	585	103	688	May	407	4	411	Jun	286		286	Jul	192		192	Aug	265		265	Sep	141		141	Oct	129		129	Nov	156		156	Dec	69		69	Grand Tot	4104	154	4258
Jenis																																																														
Bulan	Sapi Impor	Sapi Lokal	Grand Total																																																											
Jan	681		681																																																											
Feb	641	24	665																																																											
Mar	552	23	575																																																											
Apr	585	103	688																																																											
May	407	4	411																																																											
Jun	286		286																																																											
Jul	192		192																																																											
Aug	265		265																																																											
Sep	141		141																																																											
Oct	129		129																																																											
Nov	156		156																																																											
Dec	69		69																																																											
Grand Tot	4104	154	4258																																																											
Penanggung Jawab Kegiatan Bandung, 18 Desember 2024  Drh. Supriyanto NIP 197203112006041006																																																														



FORM KUESIONER PEMANFAATAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM KESMAVET

Unit Kerja : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Nama Responden : drh. Hari Sakti Pancasunu
Kegiatan Sarana Prasarana Kesmavet Tahun 2023 : Pengadaan rak kandang stainless steel hewan percobaan 6 unit

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisis kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat ketidaksesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasarana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasarana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasarana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasarana laboratorium terpasang	✓				



KUESIONER PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA UNIT USAHA MADU

I. Identitas Responden

- Nama : Ahmad Sairi
- Usia : 40 thn
- Jenis Kelamin : L
- Nama Kelompok Usaha : Harapan Keluarga
- Lama Usaha (tahun) : Mulai thn 2020
- Jumlah Produk Madu per Bulan (liter) : tidak sesuai karena menggunakan peralatan bisa 10 liter

II. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

- Apakah Anda mengetahui adanya fasilitas penanganan madu yang disediakan?
a. Ya ✓
b. Tidak
- Seberapa sering Anda menggunakan fasilitas penanganan madu tersebut?
a. Rutin (Setiap produksi) ✓
b. Sesekali
c. Tidak Pernah
- Fasilitas apa saja yang paling sering Anda gunakan? (boleh memilih lebih dari satu)

Fasilitas	Rutin	sesekali	Tidak pernah	Keterangan
a. Ruang penerimaan bahan baku	✓			
b. Ruang penyaringan madu	✓			
c. Ruang dehum				keluar dari ruangan
d. Ruang pengemasan dan penyimpanan	✓			
e. Ruang display produk	✓			
f. Fasilitas lainnya	✓			

- Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan produksi madu Anda?
a. Ya
b. Tidak ✓
Jika tidak, mohon sebutkan kekurangannya: bangunan belum jadi dan belum selesai
- Apakah fasilitas tersebut membantu meningkatkan kualitas produk madu Anda?
a. Ya ✓
b. Tidak
Jelaskan alasannya:

- Apakah fasilitas tersebut mempermudah proses pengemasan dan distribusi produk?
a. Ya ✓
b. Tidak

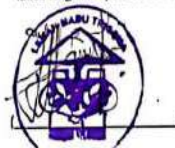
III. Dampak Ekonomi

- Apakah penggunaan fasilitas ini berdampak pada peningkatan jumlah produksi madu?
a. Ya ✓
b. Tidak
- Apakah fasilitas ini membantu meningkatkan penjualan produk madu Anda?
a. Ya ✓
b. Tidak
- Berapa persentase kenaikan penjualan madu setelah menggunakan fasilitas ini?
a. <10% ✓
b. 10-30%
c. 31-50%
d. >50%
- Apakah fasilitas ini membantu Anda dalam memperoleh sertifikasi NKV atau registrasi produk madu?
a. Ya ✓
b. Tidak

IV. Saran dan Masukan

- Saran Anda untuk pengembangan fasilitas penanganan madu di masa depan:
saya/kami berharap bangunan ini di lanjutkan pendana an nya supaya selesai
- Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang Anda butuhkan terkait pengelolaan usaha madu?
a. Ya, sebutkan: _____
b. Tidak ✓

Tanda Tangan Responden dan Cap kelompok





Hasil Kuesioner Pemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

FORM KUESIONER PEMANFAATAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM KESMAVET

Unit Kerja : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
Nama Responden : drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si
Kegiatan : Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet Tahun 2023
- Peralatan dan Mesin Laboratorium (Biosafety Cabinet)
- Peralatan dan Mesin Laboratorium (PC Bioinformatika)
- Peralatan dan Mesin Laboratorium (Water bath Shaker)
- Peralatan dan Mesin Laboratorium (PCR Real time)

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitasi laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	√				
2	Fasilitasi laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	√				
3	Terdapat ketidaksesuaian yang diterima dengan yang diajukan				√	
4	Fasilitas sarana prasarana digunakan dengan peruntukannya	√				
5	Fasilitas sarana prasarana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	√				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah setelah sarana prasarana terpasang	√				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasarana laboratorium terpasang	√				

Bogor, 31 Desember 2024
Subkoordinator Pelayanan Teknis

Drh. Diyan Cahyaningsari, MSI
NIP 19810921 200501 2 001

Produksi Madu Kelompok Tani Harapan Keluarga Tahun 2023-2024

Jenis madu :

Tahun	Bulan	Jumlah Produksi (ML)	Jumlah Kemasan
2023	Januari		40 botol kemasan 100 ml
2023	Februari	9.000 ML	18 botol kemasan 500 ml
2023	Maret	8.750 ML	35 botol kemasan 250 ml
2023	April	3.750 ML	15 botol kemasan 250 ml
2023	Mei	20.200 ML	35 botol kemasan 150 ml
2023	Juni	2.000 ML	4 botol kemasan 500 ml
2023	Juli	—	Kosong Pesanan
2023	Agustus	100.000 ML	200 botol kemasan 500 ml
2023	September	20.000 ML	200 botol kemasan 100 ml
2023	Oktober	3.150 ML	21 botol kemasan 150 ml
2023	November	5.000 ML	10 botol kemasan 500 ml
2023	Desember	3.000 ML	12 botol kemasan 250 ml
2024	Januari	7.500 ML	30 botol kemasan 250 ml
2024	Februari	9.250 ML	37 botol kemasan 250 ml
2024	Maret	—	Kosong Hidakada Pesanan
2024	April	8.000 ML	80 botol kemasan 100 ml
2024	Mei	9.000 ML	18 botol kemasan 500 ml
2024	Juni	3.500 ML	7 botol kemasan 500 ml
2024	Juli	4.800 ML	22 botol kemasan 150 ml
2024	Agustus	—	Kosong Pesanan
2024	September	6.750 ML	45 botol kemasan 150 ml

Tahun	Bulan	Jumlah Produksi (ML)	Jumlah Kemasan
2024	Oktober	6000 ML	12 botol kemasan 500 ml
2024	November	4500 ML	18 botol kemasan 250 ml
2024	Desember	9500 ML	19. botol kemasan 500 ml

Penjelasan: Data ini berdasar kan pesanan yang masuk kekompon

Kelompok Tani Harapan Keluarga

Ttd

Nama Jelas dan Stempel
Ahmad Satri





Lampiran 12 Data Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

KODE	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah yang disalurkan	Jumlah Sampel (unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	17	17	17	100,00
102	Sarana Pengolahan Telur	1	1	1	100,00
103	Sarana Pengolahan Susu	3	3	3	100,00
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100,00
105	Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100,00
107	Sarana Pasar Ternak	4	4	4	100,00
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100,00
RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	18	18	18	100,00
102	Prasarana Pengolahan Telur	1	1	1	100,00
103	Prasarana Pengolahan Susu	2	2	2	100,00
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100,00
105	Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100,00
107	Prasarana Pasar Ternak	4	4	4	100,00
108	Prasarana Tata Niaga	2	2	2	100,00
109	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100,00
Jumlah		35	35	35	100,00
Rata-Rata Tingkat Kemanfaatan					100,00

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, 2024



**Tabel Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
(Fasilitasi Tahun 2023)**

No	Provinsi	Komponen/Kegiatan	Satuan	Vol	Produk	Nama Penerima Manfaat dan Alamat	Keterangan
1	Sumbar	Sarana Pengolahan Telur	Unit	1	Telur asin	KT Padang Fatar Sejati Jorong I Pasa Kaciak, Nagari Tanjung Beringin Utara, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Telur	Unit	1		KT Padang Fatar Sejati Jorong I Pasa Kaciak, Nagari Tanjung Beringin Utara, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	termanfaatkan
2	BBPTU HPT Baturraden	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1	Susu pasteurisasi	Unit Pengolahan Susu BBPTU HPT Baturraden Jl. Raya Baturraden, Ds Kemutug Lor. Kec. Baturraden, Kab. Banyumas	termanfaatkan
3	Jambi	Sarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk padat	Kel. Tani Giri Mukti Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun	termanfaatkan
		Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk padat	Kel. Tani Giri Mukti Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun	termanfaatkan



No	Provinsi	Komponen/Kegiatan	Satuan	Vol	Produk	Nama Penerima Manfaat dan Alamat	Keterangan
4	Sumsel	Sarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk padat	Kel. Suka Makmur RT 003/RW 001, Desa Suka Maju, Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	termanfaatkan
		Prasarana Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	1	Pupuk padat	Kel. Suka Makmur RT 003/RW 001, Desa Suka Maju, Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	termanfaatkan
5	Lampung	Sarana Pengolahan Susu	Unit	1	Susu kambing bubuk	Kel. Mendoyoso Mukti Sejahtera Jl. Kelengkeng RT 032 RW 11, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro	termanfaatkan
		Prasarana Pengolahan Susu	Unit	1		Kel. Mendoyoso Mukti Sejahtera Jl. Kelengkeng RT 032 RW 11, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro	termanfaatkan



a. Kuesioner Online

<https://forms.gle/2dTetDgGC68hM86C9>

QuestionsResponses25Settings

Kuisiuner Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fasilitas Tahun 2023

Kuisiuner ini diberikan oleh Dit PHN&K Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka untuk mengetahui kemanfaatan sarana prasarana pengolahan/pemasaran hasil peternakan yang diperbantukan tahun 2023.

A. DATA KELOMPOK / PENERIMA

Description (optional)

1. Nama kelompok / penerima : *

Short-answer text

2. Alamat (Dusun / RT / RW / JL.) / Desa / Kecamatan / Kab / Kota / Prov) : *

Long-answer text

3. Nama Ketua (Kontak Person) / No. HP : *

Short-answer text

B. DATA FASILITASI / BANTUAN DAN KEMANFAATANNYA

Description (optional)

a). Nama fasilitas / bantuan sarana (alat / mesin) : *

☐ Sarana Pengolahan Daging

☐ Sarana Pengolahan Susu

☐ Sarana Pengolahan Telur

☐ Sarana Pengolahan Pupuk Organik

☐ Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik

☐ Sarana Pengolahan Sarang Burung Walet

☐ Sarana Pasar Ternak

☐ Sarana Tata Negeri Ternak (Holding Ground)

☐ Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak (UPPG)

☐ Other...

Kemanfaatan alat / mesin : *

	Ya	Tidak
1. Apakah alat/mesin dapat dima...	☐	☐
2. Apakah alat/mesin diterima da...	☐	☐
3. Apakah alat/mesin yang diter...	☐	☐
4. Apakah ada jaminan perbaikan...	☐	☐
5. Apakah peternak/pemerintah da...	☐	☐
6. Apakah alat/mesin yang diter...	☐	☐
7. Apakah alat/mesin bisa diman...	☐	☐

b). Nama fasilitas / bantuan prasarana (bangunan) : *

☐ Prasarana Pengolahan Daging

☐ Prasarana Pengolahan Susu

☐ Prasarana Pengolahan Telur

☐ Prasarana Pengolahan Pupuk Organik

☐ Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik

☐ Prasarana Pengolahan Sarang Burung Walet

☐ Prasarana Pasar Ternak

☐ Prasarana Tata Negeri Ternak (Holding Ground)

☐ Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak (UPPG)

☐ Other...

Kemanfaatan prasarana (bangunan) : *

	Ya	Tidak
1. Apakah bangunan sesuai spes...	☐	☐
2. Apakah bangunan bisa dimanf...	☐	☐
3. Apakah bangunan bisa dimanf...	☐	☐

C. LAMPIRAN

Description (optional)

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Dinas ke Kelompok / penerima

Add File

View folder

2. Foto peralatan / mesin (geo-tagging/ open camera)

Add File

View folder

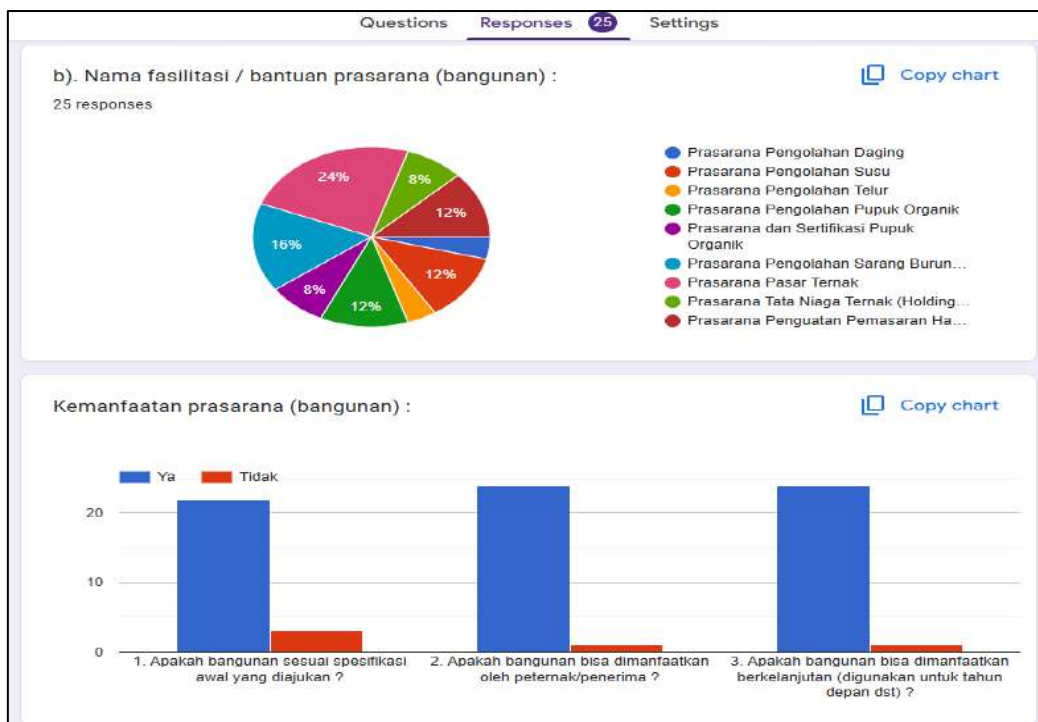
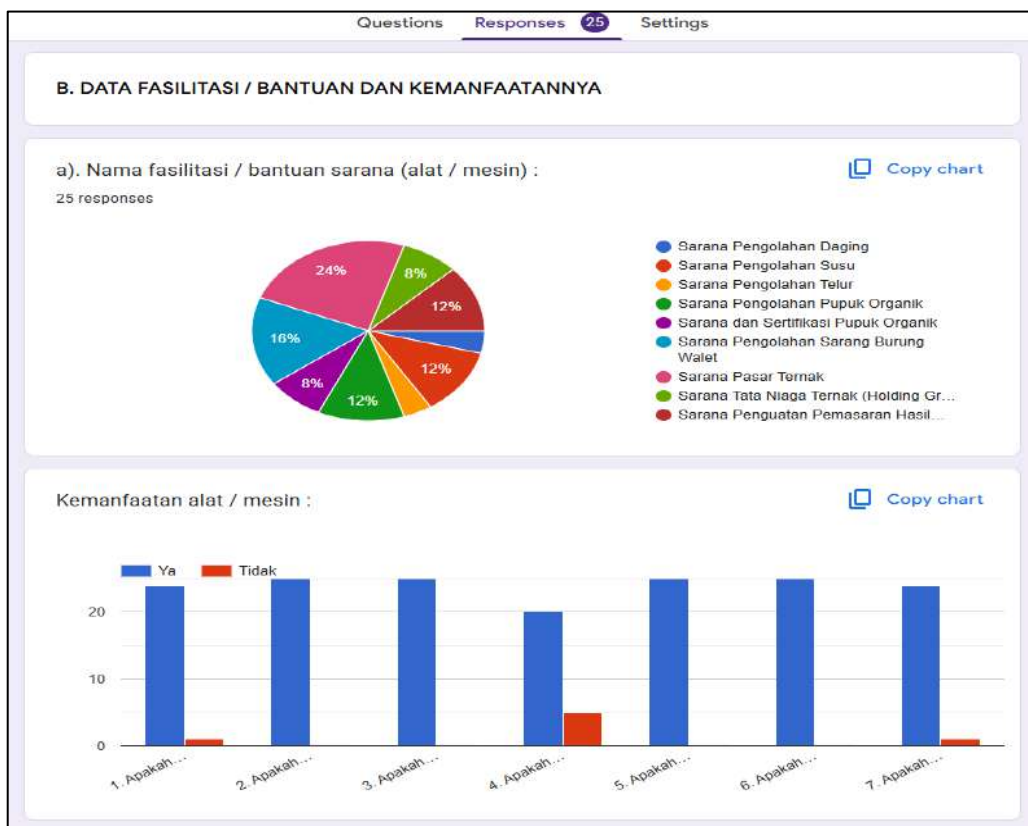
3. Foto bangunan (geo-tagging/ open camera)

Add File

View folder



b. Rekap Hasil Pengisian Kuisioner





Lampiran 13 Data Volume dan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023-2024* (Angka Sementara s.d. Desember 2024)

No	Komoditas	Jan-Des 2023		Jan-Des 2024		Perbandingan 2024/2023 (%)	
		Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol	Nilai
A	Ternak Hidup	410,56	6.516,13	253,95	5.670,72	-38,15	-12,97
1	Kuda	-	-	0,76	12,69	-	-
2	Keledai	-	-	2,49	179,82	-	-
3	Sapi	-	-	0,82	11,66	-	-
4	Kerbau	-	-	-	-	-	-
5	Babi	-	-	-	-	-	-
6	Biri-biri	-	-	-	-	-	-
7	Kambing	-	-	-	-	-	-
8	Unggas	122,31	1.130,23	50,14	732,83	(59,01)	(35,16)
9	Lebah hidup	-	-	-	-	-	-
10	Binatang hidup lainnya	288,25	5.385,90	199,74	4.733,72	(30,70)	(12,11)
B	Hasil Ternak	205.521,52	1.044.411,90	279.423,09	1.075.491,53	35,96	2,98
1	Daging	44.358,88	202.889,46	64.260,51	242.531,95	43,55	19,90
	Sapi	80,95	580,35	7,80	47,96	(90,38)	(91,88)
	Babi	0,70	2,15	0,49	1,84	2,71	12,02
	Kambing/domba	0,04	0,06	-	-	(100,00)	(100,00)
	Kuda	0,88	2,51	1,10	3,56	45,03	45,38
	Unggas	44.023,54	197.316,33	64.020,23	239.280,26	44,09	21,52
	Jeroan sapi	-	-	0,03	1,56	-	-
	Jeroan Non sapi	-	-	-	-	-	-
	Daging lainnya	252,77	4.988,07	230,85	3.196,76	(3,96)	(32,18)
2	Susu	69.955,37	121.899,09	111.037,73	169.221,18	62,59	44,16
	Susu dan kepala susu	48.446,91	87.897,64	85.464,99	129.667,42	83,60	55,76
	Yogurt	4.949,41	6.698,07	6.707,16	9.325,91	34,38	38,70
	Mentega	13.887,03	16.638,39	15.669,37	18.038,24	9,26	4,99
	Keju	2.672,02	10.665,00	3.196,21	12.189,61	22,06	17,28
3	Telur	715,73	1.581,30	3.198,55	6.078,32	366,42	299,47
4	Madu	415,05	947,31	740,56	1.043,65	81,40	5,41
5	Lemak	88.623,01	83.489,28	98.859,39	104.792,01	8,18	20,46
6	Makanan-olahan	108,29	336,45	96,16	210,01	(13,47)	(40,51)
7	Sarang burung walet	1.335,16	633.222,74	1.218,51	551.555,90	(10,64)	(13,03)
8	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan	2,44	41,74	3,75	34,79	58,38	40,30
9	Gelatin	7,59	4,53	7,93	23,72	(60,45)	(16,76)
C	Produk Hewani Non Pangan	165.029,20	198.490,77	162.998,75	205.434,65	-1,23	3,50
1	Bulu	3.059,58	7.534,17	3.307,41	10.734,38	4,60	35,75
2	Tulang dan Tanduk	795,70	855,86	750,60	1.512,99	(6,90)	62,24
3	Kulit	3.622,24	71.060,85	3.406,64	66.567,99	(9,96)	(8,07)
4	Wol	0,24	7,81	11,49	10,39	(100,00)	(100,00)



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

No	Komoditas	Jan-Des 2023		Jan-Des 2024		Perbandingan 2024/2023 (%)	
		Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol	Nilai
5	Pakan Hewan	143.244,50	114.127,27	139.326,28	121.535,84	(0,04)	8,44
6	Ulat sutera	42,69	110,05	4,04	16,93	(90,73)	(84,81)
7	Produk Hewani atau Nabati	14.264,25	4.794,76	16.192,29	5.056,13	17,91	9,82
D	Obat Hewan	71.157,15	87.672,81	46.341,11	65.770,64	(34,87)	(24,98)
1	Vaksin untuk obat hewan	542,16	17.615,16	686,69	21.800,67	26,59	28,80
2	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain	140,76	579,41	179,72	667,67	28,53	15,71
4	Premix dan Lisin	70.474,23	69.478,24	45.474,70	43.302,30	(41,38)	(44,10)
E	Benih/Bibit	1.073,74	2.156,27	1.045,38	3.029,08	(2,64)	40,48
1	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari unggas	1.067,05	1.835,77	1040,93	2.767,26	(2,45)	50,74
2	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek	-	-	-	-	-	-
3	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek	-	-	-	-	-	-
4	Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci	6,69	320,50	4,45	261,82	(33,52)	(18,31)
TOTAL		443.192,17	1.339.247,88	490.062,28	1.355.396,62	10,58	1,21

Sumber: Ditjen PKH, 2024



Lampiran 14 Data Dukung Indikator “Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) Ditjen PKH Tahun 2024”



KEMENTERIAN PERTANIAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://tjen.pertanian.go.id/> e-mail: tjen@pertanian.go.id

Nomor : R- 354 /PW.420/G/07/2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

29 Juli 2024

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor. B.0123/PW.420/G.6/06/2024 tanggal 4 Juni 2024, telah dilaksanakan kegiatan sebagaimana pada pokok surat mulai tanggal 6 Juni 2024 s.d 19 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil Penjaminan Kualitas (PK)	Naik/Turun
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)	3.642	3.428	-0.214
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2.366	3.500	1.134
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.642	2.560	-0.082

Sumber data: L&E PM dan PK SPI Terintegrasi diolah

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI setelah dilakukan PK adalah 3.428 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,214 dari nilai PM sebesar 3,642.
2. Nilai MRI adalah 3.500 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,134 dari nilai PM sebesar 2,366.



KEMENTERIAN PERTANIAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://tjen.pertanian.go.id/> e-mail: tjen@pertanian.go.id

Nomor : R- 353 /PW.170/G/06/2024

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

4 Juli 2024

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan nilai **80,33 (Kategori A)** atau berpredikat Memuaskan. Hasil evaluasi menunjukkan masih perlu beberapa perbaikan terhadap komponen-komponen AKIP, yaitu

1. Perencanaan Kinerja diperoleh nilai 26,00 atau 88,67% dari target nilai 30,00 disebabkan dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai dan terdapat target sasaran Eselon I yang ditetapkan dalam Renstra belum selaras dengan Eselon II;
2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,90 atau 79,67% dari target nilai 30,00 disebabkan Kriteria/tolok ukur definisi operasional "Kemanfaatan Sarana" untuk masing-masing Eselon II belum diatur dan ditetapkan secara formal dalam manual IKU serta belum seluruh data kinerja dikumpulkan dengan memanfaatkan Aplikasi;
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,65 atau 91% dari target nilai 15,00 disebabkan publikasi Laporan Kinerja Eselon II masih secara terbatas; terdapat LKj Eselon II belum menyajikan informasi kinerja sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014;



Kementerian
Keuangan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode ESI	Nama ESI	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai	99,66	74,35	92,85	90,33	99,36	95,58	93,64	91,67	100%	1,00	90,67
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	9,97	11,15	18,57	9,03	9,94	9,56	23,46				
				Nilai Aspek	97,01			94,53			93,64				

Tabel Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit Yang Diberikan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindakanjuti Rekomendasi				Persentase (%)
			S	BS	BD	TDD	
Inspektorat IV							
1	PMK 526	23	22	-	1	-	95,65
2	Daftar Hitam	8	8	-	-	-	100
3	Audit Kinerja	935	883	-	52	-	94,44
Investigasi							
		9	5	-	5	-	55,55
	Jumlah	975	918	-	57	-	94,15

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
 BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
 BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
 TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti



Gambar Indeks BerAKHLAK Kementerian Pertanian Tahun 2024



Gambar Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian Tahun 2024



Tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PKH Tahun 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsor									IKM	Kategori
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Layanan Perizinan/Rekomendasi Ditjen PKH	Tahun 2024	3,50	3,50	3,32	3,46	3,48	3,46	3,50	3,53	3,42	86,58	B (Baik)
2	BBVF PUSVETMA	Tahun 2024	3,68	3,66	3,62	3,60	3,70	3,69	3,80	3,72	3,57	91,78	A (Sangat Baik)
3	BBPMSOH	Tahun 2024	3,69	3,68	3,49	3,09	3,53	3,62	3,74	3,72	3,98	90,35	A (Sangat baik)
4	BB-Vet Wates	Tahun 2024	3,73	3,72	3,69	3,70	3,71	3,75	3,80	3,72	3,96	93,80	A (Sangat baik)
5	BB-Vet Denpasar	Tahun 2024	3,94	3,85	3,83	3,91	3,93	3,96	3,96	3,72	3,79	96,89	A (sangat baik)
6	BB-Vet Maros	Tahun 2024	3,51	3,50	3,36	3,82	3,44	3,71	3,68	3,72	3,47	89,47	A (Sangat Baik)
7	BBIB	Tahun 2024	3,68	3,72	3,66	3,68	3,67	3,68	3,72	3,72	3,64	92,06	A (Sangat baik)
8	BBPTU-HPT Baturaden	Tahun 2024	3,65	3,51	3,63	3,63	3,65	3,50	3,69	3,72	3,73	90,86	A (Sangat baik)
9	BIB	Tahun 2024	3,74	3,69	3,70	3,73	3,71	3,79	3,76	3,72	3,75	93,31	A (Sangat baik)
10	BET	Tahun 2024	3,61	3,56	3,54	3,51	3,62	3,74	3,75	3,72	3,63	90,77	A (Sangat Baik)
11	BPMSPH	Tahun 2024	3,74	3,68	3,49	3,24	3,69	3,73	3,78	3,72	3,74	91,18	A (Sangat Baik)
12	BPMS	Tahun 2024	3,57	3,60	3,18	3,44	3,47	3,59	3,64	3,72	3,60	88,38	A (Sangat Baik)
13	B-Vet Medan	Tahun 2024	3,86	3,84	3,78	3,07	3,75	3,77	3,69	3,72	3,91	92,71	A (Sangat baik)
14	B-Vet Bukittinggi	Tahun 2024	3,42	3,44	3,27	3,32	3,37	3,46	3,51	3,72	3,32	85,65	B (Baik)
15	B-Vet Lampung	Tahun 2024	3,49	3,49	3,31	3,83	3,37	3,48	3,38	3,72	3,92	88,87	A Sangat baik)
16	B-Vet Banjarbaru	Tahun 2024	3,71	3,69	3,53	3,30	3,48	3,53	3,61	3,72	3,92	90,28	A Sangat baik)
17	B-Vet Subang	Tahun 2024	3,73	3,76	3,62	3,70	3,73	3,79	3,81	3,72	3,71	93,19	A (Sangat baik)
18	BPTU-HPT Indrapuri	Tahun 2024	3,54	3,45	3,41	3,53	3,44	3,58	3,50	3,72	3,44	87,85	B (Baik)
19	BPTU-HPT Siborongborong	Tahun 2024	3,48	3,55	3,50	3,55	3,45	3,52	3,51	3,72	3,49	88,27	B (Baik)
20	BPTU-HPT Padang Mangatas	Tahun 2024	3,62	3,63	3,64	3,62	3,88	3,63	3,64	3,72	3,69	91,89	A (Sangat baik)
21	BPTU-HPT Sembawa	Tahun 2024	3,65	3,63	3,57	3,67	3,59	3,75	3,81	3,72	3,74	91,98	A (Sangat baik)
22	BPTU-HPT Pelaihari	Tahun 2024	3,45	3,42	3,15	3,59	3,43	3,57	3,73	3,72	3,37	87,26	B (Baik)
23	BPTU-HPT Denpasar	Tahun 2024	3,66	3,61	3,60	3,52	3,53	3,64	3,74	3,72	3,58	90,56	A (Sangat baik)
24	Loka Veteriner Jayapura	Tahun 2024	3,55	3,66	3,61	3,67	3,69	3,67	3,74	3,72	3,71	91,73	A (Sangat baik)
Rata-rata		6921	3,63	3,62	3,52	3,55	3,60	3,65	3,69	3,71	3,67	90,65	A (Sangat baik)



Lampiran 15 Perhitungan Analisis Efisiensi Sumber Daya Ditjen PKH T.A. 2024

a. *Penggunaan SBK*

No.	RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK	Penggunaan SBK (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
1	5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (kegiatan)	240.000.000	4	9.048.760.262	2.262.190.065	Tidak	82,80%
2	1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (kegiatan)	240.000.000	1	1.230.998.624	1.230.998.624	Tidak	
3	1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (kegiatan)	240.000.000	2	1.482.234.612	741.117.306	Tidak	
4	1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (kegiatan)	240.000.000	1	930.723.505	930.723.505	Tidak	
5	1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (kegiatan)	240.000.000	1	1.480.667.232	1.480.667.232	Tidak	
6	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
7	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
8	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	11.482.050	11.482.050	Ya	
9	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
10	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
11	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
12	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
13	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
14	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
15	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	



No.	RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK	Penggunaan SBK (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
16	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
17	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	0	0	Tidak	
18	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	0	0	Tidak	
19	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
20	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
21	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
22	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	0	0	Tidak	
23	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	0	0	Tidak	
24	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
25	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
26	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
27	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	19.370.541	4.842.635	Ya	
28	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
29	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	8.615.649	8.615.649	Ya	
30	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	13.120.041	3.280.010	Ya	
31	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
32	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	9.850.604	9.850.604	Ya	
33	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
34	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	139.000.000	17	1.763.121.655	103.713.038	Ya	
35	1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	458.000.000	5	2.100.170.402	420.034.080	Ya	
36	1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan	810.400.000	32	7.647.722.148	238.991.317	Ya	



No.	RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK	Penggunaan SBK (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	Penganggaran (Dokumen)						
37	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	8	1.781.940.718	222.742.589	Ya	
38	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	5.700.500	1.425.125	Ya	
39	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
40	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	6.089.500	1.522.375	Ya	
41	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
42	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	5.968.750	5.968.750	Ya	
43	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
44	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	22.667.354	5.666.838	Ya	
45	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
46	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	19.760.755	19.760.755	Tidak	
47	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
48	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
49	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	23.236.242	5.809.060	Ya	
50	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
51	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	19.542.800	4.885.700	Ya	
52	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
53	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	18.228.193	4.557.048	Ya	
54	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
55	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	15.607.800	3.901.950	Ya	
56	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
57	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	16.747.741	4.186.935	Ya	
58	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	



No.	RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK	Penggunaan SBK (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
59	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	21.769.504	5.442.376	Ya	
60	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
61	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	4.774.774	4.774.774	Ya	
62	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
63	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	18.801.631	18.801.631	Tidak	
64	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
65	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	1.599.500	1.599.500	Ya	
66	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
67	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	18.553.300	18.553.300	Tidak	
68	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
69	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
70	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
71	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	0	0	Tidak	
72	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
73	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
74	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
75	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
76	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
77	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	0	0	Tidak	
78	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
79	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	16.799.344	4.199.836	Ya	



No.	RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK	Penggunaan SBK (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
80	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
81	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	5.234.000	5.234.000	Ya	
82	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
83	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
84	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	5.709.044	1.427.261	Ya	
85	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
86	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	4	6.080.659	1.520.164	Ya	
87	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
88	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	1	37.757.000	37.757.000	Tidak	
89	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
90	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
91	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	
92	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	16.340.000	16.340.000	Ya	
93	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1	0	0	Ya	

b. Efisiensi SBK

RO	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Indeks SBK	Selisih	Tingkat Efisiensi per RO (%)	Nilai Efisiensi per RO (%)	Efisiensi SBK (%)	Nilai Efisiensi SBK (%)
1	2	3	4=2/3	5	6=5-4	7=6/5	8	9	10
5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (kegiatan)	9.048.760.262	4	2.262.190.065	240.000.000	2.022.190.065	-842,58	0	16,09	80,43
1783.AEA.001 Supervisi, Monitoring	1.230.998.624	1	1.230.998.624	240.000.000	-990.998.624	-412,92	0		



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

dan Evaluasi Pakan (kegiatan)									
1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (kegiatan)	1.482.234.612	2	741.117.306	240.000.000	-501.117.306	-208,80	0		
1785.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (kegiatan)	930.723.505	1	930.723.505	240.000.000	-690.723.505	-287,80	0		
1786.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (kegiatan)	1.480.667.232	1	1.480.667.232	240.000.000	-1.240.667.232	-516,94	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	11.482.050	1	11.482.050	240.000.000	228.517.950	95,22	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	19.370.541	4	4.842.635	10.000.000	5.157.365	51,57	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan	8.615.649	1	8.615.649	240.000.000	231.384.351	96,41	20		



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

dan Evaluasi (Dokumen)									
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	13.120.041	4	3.280.010	10.000.000	6.719.990	67,20	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	9.850.604	1	9.850.604	10.000.000	149.396	1,49	1		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	1.763.121.655	17	103.713.038	139.000.000	35.286.962	25,39	20		
1787.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	2.100.170.402	5	420.034.080	458.000.000	37.965.920	8,29	8		
1787.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	7.647.722.148	32	238.991.317	810.400.000	571.408.683	70,51	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1.781.940.718	8	222.742.589	240.000.000	17.257.411	7,19	7		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	5.700.500	4	1.425.125	10.000.000	8.574.875	85,75	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	6.089.500	4	1.522.375	10.000.000	8.477.625	84,78	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	5.968.750	1	5.968.750	10.000.000	4.031.250	40,31	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	22.667.354	4	5.666.838	10.000.000	4.333.162	43,33	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	19.760.755	1	19.760.755	10.000.000	-9.760.755	-97,61	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	23.236.242	4	5.809.060	10.000.000	4.190.940	41,91	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	19.542.800	4	4.885.700	10.000.000	5.114.300	51,14	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	18.228.193	4	4.557.048	10.000.000	5.442.952	54,43	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	15.607.800	4	3.901.950	10.000.000	6.098.050	60,98	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	16.747.741	4	4.186.935	10.000.000	5.813.065	58,13	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	21.769.504	4	5.442.376	10.000.000	4.557.624	45,58	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	4.774.774	1	4.774.774	10.000.000	5.225.226	52,25	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	18.801.631	1	18.801.631	10.000.000	-8.801.631	-88,02	0		



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	1.599.500	1	1.599.500	10.000.000	8.400.500	84,01	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	18.553.300	1	18.553.300	10.000.000	-8.553.300	-85,53	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	0	0	240.000.000	240.000.000	100,00	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	16.799.344	4	4.199.836	10.000.000	5.800.164	58,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	5.234.000	1	5.234.000	10.000.000	4.766.000	47,66	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	5.709.044	4	1.427.261	10.000.000	8.572.739	85,73	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	6.080.659	4	1.520.164	10.000.000	8.479.836	84,80	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	37.757.000	1	37.757.000	10.000.000	-27.757.000	-277,57	0		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	16.340.000	1	16.340.000	240.000.000	223.660.000	93,19	20		
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0	1	0	240.000.000	240.000.000	100,00	20		



Lampiran 16 Rincian Norma Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKH Tahun 2024

A. NSPK Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Optimalisasi Reproduksi
2. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
3. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
4. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
5. Penandaan dan Pendataan Ternak

B. NSPK Direktorat Pakan

1. Penyusunan rancangan revisi Permentan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Rancangan Pedoman Pelaksanaan Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong.
3. Rancangan Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Cara Pemberian Pakan yang Baik pada Sapi Potong Sistem Pemeliharaan Intensif.
4. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

C. NSPK Direktorat Kesehatan Hewan

1. Permentan No 17/2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya
2. Permentan No 31/2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan
3. Permentan No 39/2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota
4. Kepmentan No. 121/2023 tentang Penetapan Jenis PHMS
5. Kepmentan No 311/2023 tentang Status Situasi Penyakit Hewan
6. Kepmentan No. 285/2023 tentang Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (Food and Mouth Disease) dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kepdirjen no 10878/KPTS/HK.160/F/10/2023 tentang petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK
8. SE Dirjen 5406/SE/PK.350/F/05/2023 tentang Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan obat-obatan, diinfeksi, dan sarana prasarana untuk penyakit hewan menular lainnya
9. SE Dirjen nomor 24093/PW.020/F/03/2023 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap Peste des Petit Ruminants (PPR)



D. NSPK Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Draft Pedoman Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
2. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas HPM dalam Wilayah NKRI.
3. Revisi Permentan 17 Tahun 2022 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara/Zona.
4. Draft Revisi Permentan No 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Produk Hewan.
5. Rancangan Permentan tentang Tata Cara Pendirian dan Standar Pengelolaan Selter Hewan untuk Hewan Telantar.
6. Rancangan Akhir Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis dan Kriteria Hewan Potong serta Persyaratan Cara yang Baik dan Pengawasan di Rumah Potong Hewan.
7. Draft Pedoman Teknis Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem di Rumah Potong Hewan-Unggas.
8. Pedoman Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Penyadaran Zoonosis pada Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
9. Petunjuk Kerja Pengendalian Pemotongan Betina Produktif.

E. NSPK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Pada Subsektor Peternakan Sanitary dan Standardisasi.
2. Petunjuk Teknis Alat dan Mesin Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan
3. Road Map Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Lampiran 17 Manual IKU Ditjen PKH Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 14143/KPTS/HK.160/F/10/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN NOMOR 05651/KPTS/ RC.020/F/04/2024 TENTANG
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa manual indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2020-2024, telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 05651/KPTS/ RC.020/F/04/2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2020-2024;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan dalam indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 antara lain perhitungan indikator kinerja dan indikator nilai PMPRB, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap manual indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 05651/KPTS/RC.020/F/04/2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Lampiran 18 Surat Keputusan Dirjen PKH tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 00011/KPTS/PW.420/F/01/2024**

**TENTANG
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian kinerja dan untuk memantau progres pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024, perlu dilakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;
- b. bahwa agar Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-



Lampiran 19 Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Monev TA. 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 9915/KPTS/EC.200/F/09/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target program dan/atau kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pemantuan dan evaluasi agar memberikan peran penting untuk perbaikan pelaksanaan maupun perencanaan program dan kegiatan;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diperlukan petunjuk teknis bagi petugas penanggungjawab pemantauan dan evaluasi, dan pengelola serta pelaksana program dan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pemantuan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kementerian Pertanian Gedung C

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550
<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>